

**Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation**

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Deskripsi Auditor Independen di Opini. / Description of the Independent Auditor in the Opinion.	Deskripsi memuat tentang: / Describes: 1. Nama dan tanda tangan; / Names and signatures; 2. Tanggal Laporan Audit; dan / Date of Audit Report; and 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. / KAP and Public Accountant license numbers.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Laporan keuangan yang lengkap. / Complete financial statements.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: / Contains complete elements of financial statements: 1. Laporan posisi keuangan; / Statements of financial position; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; / Statements of profit or loss and other comprehensive income; 3. Laporan perubahan ekuitas; / Statements of changes in equity; 4. Laporan arus kas; / Statements of cash flows; 5. Catatan atas laporan keuangan; / Notes to the financial statements; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan / Comparative information about the previous period; and 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). / Statements of financial position at the beginning of the previous period when the entity implemented an accounting policy retrospectively or prepared restatements of items in the financial statements, or when the entity reclassified the items in its financial statements (if relevant).	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Perbandingan tingkat profitabilitas. / Comparison of profitability rate.	Menampilkan perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. / Displays the comparison of performance/ profit (loss) of the current year and of the previous year.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Laporan Arus Kas. / Cash Flows Statements.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: / Complies with the following provisions: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; / Classification for three activities: operating, investing, and financing; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; / Use of direct method to report cash flows from operating activities; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan / Separated presentation of cash inflows and/or cash outflows during the current year in the operating, investing, and financing activities; and 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. / Disclosure of non-cash transaction which must be stated in the notes to financial statements.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. / Accounting Policy Highlights.	Meliputi sekurang-kurangnya: / Contains, among others: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; / Statement of compliance with the FAS; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; / Basis for calculating and preparing the financial statements; 3. Pajak penghasilan; / Income tax; 4. Imbalan kerja; dan / Employee benefits; and 5. Instrumen Keuangan. / Financial Instruments.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan transaksi pihak berelasi. / Disclosure of transaction with related parties.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: / Issues to be disclosed are: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; / Name of related parties as well as the nature of relations with related parties; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan / Value of transactions and the percentage to the related total revenues and expenses; and 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. / Balance and the percentage to the related total asset or liabilities.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements

**Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation**

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. / Disclosure of details related to taxes.	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; / Fiscal reconciliation and calculation of current tax expenses; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; / Description of relationship between tax expenses (gains) and profit from accounting; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018; / Statement that Taxable Profit (LKP) as the result of reconciliation becomes the basis in filling out the Annual Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax of 2018; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan / Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statements of financial position for each presentation period, and total deferred tax expenses (gains) recognized in the statements of profit or loss if the amount is not evident in total deferred tax assets and liabilities recognized in the statements of financial position; and 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. / Disclosure of the presence of tax dispute. 	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. / Disclosure of details related to fixed assets.	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penyusutan yang digunakan; / Method of depreciation used; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; / Description of the selected accounting policy, between the revaluation model and cost model; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan / Significant method and assumption used in estimating the fair value of fixed assets (for revaluation model) or disclosing the fair value of fixed assets (for cost model); 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. / Reconciliation of gross carrying amount and accumulation of depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period, by displaying: addition, deduction, and reclassification. 	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. / Disclosure of details related to operating segments.	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; / General information covering the factors used in identifying the reported segments; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; / Information on profit or loss, assets, and liabilities of reported segments; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan / Reconciliation of total income of the segments, profit or loss of the reported segments, assets and liabilities of the segments, and other material elements of the segments to the related amount in the entity; and 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. / Disclosure at the entity's level, covering information on products and/or services, geographical area, and primary customers. 	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. / Disclosure of details related to Financial Instruments.	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; / Details of financial instruments owned based on their classification; 2. Nilai wajar dan hierarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; / Fair value and the hierarchy for each group of financial instrument; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; / Description of risks related to the financial instruments, including market risk, credit risk, and liquidity risk. 4. Kebijakan manajemen risiko; dan / Risk management policy; and 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. / Quantitative analysis of risks related to the financial instruments. 	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Penerbitan laporan keuangan. / Publication of financial statements.	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain: / Issues to be disclosed are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan / Date of financial statements authorized for publication; and 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. / Party responsible for authorizing the financial statements. 	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Surat Pernyataan Anggota *Board of Commissioners* dan *Board of Directors* Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Maret 2020

Board of Commissioners



Badrodin Haiti
President Commissioner



R. Agus Sartono
Commissioner



Danis H. Sumadifaga
Commissioner



Robert Leonard Marbun
Commissioner



Viktor S. Sirait
Independent Commissioner



Muhammad Aqil Irham
Independent Commissioner



Muradi
Independent Commissioner

The Board of Commissioners' and The Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2019 Annual Report of PT Waskita Karya (Persero) Tbk

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2019 Annual Report of PT Waskita Karya (Persero) Tbk have been presented completely and we are thus fully responsible for the truthfulness of the contents in this Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, March 10 2020

Board of Directors

I Gusti Ngurah Putra
President Director

Haris Gunawan
Director of Finance

Hadjar Seti Adji
Director of Human Capital
Management & System
Development

Fery Hendriyanto
Director of Business
Development & Quality, Safety,
Health & Environment

Didit Oemar Prihadi
Director of Operation I

Bambang Rianto
Director of Operation II

Gunadi
Director of Operation III

08

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
DAN ENTITAS ANAK**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

ONWARD THROUGH HIGH QUALITY PERFORMANCE



Daftar Isi	Halaman / <u>Pages</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018		<i>Consolidated Financial Statements - For the years ended December 31, 2019 and 2018</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan ENTITAS ANAK/
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018 (AUDITED)
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk and SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama/Name | : | I Gusti Ngurah Putra |
| Alamat kantor/Office Address | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340 |
| Alamat domisili sesuai KTP/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Wirahyuda I/B-18, RT 001/007, Cipinang Melayu,
Makasar, Jakarta Timur |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | 021- 8508501 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2. Nama/ Name | : | Haris Gunawan |
| Alamat kantor/Office Address | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340 |
| Alamat domisili sesuai KTP/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Cibogo Atas, RT 001/003, Sukawarna, Sukajadi,
Bandung |
| Nomor Telepon/ Phone Number | : | 021- 8508510 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Keuangan/ <i>Director of Finance</i> |

Menyatakan bahwa :

- | | |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian; | <i>state that :</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 2. <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | 3. a. <i>All information in the consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas Anak. | b. <i>The consolidated financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and</i> |
| | 4. <i>We are responsible for internal control system within the Company and its subsidiaries.</i> |

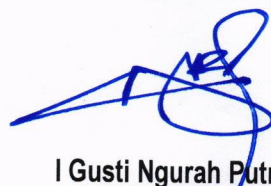
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

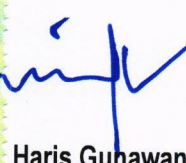
Jakarta, 10 Maret 2020/ March 10, 2020

Direktur Utama /
President Director

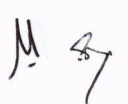
Direktur Keuangan/
Director of Finance



I Gusti Ngurah Putra



Haris Gunawan



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00143/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/III/2020

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0572/
Public Accountant License Number: AP.0572

Jakarta, 10 Maret / March 10, 2020

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Rupiah Penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF
 FINANCIAL POSITION
 December 31, 2019 and 2018
 (In Full of Rupiah)**

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3, 51, 54	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka-Pendek	4	8.448.200.000	8.448.200.000	Short-Term Investments
Piutang Usaha - Bersih				Accounts Receivable - Net
Pihak Berelasi	5, 54	1.085.899.931.009	2.242.057.577.361	Related Parties
Pihak Ketiga	5	2.469.994.551.718	1.526.131.112.293	Third Parties
Piutang Retensi - Bersih				Retention Receivables - Net
Pihak Berelasi	7, 54	1.461.470.561.988	954.996.413.765	Related Parties
Pihak Ketiga	7	321.656.594.689	378.870.671.385	Third Parties
Piutang Lain-lain lancar - Bersih				Other Current Receivable - Net
Pihak Berelasi	8, 54	3.961.228.866.682	3.631.385.077.579	Related Parties
Pihak Ketiga	8	4.437.931.030.282	5.136.564.031.224	Third Parties
Piutang Ventura Bersama	6	3.302.632.305.354	659.662.426.115	Joint Ventures Receivables
Persediaan	9	4.470.845.549.423	5.089.231.071.244	Inventories
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa				Gross Amount Due From Customers
Bagian Lancar				Current Portion
Pihak Berelasi	10, 54	11.475.684.609.873	24.937.285.230.226	Related Parties
Pihak Ketiga	10	2.695.490.949.143	7.413.447.932.876	Third Parties
Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi				Financial Asset From Concession Project -
Bagian Lancar	20	13.129.339.111	13.129.339.111	Current Portion
Pajak Dibayar Dimuka	11	2.639.161.276.311	2.744.222.361.192	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	12	1.435.959.092.145	1.408.020.160.619	Advances and Prepayments
TOTAL ASET LANCAR		49.037.842.886.120	66.989.129.822.191	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	13	5.384.494.191.741	6.651.472.170.541	Investment in Associates and Joint Ventures
Piutang Lain-lain Tidak Lancar				Other Non-Current Receivable
Pihak Berelasi	8, 54	39.456.718.793	36.492.465.249	Related Parties
Pihak Ketiga	8	69.697.329.695	40.363.436.530	Third Parties
Properti Investasi	14	310.146.389.684	126.279.404.689	Investment Properties
Investasi Jangka Panjang Lainnya	15	446.756.923.000	347.822.000.000	Other Long-Term Investments
Aset Tetap - Bersih	16	8.663.216.063.821	7.091.121.159.643	Fixed Assets - Net
Goodwill	17	1.995.908.825.753	1.995.908.825.753	Goodwill
Aset Tak Berwujud				Intangible Assets
Hak Pengusahaan Jalan Tol	19	55.378.833.829.251	40.233.245.160.591	Toll Road Concession Rights
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi	20	339.019.791.333	381.622.115.538	Financial Assets from Concession Project
Aset Pajak Tangguhan	11	1.542.424.572	1.557.248.071	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	18	922.343.976.808	496.567.814.840	Other Assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		73.551.416.464.451	57.402.451.801.445	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		122.589.259.350.571	124.391.581.623.636	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
December 31, 2019 and 2018
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha				Accounts Payable
Pihak Berelasi	21	202.384.052.499	162.642.716.514	Related Parties
Pihak Ketiga	21	12.178.793.774.334	14.743.190.282.452	Third Parties
Utang Bank Jangka Pendek				Short-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	22, 54	10.548.870.504.263	15.838.981.106.761	Related Parties
Pihak Ketiga	22	11.613.492.688.617	12.120.266.171.454	Third Parties
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek				Loan to Financial Institution Non-Bank Short-Term Portion
Pihak Berelasi	23, 54	--	392.616.610.781	Related Parties
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek				Short-Term Gross Amount Due to Subcontractors
Pihak Berelasi	24, 54	71.292.255.619	28.608.708.105	Related Parties
Pihak Ketiga	24	2.617.607.394.787	6.447.912.789.870	Third Parties
Biaya yang Masih Harus Dibayar	26	720.628.410.360	695.785.978.311	Accrued Expenses
Utang Pajak Jangka Pendek	11	1.381.844.607.528	2.028.608.632.641	Short-Term Taxes Payables
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek				Advances on Short-Term Contract
Pihak Berelasi	25, 54	48.365.113.601	10.080.783.551	Related Parties
Pihak Ketiga	25	315.921.526.485	277.599.246.755	Third Parties
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	30	833.000.000.000	416.500.000.000	Current Maturities of Long-Term Bank Loan
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar	32	8.710.487	198.479.272	Debt Purchases of Fixed Assets - Current Portion
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	27	732.996.527.781	812.204.218.768	Short-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih	28	3.264.993.640.444	1.999.290.340.350	Short-Term Bonds Payable - Net
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	29	493.295.932.778	825.239.033.758	Other Short-Term Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		45.023.495.139.583	56.799.725.099.343	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Panjang				Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	30, 54	14.972.616.592.642	15.157.592.571.768	Related Parties
Pihak Ketiga	30	14.352.533.774.287	5.594.661.305.370	Third Parties
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang	31			Long-Term Joint Venture Payable
Pihak Berelasi	31	238.172.581.683	284.884.748.376	Related Parties
Pihak Ketiga	31	535.261.199.938	386.722.691.962	Third Parties
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang				Long Term Loan to Financial Institution Non Bank
Pihak Berelasi	23	1.279.719.946.497	--	Related Parties
Pihak Ketiga	23	566.871.061.034	161.786.818.242	Third Parties
Utang Bruto Jangka Panjang				Long-Term Gross Amount
Pihak Ketiga	24	1.361.073.469.091	2.225.140.670.799	Third Parties
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang				Advances on Long-Term Contract
Pihak Berelasi	34, 54	2.710.233.423	76.760.975.950	Related Parties
Pihak Ketiga	34	163.195.034.137	186.139.786.284	Third Parties
Liabilitas Pajak Tangguhan	11	28.635.109.703	54.362.636.473	Deferred Tax Liabilities
Utang Pajak Jangka Panjang	11	193.161.337.709	805.408.693.733	Long-Term Taxes Payable
Utang Lain-lain Jangka Panjang				Other Long-Term Payables
Pihak Ketiga	33	1.876.410.844.810	1.549.134.705.578	Third Parties
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	27	300.000.000.000	300.000.000.000	Long-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih	28	12.422.420.279.553	11.849.363.801.404	Long-Term Bonds Payable - Net
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Panjang	32	--	6.226.563	Debt Purchases of Fixed Assets - Long-Term Portion
Liabilitas Imbalan Kerja	35	154.513.557.482	72.772.140.924	Employee Benefit Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		48.447.295.021.989	38.704.737.773.426	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		93.470.790.161.572	95.504.462.872.769	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per Saham pada 2019 dan 2018				Share Capital - Rp 100 par Value per Share for for 2019 and 2018 respectively
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 25.999.999.999 Saham Seri B pada 2019 dan 2018				Authorized Capital - 1 share of Dwi Warna Serie A and 25,999,999,999 Shares of Serie B in for 2019 and 2018 respectively
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 13.573.902.599 Saham Seri B pada 2019 dan 2018	36	1.357.390.259.999	1.357.390.259.999	Subscribed and Fully Paid Capital 1 share of Dwi Warna Serie A and 13,573,902,599 Serie B Shares in for 2019 and 2018 respectively
Tambahan Modal Disetor	37	5.552.026.262.437	5.552.026.262.437	Additional Paid-in Capital
Saldo Laba	38			Retained Earnings
Telah Ditetapkan Penggunaannya		1.672.393.928.212	1.583.494.837.349	Appropriated
Belum Ditetapkan Penggunaannya		8.561.015.893.115	8.763.909.422.956	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		739.581.647.808	744.295.282.636	Other Component of Equity
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan				Total Equity Attributable to
Kepada Pemilik Entitas Induk		17.882.407.991.571	18.001.116.065.377	Owners of Parent
Kepentingan Non-Pengendali	46	11.236.061.197.428	10.886.002.685.490	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		29.118.469.188.999	28.887.118.750.867	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		122.589.259.350.571	124.391.581.623.636	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Then Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan Usaha	39, 55	31.387.389.629.869	48.788.950.838.822	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	40	(25.782.746.866.464)	(39.926.332.089.924)	Cost of Revenues
LABA BRUTO		5.604.642.763.405	8.862.618.748.898	GROSS PROFIT
Beban Penjualan	41	(51.589.935.546)	(51.205.890.476)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	41	(1.319.957.348.117)	(1.616.540.079.059)	General and Administrative Expenses
Beban Pajak Final	11	(706.417.381.314)	(1.489.515.370.042)	Final Tax Expenses
Pendapatan Bunga		957.884.130.420	648.047.194.568	Interest Income
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih		(12.551.246.681)	11.863.388.237	Gain (Loss) on Foreign Exchange Rates - Net
Pendapatan Lain - lain	42	965.263.113.888	2.025.109.357.243	Other Income
Beban Lain-lain	43	(197.802.480.370)	(423.475.576.187)	Other Expenses
LABA SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA		5.239.471.615.685	7.966.901.773.182	PROFIT BEFORE FINANCIAL CHARGES, EQUITY IN NET INCOME OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
Beban Keuangan	44	(3.620.533.969.507)	(2.459.241.670.378)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	45	(290.287.684.339)	28.782.401.204	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
LABA SEBELUM PAJAK		1.328.649.961.839	5.536.442.504.008	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	11	(299.751.593.948)	(916.874.798.455)	Income Tax Expenses
LABA TAHUN BERJALAN		1.028.898.367.891	4.619.567.705.553	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				Items that Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap		--	242.948.717.891	Revaluation Surplus on Fixed Assets
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih		(61.427.295.899)	27.790.965.459	Remeasurement of Defined Benefit Obligations - Net
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				Items that Will Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Operasi Luar Negeri		(4.713.634.828)	18.748.604.154	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Operational
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan		(66.140.930.727)	289.488.287.504	Total Other Comprehensive Income (Expenses) For The Year
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN		962.757.437.164	4.909.055.993.057	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		938.142.364.887	3.962.838.031.865	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	46	90.756.003.004	656.729.673.688	Non-Controlling Interest
LABA TAHUN BERJALAN		1.028.898.367.891	4.619.567.705.553	PROFIT FOR THE YEAR
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		872.001.434.160	4.252.326.319.369	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	46	90.756.003.004	656.729.673.688	Non-Controlling Interest
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN		962.757.437.164	4.909.055.993.057	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba per saham	47			Earnings per share
Dasar		69,11	291,95	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
For the Years Ended Then December 31, 2019 and 2018
(In Full of Rupiah)

Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to the Owners of the Parent											
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Shares Capital	Tambahannya Additional Paid-In Capital	Saldo laba/ Retained earnings			Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Component of Equity			Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
			Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total	Selisih Penjabaran Laporan Dalam Mata Uang Asing/ Translation Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Jumlah/ Total			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO PER 31 DESEMBER 2017	1.357.390.259.999	5.467.018.482.083	920.938.115.937	5.760.142.991.677	6.681.081.107.614	(7.360.512.042)	508.308.951.702	14.006.438.289.356	8.748.386.520.139	22.754.824.809.495	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2017
Cadangan Umum	38	--	662.556.721.412	(662.556.721.412)	--	--	--	--	--	--	General Reserves
Opsi Saham	--	(568.091.840)	--	--	--	--	--	(568.091.840)	--	(568.091.840)	Stock Option
Dividen Tunai	--	--	--	(776.342.383.468)	(776.342.383.468)	--	--	(776.342.383.468)	--	(776.342.383.468)	Cash Dividend
Kepentingan Non-Pengendali	46	--	--	--	--	--	--	--	1.480.886.491.663	1.480.886.491.663	Non-Controlling Interest
Surplus Revaluasi Aset Tetap	--	--	--	--	--	--	242.948.717.891	242.948.717.891	--	242.948.717.891	Revaluation Surplus on Fixed Assets
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	3.962.838.031.865	3.962.838.031.865	--	--	3.962.838.031.865	656.729.673.688	4.619.567.705.553	Profit for the Current Year
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan atas Entitas Anak	--	85.575.872.194	--	452.036.538.835	452.036.538.835	--	(18.350.479.069)	519.261.931.960	--	519.261.931.960	Adjustment for Changes Ownership in Subsidiaries
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	--	--	--	27.790.965.459	27.790.965.459	--	--	27.790.965.459	--	27.790.965.459	Remeasured of Defined Benefits Plans - Net
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri	--	--	--	--	--	18.748.604.154	--	18.748.604.154	--	18.748.604.154	Exchange Rates Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Operations
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.583.494.837.349	8.763.909.422.956	10.347.404.260.305	11.388.092.112	732.907.190.524	18.001.116.065.377	10.886.002.685.490	28.887.118.750.867	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018
Cadangan Umum	38	--	88.899.090.863	(88.899.090.863)	--	--	--	--	--	--	General Reserves
Dividen Tunai	--	--	--	(990.709.507.966)	(990.709.507.966)	--	--	(990.709.507.966)	--	(990.709.507.966)	Cash Dividend
Kepentingan Non-Pengendali	46	--	--	--	--	--	--	--	259.302.508.934	259.302.508.934	Non-Controlling Interest
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	938.142.364.887	938.142.364.887	--	--	938.142.364.887	90.756.003.004	1.028.898.367.891	Profit for the Current Year
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Bersih	--	--	--	(61.427.295.899)	(61.427.295.899)	--	--	(61.427.295.899)	--	(61.427.295.899)	Remeasurement of Defined Benefits Plans - Net
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri	--	--	--	--	--	(4.713.634.828)	--	(4.713.634.828)	--	(4.713.634.828)	Exchange Rates Difference on translation of Financial Statements in Foreign Operations
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.672.393.928.212	8.561.015.893.115	10.233.409.821.327	6.674.457.284	732.907.190.524	17.882.407.991.571	11.236.061.197.428	29.118.469.188.999	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**

For the Years Then Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Full of Rupiah)

	2019 Rp	2018 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	53.622.470.304.152	49.153.481.633.794	Cash Receipts from Customers
Pengeluaran Kas kepada Pemasok	(39.812.397.638.626)	(42.146.152.132.659)	Cash Paid to Suppliers
Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi	(786.179.050.513)	(1.034.852.971.320)	Cash Paid to Employees and Directors
Kas Dihasilkan dari Operasi	13.023.893.615.013	5.972.476.529.815	Cash Generated from Operations
Pembayaran Beban Keuangan	(1.823.812.200.163)	(394.805.443.798)	Payment for Financial Charges
Penerimaan Restitusi Pajak	314.435.395.994	--	Receipt from Tax Restitutions
Pembayaran Pajak	(2.500.267.370.782)	(1.566.131.007.443)	Payment for Taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	9.014.249.440.062	4.011.540.078.574	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari Ventura Bersama	915.660.664.958	195.521.828.745	Receipt from Joint Ventures
Penempatan pada Ventura Bersama	(2.860.216.608.022)	(871.698.742.646)	Placement of Joint Ventures
Penempatan Deposito	(216.255.472.785)	(2.272.636.099.368)	Placement of Time Deposits
Penerimaan Pencairan Deposito	2.099.000.000.000	1.821.534.513.690	Receipt from Time Deposits
Penerimaan Dividen dari Entitas Anak	--	484.030.710.810	Receipt Dividend from Subsidiaries
Perolehan Aset Tetap	(2.742.933.949.138)	(2.962.349.807.081)	Acquisition of Fixed Assets
Penambahan Properti Investasi	(183.866.984.995)	(59.733.151.815)	Addition of Investment Properties
Perolehan Aset Takberwujud	(11.963.159.274.305)	(15.181.992.508.784)	Acquisition of Intangible Assets
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya	(1.597.873.534.941)	(2.801.102.344.000)	Placement of Investment In Associates and Long-Term Investments
Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	1.657.200.000.000	2.857.143.347.539	Receipt from Disposal of Investment In Subsidiaries and Associates
Pinjaman Diberikan kepada Entitas Asosiasi	(32.298.146.709)	214.527.369.072	Loans to Associates
Pengurangan Penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	--	(191.396.766.625)	Reduction of Investment in Subsidiaries and Associates
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14.924.743.305.937)	(18.768.151.650.463)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pelunasan Utang Obligasi	(2.000.000.000.000)	(350.000.000.000)	Payment of Bonds Payable
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka	969.702.739.827	636.933.783.652	Interest Income from Current Account and Time Deposit
Pembayaran Beban Keuangan	(3.642.809.954.485)	(1.613.334.640.902)	Payment for Financial Charges
Pembayaran Emisi Obligasi	(42.622.479.202)	(41.953.938.572)	Bonds Issuance Costs
Penerimaan Penerbitan Obligasi	3.845.750.000.000	5.154.250.000.000	Receipt from Bonds Issuance
Penerimaan Pinjaman Bank	101.597.843.065.552	92.883.247.775.045	Receipt from Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	(96.874.491.736.591)	(76.733.808.263.389)	Payment of Bank Loans
Pembayaran Dividen Tunai	(990.709.745.083)	(776.342.383.468)	Payment of Cash Dividend
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	1.292.187.578.508	879.341.822.975	Receipt from Financial Institution Non Bank
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	--	(2.218.009.712.976)	Payment to Financial Institution Non Bank
Penerimaan Surat Utang Jangka Menengah	700.000.000.000	1.144.403.604.859	Receipt from Medium Term Notes
Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah	(779.207.690.987)	(786.371.433.625)	Payment to Medium Term Notes
Penerimaan Setoran dari Entitas Non-Pengendali	259.302.508.934	1.512.726.235.858	Receipt from Non-controlling Interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	4.334.944.286.473	19.691.082.849.457	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH DAN SETARA KAS	(1.575.549.579.402)	4.934.471.277.568	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM DIREALISASI	(11.818.609.407)	11.113.410.916	UNREALIZED GAIN (LOSS) ON FOREIGN EXCHANGE RATE
EFEK DIVESTASI	--	(188.869.058.030)	EFFECT ON DIVESTMENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	10.845.678.217.201	6.088.962.586.747	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan
(Catatan 50)

Reconciliation of liabilities arising from financing activities
(Note 50)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the consolidated
financial statements

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Negara Waskita Karya ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1961, dari Perusahaan asing bernama "Volker Aanemings Maatschappij NV" yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 Januari 1961.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1970 status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT Waskita Karya (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Agustus 1973 dengan Surat Keputusan No. 4.a.5/310/3 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Nopember 1973, Tambahan Berita Negara No. 91.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 137 tanggal 27 Mei 2019 dari notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0033169.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai bidang usaha Perusahaan.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

1.b. Entitas Anak

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham pada entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

a. Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Toll/ Toll Road	2014	80,56	71.249.304.994.583	(675.960.085.557)
PT Waskita Beton Precast Tbk	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Fabrication	2014	59,99	16.149.121.684.330	806.148.752.926
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Properti/ Property	2015	99,99	5.074.027.250.603	102.717.027.218
PT Waskita Karya Infrastruktur (dih/ formerly PT Waskita Karya Energi)	Jakarta	Investasi/ Investment	2016	99,99	663.521.030.725	(9.719.896.586)

1. GENERAL

1.a. Establishment and General Information

The State Owned Company Waskita Karya ("the Company") was established on January 1, 1961 based on Government Regulation No. 62 year 1961, from a foreign company named "Volker Aanemings Maatschappij NV" which was nationalized by the Government of the Republic of Indonesia. The Company started its commercial operations on January 1, 1961.

According to Government Regulation No. 40 year 1970, the Company's status was changed from State Enterprise into Perseroan (Persero). Furthermore, the Company was named as PT Waskita Karya (Persero) in accordance with the Deed of Limited Liability Corporation No. 80 dated March 15, 1973 of Kartini Mulyadi, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law on August 20, 1973 in his Decree No. 4.a.5/310/3 and stated on State Gazette of Republic of Indonesia No. 82 on November 13, 1973, Supplement No. 91.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 137 on May 27, 2019 of notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0033169.AH.01.02.Tahun 2019 dated June 26, 2019. The changes referred to include, among others, changes in the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the scope of business Company.

The Company is domiciled in Jakarta, with the head office located at Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

1.b. Subsidiaries

The Company has 50% direct and indirect ownership interest in subsidiaries and/or has control over consolidated subsidiaries management as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination 2018	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	2014	79,88	57.262.108.475.134	957.458.418.294
PT Waskita Beton Precast Tbk	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Fabrication	2014	59,99	15.222.388.589.814	1.103.472.788.182
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Properti/ Property	2015	99,99	4.290.092.896.122	168.462.426.431
PT Waskita Karya Energi	Jakarta	Investasi/ Investment	2016	99,99	397.152.131.423	(23.188.344.439)

b. Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination 2019	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ Energy	2016	94,70	382.636.991.470	11.847.887.766
PT Waskita Wado Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	17.376.158.131	(5.639.369.884)
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	90,00	8.291.272.849.832	31.256.377.077
PT Trans Jabar Tol	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	5.710.147.213.825	(294.387.069.541)
PT Pemalang Batang Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	November/ November 2018	60,00	7.787.893.335.065	(209.878.492.852)
PT Waskita Sriwijaya Tol (dah/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada)	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	98,18	11.538.691.245.033	870.188.312
PT Waskita Bumi Wira	Gresik	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,90	11.412.254.242.702	2.961.858.326
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	55,00	7.375.640.508.398	4.252.341.192
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Desember/ December 2017	99,70	9.136.359.763.089	(379.328.017.076)
PT Tol Teluk Balikpapan	Balikpapan	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	80,00	19.585.019.151	210.703.894
PT Waskita Fim Perkasa Reali (WFPFR)	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	826.685.975.678	5.457.526.154
PT Waskita Modern Realty (WMR)	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	401.825.844.521	87.222.470

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination 2018	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ Energy	2016	94,70	374.632.256.444	(6.895.888.971)
PT Waskita Wado Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	13.636.736.210	(5.565.819.048)
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	90,00	5.928.060.765.087	1.876.580.397
PT Trans Jabar Tol	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	5.436.936.696.537	7.560.408.553
PT Pemalang Batang Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	November/ November 2018	60,00	7.689.541.259.403	(8.913.171.618)
PT Sriwijaya Markmore Persada	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	98,18	8.271.557.566.264	2.469.228.764
PT Waskita Bumi Wira	Gresik	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,90	8.557.702.147.304	888.522.992
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	55,00	4.217.355.404.456	6.370.767.223
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Desember/ December 2017	99,70	6.973.010.047.504	(352.826.567.704)
PT Tol Teluk Balikpapan	Balikpapan	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	80,00	26.155.671.621	467.059.194
PT Waskita Fim Perkasa Reali (WFPFR)	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	136.406.866.995	(596.753.442)
PT Waskita Modern Realty (WMR)	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	401.667.169.202	184.676.343

PT Waskita Toll Road (WTR)

Pendirian WTR (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 62 tanggal 19 Juni 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-14734.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014.

PT Waskita Toll Road (WTR)

The establishment of WTR (subsidiary) was based on notarial deed No. 62 dated June 19, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-14734.40.10.2014 dated June 25, 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 47 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0323941 tanggal 30 Agustus 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor WTR.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)

Pendirian WBP (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 47 tanggal 24 April 2019 dari notaris Fathiah Helmi S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0279668 tanggal 24 Mei 2019.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

Pendirian WKR (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-54929.AH.01.02, tanggal 23 Oktober 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 14 tanggal 11 Nopember 2019 dari notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0097847.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Nopember 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI)
(dh PT Waskita Karya Energi (WKE))

Pendirian WKI (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 05 tanggal 4 Maret 2016 dari notaris Fathiah Helmi S.H. Akta

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 47 dated August 21, 2019 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0323941 dated August 30, 2019. The relevant changes are related to changes in the capital of WTR subscribed and paid.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)

The establishment of WBP (subsidiary) was based on notarial deed No. 10 dated October 7, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-29347.40.10.2014 dated October 14, 2014. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the Notarial deed No. 47 on April 24, 2019 of notary Fathiah Helmi, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0279668 dated May 24, 2019.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

The establishment of WKR (subsidiary) was based on notarial deed No. 27 dated October 16, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-54929.AH.01.02 dated October 23, 2014.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 14 on November 11, 2019 of notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0097847.AH.01.02.Tahun 2019 dated November 25, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the Company's purpose and objectives and the business activities.

PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI)
(formerly PT Waskita Karya Energi (WKE))

The establishment of WKI (subsidiary) was based on notarial deed No. 05 dated March 4, 2016 of notary Fathiah

pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 108 tanggal 26 Pebruari 2019 dari Jose Dima Satria, SH., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0117125 tanggal 26 Pebruari 2019. Nama Perusahaan berubah menjadi PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) berdasarkan akta notaris No. 109 tanggal 26 Pebruari 2019 dari Jose Dima Satria, SH., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-0010491.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Pebruari 2019.

PT Waskita Sangir Energi (WSE)

Pendirian WSE (kepemilikan tidak langsung melalui WKI) adalah sesuai dengan akta notaris No. 22 tanggal 11 Juli 2013 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-40852.AH.01.01.Tahun 2013.

Selanjutnya pengalihan kepemilikan (*inbreg*) WSE ke dalam WKI dilakukan berdasarkan dengan akta notaris No. 21 tanggal 23 Desember 2016 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.Kn. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 21 Desember 2017 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.KN yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0204677 tanggal 22 Desember 2017.

PT Waskita Wado Energi (WWE)

Pendirian WWE (kepemilikan tidak langsung melalui WKI) adalah sesuai dengan akta notaris No.15 tanggal 19 Desember 2016 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.KN. Pada bulan Desember 2016, WKI mendirikan entitas anak baru, WWE, dengan kepemilikan saham sebesar 99,96% saham dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Waskita.

Berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 6 Desember 2018 dari notaris Yusdin Fahim, S.H., kepemilikan WKI di WWE berubah menjadi Rp 9.516.000.000 sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 99,99%.

Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 108 on February 26, 2019 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0117125 dated February 26, 2019. The Company's Name change to PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) based on notarial deed No. 109 on February 26, 2019 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0010491.AH.01.02.Tahun 2019 dated February 26, 2019.

PT Waskita Sangir Energi (WSE)

The establishment of WSE (indirect ownership through WKI) was based on the notarial deed No. 22 dated July 11, 2013 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-40852.AH.01.01. Tahun 2013.

Then transfer of ownership of WSE to WKI was based on the notarial deed No. 21 dated December 23, 2016 of Kokoh Henry, S.H., M.Kn. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 15 on December 21, 2017 of notary Kokoh Henry, S.H., M.KN which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0204677 dated December 22, 2017.

PT Waskita Wado Energi (WWE)

The establishment of WWE (indirect ownership through WKI) was based on the notarial deed No. 15 dated December 19, 2016 of notary Kokoh Henry, S.H., M.KN. In December 2016, WKI established a new subsidiary, WWE, with 99.96% ownership and the remaining shares owned by Koperasi Waskita.

Based on the notarial deed No. 2 dated December 6, 2018 by notary Yusdin Fahim S.H., the ownership of WKI in WWE increased to Rp 9,516,000,000 which raised the Company's ownership to 99.99%.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 142 tanggal 22 Juli 2019 dari notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0044534.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 mengenai anggaran dasar dan susunan pemegang saham.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 142 on July 22, 2019 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0044534. AH.01.02.Tahun 2019 dated July 31, 2019. The changes referred to, among others, are related to changes in the provisions of Article 4 paragraph 1 and 2 related to articles of association and shareholder structure.

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

Pendirian CCT (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 52 tanggal 22 Pebruari 2008 dari notaris Agus Madjid, S.H. M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-09738.AH.01.01.Tahun.2008 tanggal 27 Pebruari 2008.

The establishment of CCT (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 52 dated February 22, 2008 of notary Agus Madjid, S.H. M.Kn. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-09738.AH.01.01.Tahun.2008 dated February 27, 2008.

Selanjutnya, peralihan pemegang saham CCT kepada WTR dilakukan berdasarkan dengan akta notaris No. 30 tanggal 13 Juli 2015 dari notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn.

Furthermore, the change in ownership of CCT to WTR was based on notarial deed No. 30 dated July 13, 2015 of notary Jose Dima Satria, S.H. M.Kn.

PT Trans Jabar Tol (TJT)

PT Trans Jabar Tol (TJT)

Pendirian TJT (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 79 tanggal 19 Juli 2007 dari notaris Humbert Lie, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007.

The establishment of TJT (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 79 dated July 19, 2007 of notary Humbert Lie, S.H., M.Kn. This notarial deed has been approved by The Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007.

Akuisisi TJT oleh WTR sesuai dengan akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 44 tanggal 22 Desember 2015. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0990894.

Acquisition of TJT by WTR was in accordance with the deed of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 44 dated December 22, 2015. This deed was approved by Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0990894.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 4 tanggal 3 Januari 2019 dari notaris Febby Ruben Hidayat S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0002381 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penambahan Modal.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 4 on January 3, 2019 of notary Febby Ruben Hidayat, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0002381 dated January 3, 2019 related to Capital Addition.

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)

Pendirian PBTR, (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 10 tanggal 15 Juni 2006 dari notaris Bonardo Nasution S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. C-20478 HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 13 Juli 2006.

Selanjutnya peralihan pemegang saham PBTR ke dalam WTR berdasarkan akta notaris No. 57 tanggal 15 Februari 2016 dari notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0982070.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 46 tanggal 21 Desember 2018 dari notaris Catur Virgo S.H., M.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0177882.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

PT Waskita Sriwijaya Tol (WST) (dh
PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP))

Pendirian SRIMP (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 51 tanggal 18 Nopember 2011 dari notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo S.H., M.H. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-56876.A.H.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 Nopember 2011.

Akuisisi SRIMP oleh WTR sesuai dengan akta notaris No. 26 dan No. 27 tanggal 12 Mei 2016 dari notaris Fathiah Helmi, S.H.

Berdasarkan akta notaris No. 51 tanggal 27 April 2017 dari notaris Fathiah Helmi S.H., WTR membeli saham milik PT Persada Tanjung Api-Api sebesar Rp 146.250.000.000 atau sebesar 29,25%, saham milik PT Kayson Company sebesar Rp 23.750.000.000 atau sebesar 4,75% dan saham milik PT Sriwijaya Marga Persada sebesar Rp 20.000.000.000 atau sebesar 4%, sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 75,57%.

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)

The establishment of PBTR, (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 10 dated June 15, 2006 of notary Bonardo Nasution, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. C-20478 HT.01.01.Tahun 2006 dated July 13, 2006.

Then change in ownership of PBTR to WTR was based on notarial deed No. 57 dated February 15, 2016 of notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0982070.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 46 on December 21, 2018 of notary Catur Virgo, S.H., M.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0177882.AH.01.11.Tahun 2018 dated December 27, 2018.

PT Waskita Sriwijaya Tol (WST) (formerly
PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP))

The establishment of SRIMP (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 51 dated November 18, 2011 by notary Ilmiawan Dekrit Supatmo S.H., M.H. This notarial deed was approved by The Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-56876.A.H.01.01.Tahun 2011, dated November 21, 2011.

The acquisition of SRIMP by WTR is in accordance with the notarial deed No. 26 and No. 27 dated May 12, 2016 by notary Fathiah Helmi, S.H.

Based on the notarial deed No. 51 dated April 27, 2017 by notary Fathiah Helmi S.H., WTR bought the shares owned by PT Persada Tanjung Api – Api amounted to Rp 146,250,000,000 or equivalent to 29.25%, shares owned by PT Kayson Company amounted to Rp 23,750,000,000 or equivalent to 4.75% and shares owned by PT Sriwijaya Marga Persada amounted to Rp 20,000,000,000 or equivalent to 4%, which increased the Company's ownership to 75.57%.

Berdasarkan akta notaris No. 11 tanggal 8 Juni 2018 dari notaris Catur Virgo, S.H., M.H., kepemilikan WTR di SRIMP berubah menjadi Rp 112.700.000.000 sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 98,99%.

Based on the notarial deed No. 11 dated June 8, 2018 by notary Catur Virgo S.H., M.H., the ownership of WTR in SRIMP increased to Rp 112,700,000,000 which raised the Company's ownership to 98.99%.

Berdasarkan akta notaris No. 49 tanggal 21 Desember 2018 dibuat oleh notaris Catur Virgo, S.H., M.H. berkedudukan di Jakarta Barat dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0000072.AH.01.02 tanggal 2 Januari 2019 mengenai perubahan nama PT Sriwijaya Markmore Persada menjadi PT Waskita Sriwijaya Tol disingkat WST.

Based on notarial deed No. 49 dated December 21, 2018 made by notary Catur Virgo, S.H., M.H. based in West Jakarta and obtaining approval from the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0000072.AH.01.02 dated January 2, 2019 regarding the change of name of PT Sriwijaya Markmore Persada into PT Waskita Sriwijaya Tol abbreviated as WST.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 35 tanggal 24 September 2019 dari notaris Catur Virgo S.H., M.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074036.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 24 September 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan Pasal 3 ayat 2 mengenai kegiatan usaha aktivitas jalan tol.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 35 on September 24, 2019 of notary Catur Virgo, S.H., M.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0074036.AH.01.02 Tahun 2019 dated September 24, 2019. The changes referred to, among others, are related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the business activities of toll road activities.

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 48% atas modal disetor WBW atau sebesar Rp 7.500.000.000, berdasarkan akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. No. 43 tanggal 28 Oktober 2014.

The Company had an initial ownership of 48% on the paid in capital of WBW amounted to Rp 7,500,000,000, based on the notarial deed of Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. No. 43 dated October 28, 2014.

Pada tanggal 9 Mei 2016, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 Mei 2016, WTR membeli saham milik PT Energi Bumi Mining sebesar Rp 1.094.000.000, sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 55%.

On May 9, 2016, based on the Decree of the Circular Resolution of General Meeting of Shareholders dated May 3, 2016, WTR bought the shares owned by PT Energi Bumi Mining amounted to Rp 1,094,000,000, which increased the Company's ownership to 55%.

Berdasarkan akta notaris No. 5 tanggal 4 April 2016, PT Energi Bumi Mining memiliki opsi saham untuk membeli kembali transfer kepemilikan 7% dari WBW sampai dengan 31 Desember 2016. Opsi saham tersebut hangus dan WBW dikonsolidasi.

Based on notarial deed No. 5 dated April 4, 2016, PT Energi Bumi Mining has shares option to buy back the 7% ownership transfer from WBW until December 31, 2016. The shares option was expired and WBW was consolidated.

Berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 8 Desember 2017 dari notaris Zulkifli Harahap S.H., Modal Dasar WBW yang sebelumnya berjumlah 50.000 lembar saham menjadi 1.000.000 lembar saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 7.500.000.000 menjadi Rp 554.957.000.000 sehingga

Based on the notarial deed No. 13 dated December 8, 2017, by notary Zulkifli Harahap S.H., the authorized capital of the WBW changed from 50,000 shares to 1,000,000 shares and increase in issued capital and fully paid from Rp 7,500,000,000 to Rp 554,957,000,000 which increased WTR's ownership to

penyertaan WTR meningkat menjadi 76,06%. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Keputusan No. AHU-0156761.AH.01.11 tanggal 11 Desember 2017.

Berdasarkan surat keterangan notaris Zulkifli Harahap S.H., No. 364/NZH/PT/II/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), WTR menambah penyertaan pada WBW sebesar Rp 826.718.000.000. Perubahan ini telah disahkan sesuai dengan akta notaris Zulkifli Harahap, S.H No. 10 tanggal 9 Pebruari 2018.

Berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 27 Nopember 2018 dari notaris Zulkifli Harahap, S.H., M.H., kepemilikan WTR di WBW berubah menjadi Rp 1.268.697.000.000. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0268229 tanggal 27 Nopember 2018.

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)

Pendirian PT MTD CTP Expressway (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 4 tanggal 13 September 2006 dari notaris Martina S.H. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23 Nopember 2006 No. W7-02046 HT.01.01-TH.2006.

Peralihan pemegang saham PT MTD CTP Expressway kepada WTR sesuai dengan akta notaris No. 15 tanggal 26 April 2017 dari notaris Zulkifli Harahap, S.H.

Berdasarkan akta notaris Drs. Soebiantoro, S.H., No. 17 tanggal 24 Mei 2017 telah disetujui perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama "PT MTD CTP Expressway" menjadi "PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways".

Berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 20 September 2019 dari notaris Drs. Soebiantoro, S.H., kepemilikan WTR di CTP berubah menjadi Rp 696.304.700.000. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0336756 tanggal 25 September 2019.

76.06%. This deed was approved by Ministry of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0156761.AH.01.11 dated December 11, 2017.

Based on the letter of notary Zulkifli Harahap S.H., No. 364/NZH/PT/II/2018 dated February 1, 2018 in connection with the Extraordinary General Shareholders Meeting (RUPSLB), WTR added the investment in WBW amounted to Rp 826,718,000,000. This amendment has been ratified in accordance with the notarial deed of Zulkifli Harahap, S.H No. 10 dated February 9, 2018.

Based on the notarial deed No. 18 dated November 27, 2018 by notary Zulkifli Harahap S.H., M.H., the ownership of WTR in WBW increased to Rp 1,268,697,000,000. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Right through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0268229 dated November 27, 2018.

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)

The establishment of PT MTD CTP Expressway (indirect ownership through WTR) was based on the notarial deed No. 4 dated September 13, 2006 of notary Martina, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Right through the decision letter No. W7-02046 HT.01.01-TH.2006 dated November 23, 2006.

Transfer of ownership of PT MTD CTP Expressway to WTR was based on notarial deed No. 15 dated April 26, 2017 of notary Zulkifli Harahap, S.H.

Based on notarial deed Drs. Soebiantoro, S.H, No. 17 dated May 24, 2017 has approved to change the name of "PT MTD CTP Expressway" into "PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways".

Based on the notarial deed No. 18 dated September 20, 2019 by notary Drs. Soebiantoro S.H., the ownership of WTR in CTP increased to Rp 696,304,700,000. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Right through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0336756 dated September 25, 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 3 Oktober 2019 dari notaris Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0079843.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

Pendirian KKDM (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai Akta Pendirian dari Notaris Mudofir Hadi S.H, No. 94 tanggal 20 Desember 1996. WTR memiliki penyertaan 60% dari modal disetor KKDM.

Berdasarkan akta notaris tanggal 8 Juni 2017 dari notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 25, WTR membeli kepemilikan minoritas pada saham KKDM sebesar 38,97% atau senilai Rp 525.000.000.000, sehingga kepemilikan WTR menjadi 98,97%.

Berdasarkan akta notaris No. 17 tanggal 20 Desember 2017 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., WTR membeli penerbitan saham KKDM sebesar 0,57% sehingga kepemilikan WTR atas KKDM menjadi 99,54%.

Berdasarkan akta notaris No. 3 tanggal 9 Februari 2018 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., perihal Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Januari 2018, WTR menambah penyertaan pada KKDM sebesar Rp 73.476.879.000.

Berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 5 Juni 2018 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., WTR menambah penyertaan pada KKDM sebesar Rp 49.124.000.000, sehingga kepemilikan WTR menjadi 99,64%, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0216005 tanggal 26 Juni 2018.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 9 Januari 2019 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan penerbitan dan penambahan modal. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0016493 tanggal 11 Januari 2019.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently based on notarial deed No. 4 on October 3, 2019 of Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0079843.AH.01.02.Tahun 2019 dated October 8, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the Company's purpose and objectives and the business activities.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

The establishment of KKDM (indirect ownership through WTR) was based on the notarial deed No. 94 dated December 20, 1996 of notary Mudofir Hadi, S.H. WTR owns 60% of paid up capital of KKDM.

Based on notarial deed No. 25 dated June 8, 2017 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., WTR purchased a minority interest in KKDM amounted to 38.97% or equivalent to Rp 525,000,000,000, bringing the ownership of WTR to 98.97%.

Based on notarial deed No. 17 dated December 20, 2017 by notary Ariani L. Rachim, S.H., WTR bought 0.57% issuance of KKDM shares and bringing the WTR's ownership on KKDM to 99.54%.

Based on notarial deed No. 3 dated February 9, 2018 of notary Ariani L. Rachim, S.H., regarding the Circular Resolution of General Meeting of Shareholders (AGM) dated January 24, 2018, WTR increased its ownership in KKDM amounted to Rp 73,476,879,000.

Based on notarial deed No. 4 dated June 5, 2018 of notary Ariani L. Rachim, S.H., WTR increased its ownership in KKDM amounted to Rp 49,124,000,000, bringing the ownership of WTR to 99.64%, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0216005 dated June 26, 2018.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 15 on January 9, 2019 of notary Ariani L. Rachim, S.H., regarding changes in the Company's issued and increased paid capital stocks. The amendment had been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0016493 dated January 11, 2019.

PT Tol Teluk Balikpapan (TTB)

Pendirian TTB (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 42 tanggal 16 September 2016 dari notaris Yeti Liana, S.Psi., S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tanggal 21 September 2016 No. AHU-0041732.AH.01.01.Tahun 2016. WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 60% pada TTB atau setara Rp 12.000.000.000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 27 tanggal 18 September 2019 dari notaris Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072820.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

PT Waskita Fim Perkasa Realty (WFPR)

Pendirian WFPR (kepemilikan tidak langsung melalui WKR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 122 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Rosida Rajagukguk Siregar. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tanggal 31 Mei 2018 No. AHU-0075663.AH.01.11.Tahun 2018.

Anggaran dasar WFPR telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 126 dari Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., tanggal 19 Desember 2019 tentang penambahan penyertaan WKR pada WFPR sebesar Rp 45.120.000.000 sehingga kepemilikan menjadi 60% atau setara dengan Rp 283.821.000.000. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0379243 tanggal 30 Desember 2019.

PT Waskita Modern Realty (WMR)

Pendirian WMR (kepemilikan tidak langsung melalui WKR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 7 tanggal 17 Mei 2018 dari notaris Dewi Tenti Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan

PT Tol Teluk Balikpapan (TTB)

The establishment of TTB (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 42 dated September 16, 2016 of notary Yeti Liana, S. Psi., S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter dated September 21, 2016 No. AHU-0041732.AH.01.01.Tahun 2016. WTR, a subsidiary, holds a 60% interest in TTB or equivalent to Rp 12,000,000,000.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 27 on September 18, 2019 of Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0072820.AH.01.02.Tahun 2019 dated September 20, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the Company's purpose and objectives and the business activities.

PT Waskita Fim Perkasa Realty (WFPR)

The establishment of WFPR (indirect ownership through WKR) was based on notarial deed No. 122 dated May 31, 2018 of notary Rosida Rajagukguk Siregar. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter dated May 31, 2018 No. AHU-0075663.AH.01.11.Tahun 2018.

WFPR's Article of Association has been amended, most recently based on notarial deed No. 126 of Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., dated December 19, 2019 WKR increased its investment in WFPR amounted to Rp 45,120,000,000, increasing ownership to 60% or equivalent to Rp 283,821,000,000. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0379243 dated December 30, 2019.

PT Waskita Modern Realty (WMR)

The establishment of WMR (indirect ownership through WKR) was based on notarial deed No. 7 dated May 17, 2018 of notary Dewi Tenti Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter

tanggal 17 Mei 2018 No. AHU-0069024.AH.01.11.Tahun 2018.

dated May 17, 2018 No. AHU-0069024.AH.01.11. Tahun 2018.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 13 Juli 2018 dari notaris Dewi Tenti Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014522.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 4 on July 13, 2018 of notary Dewi Tenti Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn. The amendment had been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0014522.AH.01.02.Tahun 2018 dated July 18, 2018.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

The Company and subsidiaries herein after will be referred as "the Group".

1.c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

1.c. The Public Offering of the Company's Securities

Saham

Shares

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan surat keputusan No. S-14012/BL/2012.

On December 10, 2012, the Company's obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through decree No. S-14012/BL/2012.

Pada tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan surat No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012 Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui penawaran efek Perusahaan di BEI kepada masyarakat atas 3.082.315.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 380 per saham.

On December 17, 2012, according to letter No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012, Indonesian Stock Exchange (IDX) agreed to the public offering of the Company on IDX for 3,082,315,000 of common stock with the par value Rp 100 per share and the offering price Rp 380 per share.

Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat sebesar 6,25% atau sebanyak 192.644.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan kepada karyawan Perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (*Employee Stock Allocation/ ESA*).

From the number of shares offered in the public offering of 6.25% or 192,644,000 of new ordinary shares is allocated to the employees through the allocation shares program of the Company (*Employee Stock Allocation/ ESA*).

Pada tanggal 19 Desember 2012, seluruh saham Perusahaan sebanyak 9.632.236.000 saham telah tercatat pada BEI. Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) berdasarkan surat keputusan No. S-238/D.04/2015.

On December 19, 2012, a total of 9,632,236,000 shares of the Company were listed on the IDX. On the date June 10, 2015, the Company obtained an effective statement from The Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) of the Registration Statement in the Limited Public Offering I (LPO I) through the decision letter No. S-238/D.04/2015.

Pada tanggal 7 Juli 2015, seluruh saham Perusahaan melalui PUT I sebanyak 3.653.498.200 saham telah tercatat pada BEI, sehingga jumlah keseluruhan saham Perusahaan setelah PUT I menjadi sebesar 13.567.473.560 saham.

On July 7, 2015, all the Company's shares through the LPO I amounted to 3,653,498,200 shares that have been listed in the IDX, bringing the number of shares of the Company after the LPO I amounted to 13,567,473,560 shares.

Obligasi

Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount Rp	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date	Status
1	Berkelanjutan I Tahap II Seri B/ Shelf I Phase II Tranche B	1.150.000.000.000	5	16 Oktober/ October 16, 2015	16 Oktober/ October 16, 2020	Belum Lunas/ Outstanding
2	Berkelanjutan II Tahap II/ Shelf II Phase II	900.000.000.000	5	28 September/ September 28, 2016	28 September/ September 28, 2021	Belum Lunas/ Outstanding
3	Berkelanjutan II Tahap III Seri A/ Shelf II Phase III Tranche A	747.000.000.000	3	21 Februari/ February 21, 2017	21 Februari/ February 21, 2020	Belum Lunas/ Outstanding
4	Berkelanjutan II Tahap III Seri B/ Shelf II Phase III Tranche B	910.000.000.000	5	21 Februari/ February 21, 2017	21 Februari/ February 21, 2022	Belum Lunas/ Outstanding
5	Berkelanjutan III Tahap I Seri A/ Shelf III Phase I Tranche A	1.369.000.000.000	3	6 Oktober/ October 6, 2017	06 Oktober/ October 6, 2020	Belum Lunas/ Outstanding
6	Berkelanjutan III Tahap I Seri B/ Shelf III Phase I Tranche B	1.631.000.000.000	5	6 Oktober/ October 6, 2017	06 Oktober/ October 6, 2022	Belum Lunas/ Outstanding
7	Berkelanjutan III Tahap II Seri A/ Shelf III Phase II Tranche A	1.175.000.000.000	3	23 Februari/ February 23, 2018	23 Februari/ February 23, 2021	Belum Lunas/ Outstanding
8	Berkelanjutan III Tahap II Seri B/ Shelf III Phase II Tranche B	2.276.500.000.000	5	23 Februari/ February 23, 2018	23 Februari/ February 23, 2023	Belum Lunas/ Outstanding
9	Berkelanjutan III Tahap III Seri A/ Shelf III Phase III Tranche A	761.000.000.000	3	28 September/ September 28, 2018	28 September/ September 28, 2021	Belum Lunas/ Outstanding
10	Berkelanjutan III Tahap III Seri B/ Shelf III Phase III Tranche B	941.750.000.000	5	28 September/ September 28, 2018	28 September/ September 28, 2023	Belum Lunas/ Outstanding
11	Berkelanjutan III Tahap IV Seri A/ Shelf III Phase IV Tranche A	484.000.000.000	3	16 Mei/ May 16, 2019	16 Mei/ May 16, 2022	Belum Lunas/ Outstanding
12	Berkelanjutan III Tahap IV Seri B/ Shelf III Phase IV Tranche B	1.361.750.000.000	5	16 Mei/ May 16, 2019	16 Mei/ May 16, 2024	Belum Lunas/ Outstanding

WBP telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount Rp	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date	Status
1	Berkelanjutan I Tahap I/ Shelf I Phase I Tranche	500.000.000.000	3	5 Juli/ July 5, 2019	5 Juli/ July 5, 2022	Belum Lunas/ Outstanding
2	Berkelanjutan I Tahap II/ Shelf I Phase II Tranche	1.500.000.000.000	3	30 Oktober/ October 30, 2019	30 Oktober/ October 30, 2022	Belum Lunas/ Outstanding

1.d. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi EPC, perancangan dan pembangunan, layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen gedung, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik,

Bonds

The Company has issued bonds with the following details are as follows:

WBP has issued bonds with the following details are as follows:

1.d. The Scope of Business

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objectives of the Company are to doing business in construction industry, manufacturing industry, leasing service, agency services, investment, agro industry, integrated work (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*), trade, area management, construction improvement services, information technology and tourism as well as optimizing the utilization of resources owned by the Company to produce high quality and strong competitive goods and/or services to gain/pursue profit to increase the Company's value by applying the principles of Limited Liability Company.

In order to achieve the objectives, the Company engaged in the following activities Construction execution work, mining services, integrated EPC, design and build, management consultant service, building management, building components and raw material fabrication, component and construction tools fabrication, metals, woods, rubber, and plastic fabrication, agency services for raw materials, building

penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar serta industri, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor-impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, pengembangan sistem layanan jasa konsultasi (konsultan manajemen), layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan dan pengembangan *property* dan *realty*.

Kegiatan usaha Perusahaan yang saat ini telah dijalankan Perusahaan adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi EPC.

components and construction equipment, investment and/or business management in area of basic facility and infrastructure and industry, performing activities in agro industry field, export-import, general trading, area management, system development consulting services (management consultant), service in information technology and tourism and property and realty development.

The Company's current business activities are construction activities and integrated EPC.

1.e. Organisasi

Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan tanggal 9 Mei 2019, menetapkan 7 (tujuh) anggota direksi Perusahaan yaitu seorang direktur utama dan 6 (enam) direktur.

Wilayah kerja sesuai Surat Keputusan Direksi No. 03/SK/WK/2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Unit bisnis memiliki 5 (lima) divisi, sebagai berikut:

1.e. Organization

Organization Structure

According to the Decree of State Ministry of State Owned Enterprise (SOE) in General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company dated May 9, 2019, appointed 7 (seven) directors of the Company consisting of a president director and 6 (six) directors.

Work areas according to the Decision Letter of Director No. 03/SK/WK/2019 concerning Changes in the Organizational Structure of the Company. The business unit have 5 (five) divisions, as follows:

Unit Bisnis/ Business Unit	Wilayah Operasi/ Work Areas	Kedudukan/ Location
Divisi Gedung/ <i>Building Division</i>	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia dan luar negeri (kecuali Timor Leste) berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek gedung, bandara, jalan kereta api dan LRT, serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar. <i>Operational area covers the whole area of Indonesia and abroad (except Timor Leste), domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for the entire building project for the works of buildings, airports, railways and LRT projects, as well as investment projects and selected development established by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i>	Jakarta
Divisi Infrastruktur I/ <i>Infrastructure I Division</i>	Daerah operasional meliputi Pulau Sumatera berkedudukan di Medan dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil seperti bendungan besar, jembatan bentang panjang, jalan termasuk jalan tol serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar. <i>Operational area covers the Sumatera Island, domiciled in Medan to perform its activities in marketing to production for civil infrastructure projects such as large dams, long spans bridges, roads including toll roads, as well as selected investment and development projects set by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i>	Medan

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Unit Bisnis/ Business Unit	Wilayah Operasi/ Work Areas	Kedudukan/ Location
Divisi Infrastruktur II/ <i>Infrastructure II Division</i>	<p>Daerah operasional meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil seperti bendungan besar, jembatan bentang panjang, jalan termasuk jalan tol serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar.</p> <p><i>Operational area covers the Banten, DKI Jakarta, West Java, DI Yogyakarta, Central Java, West Kalimantan, and Central Kalimantan, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for civil infrastructure projects such as large dams, long spans bridges, roads including toll roads, as well as selected investment and development projects set by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i></p>	Jakarta
Divisi Infrastruktur III/ <i>Infrastructure III Division</i>	<p>Daerah operasional meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta Timor Leste, berkedudukan di Surabaya dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil seperti bendungan besar, jembatan bentang panjang, jalan termasuk jalan tol serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar.</p> <p><i>Operational area covers the East Java, Bali, NTB, NTT, East Kalimantan, North Kalimantan, South Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua as well as Timor Leste, domiciled in Surabaya to perform its activities in marketing to production for civil infrastructure projects such as large dams, long spans bridges, roads including toll roads, as well as selected investment and development projects set by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i></p>	Surabaya
Divisi EPC/ <i>EPC Division</i>	<p>Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek EPC dan proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak ada batasan nilai kontrak.</p> <p><i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for EPC projects and development projects chosen by Directors, with no contract restriction.</i></p>	Jakarta

1.f. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi tahun 2019 ditetapkan berdasarkan akta notaris No. 44 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0269715 tanggal 21 Mei 2019.

Susunan Komisaris dan Direksi tahun 2018 ditetapkan berdasarkan akta keputusan RUPS No. 42 tanggal 12 April 2018 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0154671 tanggal 19 April 2018.

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1.f. The Composition of Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of Commissioners and Directors for the year 2019 were based on notarial deed No. 44 dated May 15, 2019 by notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0269715 dated May 21, 2019.

The composition of Commissioners and Directors for the year 2018 were approved based on decisions deed of GMS No. 42 dated April 12, 2018 of notary Fathiah Helmi, S.H., authorized by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0154671 dated April 19, 2018.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors for the year 2019 and 2018 are as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019	2018	
Komisaris Utama	Badrodin Haiti	Badrodin Haiti	<i>President Commissioner</i>
Komisaris Independen	M. Aqil Irham Viktor S. Sirait Muradi	M. Aqil Irham Viktor S. Sirait Muradi	<i>Independent Commissioners</i>
Komisaris	Danis H. Sumadilaga Robert Leonard Marbun R Agus Sartono	Danis H. Sumadilaga Arif Baharudin R Agus Sartono	<i>Commissioners</i>

	2019	2018	
Direktur Utama	I Gusti Ngurah Putra	I Gusti Ngurah Putra	<i>President Director</i>
Direktur Independen	Hadjar Seti Adji	Hadjar Seti Adji Wahyu Utama Putra	<i>Independent Director</i>
Direktur	Didit Oemar Prihadi Bambang Rianto Fery Hendriyanto Haris Gunawan Gunadi	Didit Oemar Prihadi Bambang Rianto Fery Hendriyanto Haris Gunawan	<i>Directors</i>

Komite Audit diangkat melalui surat keputusan komisaris No. 02/SK/WK/DK/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

The Audit Committee was appointed by the decision letter of commissioner No. 02/SK/WK/DK/2018 dated October 2, 2018.

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee for the year 2019 and 2018 are as follows:

	2019 dan/and 2018	
Ketua	Viktor S. Sirait	<i>Head</i>
Anggota	R. Agus Sartono Suyanto Ihda Muktiyanto	<i>Members</i>

Komite Risiko dan Asuransi diangkat melalui surat keputusan komisaris No. 12/SK/WK/DK/2015 tanggal 30 September 2015 mengenai penggantian anggota Komite Risiko dan Asuransi.

The Risk and Insurance Committee was appointed by the decision letter of commissioner No. 12/SK/WK/DK/2015 of September 30, 2015 regarding the replacement of Risk and Insurance's Committee members.

Susunan Komite Risiko dan Asuransi Perusahaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Risk and Insurance Committee for the year 2019 and 2018 are as follows:

	2019 dan/and 2018	
Ketua	M. Aqil Irham	<i>Head</i>
Anggota	Danis H. Sumadilaga Ahmad Syarif Munawi Zulfan Zahar	<i>Members</i>

Internal Audit Perusahaan diangkat melalui surat keputusan direksi No. 42/SK/WK/PEN/2018 tanggal 26 Juni 2018 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis.

The Company's Internal Audit was appointed by the decision letter of director No. 42/SK/WK/PEN/2018 of June 26, 2018 regarding the Dismissal and Appointment of Structural Officials of Work Unit and Business Unit.

Senior Vice President Internal Audit dan Corporate Secretary pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Company's Senior Vice President Internal Audit and Corporate Secretary for the year 2019 and 2018 are as follows:

	2019 dan/and 2018	
Senior Vice President Internal Audit	Pius Sutrisno Riyanto	<i>Senior Vice President Internal Audit</i>
Corporate Secretary	Shastia Hadiarti	<i>Corporate Secretary</i>

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 31.821.502.383 dan Rp 27.831.685.783.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 65.350.676.708 dan Rp 58.563.197.550.

Grup memiliki karyawan tetap (tidak diaudit) masing-masing sebesar 2.390 dan 2.420 orang pada tahun 2019 dan 2018.

The total remuneration received by the Board of Commissioners for the year 2019 and 2018 were amounted to Rp 31,821,502,383 and Rp 27,831,685,783, respectively.

The total remuneration received by the Directors for the year 2019 and 2018 were amounted to Rp 65,350,676,708 and Rp 58,563,197,550, respectively.

The Group has an average number of 2,390 and 2,420 employees (unaudited) for the year 2019 and 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun aset tetap yang telah dinilai kembali (revaluasi) di tahun 2000, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya atau dicatat menggunakan metode ekuitas, persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan konsolidasian dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance to Indonesian Financial Accounting Standards and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The basic measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the historical cost method, except for the revaluation of fixed assets in year 2000, investments in shares of stock which are carried at its fair value or accounted for under the equity method, and inventories which are carried at the lower of cost and net realizable value. The consolidated financial statements are prepared based on going concern using the accrual method, except for the consolidated statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the consolidated financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal kehilangan pengendalian.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights where the Group has the practical ability to execute (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that loses control.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities of the group are fully eliminated.

The Group attributes the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusts the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

<p>Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:</p> <p>(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk <i>goodwill</i>) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;</p> <p>(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);</p> <p>(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;</p> <p>(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;</p> <p>(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan</p> <p>(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.</p> <p>d. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Intrepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)</p> <p>i. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan</p> <p>Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka; • ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan; • PSAK 22 (Penyesuaian 2018), Kombinasi Bisnis; • PSAK 26 (Penyesuaian 2018), "Biaya Pinjaman"; • PSAK 46 (Penyesuaian 2018), "Pajak Penghasilan"; • PSAK 66 (Penyesuaian 2018), Pengaturan Bersama ; 	<p><i>If the Group loses control, the Group:</i></p> <p>(a) <i>Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;</i></p> <p>(b) <i>Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);</i></p> <p>(c) <i>Recognizes the fair value of the consideration received, (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;</i></p> <p>(d) <i>Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;</i></p> <p>(e) <i>Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and</i></p> <p>(f) <i>Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.</i></p> <p>d. Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)</p> <p>i. Amendments/ improvements and Interpretations to standards effective in the current year</p> <p><i>New standard and amandement to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ISAK 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;</i> • <i>ISAK 34, Uncertainty Over Income Tax Treatments;</i> • <i>PSAK 22 (Improvement 2018), Business Combination;</i> • <i>PSAK 26 (Improvement 2018), "Borrowing Cost";</i> • <i>PSAK 46 (Improvement 2018), "Income Taxes";</i> • <i>PSAK 66 (Improvement 2018), Joint Arrangement;</i>
--	--

- PSAK 24 (Amandemen 2018), Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

ii. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen 2017), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen 2017), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen 2018), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73, Sewa;
- ISAK 35, Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amandemen 2019), Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019), Penyajian Laporan Keuangan;
- PPSAK 13, Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

- *PSAK 24 (Amendment 2018), Employee benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement.*

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

ii. Standards and interpretations issued not yet adopted

Standards and standard amendments are effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- *PSAK 15 (Amendment 2017), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;*
- *PSAK 62 (Amendment 2017), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: insurance Contracts;*
- *PSAK 71, Financial Instruments;*
- *PSAK 71 (Amendment 2018), Financial Instruments: on Prepayment Features with Negative Compensation;*
- *PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers;*
- *PSAK 73, Leases;*
- *ISAK 35, Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;*
- *PSAK 1 (Amendments 2019), Presentation of Financial Statements concerning the Title of Financial Statements;*
- *PSAK 1 (Annual Adjustment 2019), Presentation of Financial Statements;*
- *PPSAK 13, Revocation of SFAS 45: Nonprofit Entity Financial Reporting;*
- *PSAK 25 (Amendment 2019) "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";*
- *PSAK 102 (Revised 2019): "Accounting for Murabahah";*
- *ISAK 101: "Revenue Recognition or Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership";*
- *ISAK 102: "Impairment on Murabahah Receivable".*

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada saat laporan keuangan konsolidasian.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations of standards to the consolidated financial statements.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

e. Foreign Currency Transactions and Translation of Financial Statements

Dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah (Rp).

In preparing consolidated financial statements, the Group record by using the currency of the primary economic environment where the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah (Rp).

Mata uang fungsional Kantor cabang di Dubai, Malaysia dan Timor Leste, adalah Arab Emirat Dirham (AED), Saudi Arab Real (SAR), Ringgit (MYR) dan Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Kantor cabang di Dubai dan Timor Leste, pada tanggal laporan dijabarkan ke Rupiah (Rp) menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Untuk tujuan penggabungan, laporan keuangan kantor cabang luar negeri dijabarkan dalam Rp dengan kurs Reuters, sedangkan kantor cabang Malaysia dan Timor Leste menggunakan mata uang Ringgit dan Dolar Amerika Serikat (USD) dengan kurs Bank Indonesia (BI). Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

The functional currency of branch office in Dubai, Malaysia and Timor Leste are Arab Emirat Dirham (AED), Saudi Arab Real (SAR), Ringgit (MYR) and United States Dollar (USD). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of branches in Dubai and Timor Leste at reporting date are translated to Rupiah (Rp) at the closing rate at statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using average rate for the period. For combining purposes, the financial statements of the branch office are translated into Rp based on Reuters Rate, while Malaysia and Timor Leste Branch maintained in Ringgit and United Stated Dollar (USD) using Bank Indonesia (BI) rate. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rp menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah BI pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

In preparing the financial statements of each individual group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e middle rate of BI at December 31, 2019 and 2018 as follows:

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	Rp		Rp	
Dolar Amerika Serikat (USD)	13.901		14.481	U.S Dollar (USD)
Dolar Singapura (SGD)	10.321		10.603	Singapore Dollar (SGD)
Euro Eropa (EUR)	15.589		16.560	European Euro (EUR)
Ringgit Malaysia (MYR)	3.397		3.493	Malaysian Ringgit (MYR)
Riyal Arab Saudi (SAR)	3.706		3.859	Saudi Arabian Riyal (SAR)
Yen Jepang (JPY)	128		131	Japananese Yen (JPY)

Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- *Exchange differences on foreign currency borrowings relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.*
- *Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.*
- *Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.*

f. Related Party Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 54).

g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung

- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organized the plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity that is controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements (Note 54).

g. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes financial assets or financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability is not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition

dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- (a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman; atau
- (c) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual.

or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as to be measured at fair value through profit or loss.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred mainly for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of an actual recent pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) Those that intend to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as fair value through profit or loss;
- (b) Those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of decrease in loan quality; or
- (c) Those that upon initial recognition designated as available for sale.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

Pada tahun 2019 dan 2018, Grup mempunyai kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, piutang lain-lain, tagihan bruto dan aset keuangan atas proyek konsesi kepada pengguna jasa yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

For the year 2019 and 2018, the Group has cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables, other receivables, gross amount due from customers and financial assets from concession project which were classified as loans and receivables.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 15).

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method (Note 15).

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets is unrecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pada tahun 2019 dan 2018, Grup tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi saham diukur dengan metode biaya.

For the year 2019 and 2018, the Group has no financial assets classified as stock investments are measured using the cost method.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, utang bruto subkontraktor, utang bank, utang lembaga keuangan non-bank, biaya jangka panjang yang masih harus dibayar dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred mainly for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of an actual recent pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include accounts payables, gross amount due to third parties, bank loan, loan to financial institution non-bank, accrued expenses and other payables – long term are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as an asset or for right liabilities and obligations created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of

tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- (d) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset

ownership of the financial asset and still retains control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) *Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) *A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) *It is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- (d) *The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.*

For investment in equity instrument, a significant or prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's

tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, minus any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, buy option or other similar options, but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties under the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Netting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to net off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).*
- (ii) *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2).*
- (iii) *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable

yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijamin, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan setelah tanggal penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek. Deposito berjangka disajikan berdasarkan nilai nominal.

j. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

k. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

data as much as possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses evaluation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Short-Term Investment

Time deposits with maturity less than three months on the date of placement and pledged as collateral, or restricted and time deposits with maturity of more than three months on the date of placement is presented as short-term investment. The time deposits are presented using par value.

j. Retention Receivables

Retention receivable represents the Group's receivable to the owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain conditions in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deductions are applied in every account receivable's claim which is retained by the owner of the project up to certain condition after completion of the contract has been met.

k. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, minus the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

I. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terdiri dari seluruh biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan tanah kavling untuk usaha sarana perumahan dinilai dengan menggunakan harga beli ditambah dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan tanah tersebut siap dijual (bersertifikat).

Persediaan material dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih dan persediaan *precast* pun menggunakan metode yang sama.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

n. Aset Tetap

Aset tetap dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan metode saldo menurun ganda dan garis lurus (untuk gedung dan bangunan), kecuali di tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP/Entitas Anak) menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan Keputusan Direksi WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset tetap kelompok selain bangunan WBP, disebutkan berdasarkan telaah terhadap aset tetap produksi WBP, terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset produksi, sehingga di tahun 2019 Perusahaan menetapkan perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset produksi semula *double declining*

I. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are in costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.

m. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using first-in first-out method (FIFO). Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business minus the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Inventory of plots of land for housing facilities business are assessed using the acquisition cost plus other expenditures incurred to make the land ready for sale (with certificate).

Material inventories are stated at the lower of the cost or net realizable value and even precast inventories are using the same method.

Allowance for the decrease in inventory value is formed based on the physical check of inventory at the end of the period.

n. Fixed Assets

Fixed assets are accounted for using cost model and is stated based on acquisition cost minus the accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Fixed assets, except for land, are depreciated using the double-declining and straight-line method (for plants and buildings), except in 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP/Subsidiary Entity) using straight-line method.

Based on Directors Decree of WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 dated July 26, 2019 regarding changes in accounting estimates for the depreciation method of fixed assets other than buildings WBP, mentioned based on a review of the fixed assets productions of WBP, there is a significant change in the estimated usage time of future economic benefits of production, in 2019 the Company set changes in accounting estimates for the depreciation method of

menjadi metode garis lurus (*straight line method*).

productions assets from the double declining method into a straight line method.

Aset tetap tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan.

Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and buildings is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in this case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if there is any.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus land and buildings that has been presented in equity is transferred directly to retained earnings when the asset is derecognized.

Jika aset revaluasi tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan, aset tersebut direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

If there is no significant changes in fair value of assets revaluation, those assets will be revalued every 3 (three) years.

Aset tetap tanah tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap gedung disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut, sebagai berikut:

Fixed asset lands are not depreciated. While building assets are depreciated using the straight-line method based on their estimated useful lives, as follows:

	<u>Masa Manfaat/ Useful Life</u>	
Gedung dan Pabrik	20 Tahun/ Years	<i>Buildings and Plants</i>

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan akumulasi penurunan nilai jika ada, dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets except for land and buildings are accounted for using cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if there is any, and depreciated using the double - declining method based on the estimated usefull life of the fixed assets as follows:

	<u>Masa Manfaat/ Useful Life</u>	
Kendaraan	8 Tahun/ Years	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan Kantor	2 - 8 Tahun/ Years	<i>Office Supplies</i>
Peralatan Proyek	4 - 16 Tahun/ Years	<i>Project Equipment</i>

Grup melakukan perubahan kebijakan akuntansi aset tetap untuk kelompok tanah dan bangunan pada tahun 2015, semula dicatat berdasarkan

The Group changed its accounting policy on fixed assets classified as land and buildings in 2015, which previously accounted for using

metode harga perolehan, menjadi metode revaluasi, yang dihitung oleh penilai independen (KJPP). Perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan konsolidasian dapat menggambarkan investasi Grup dalam aset tetap kelompok tanah dan bangunan dan perubahan dalam investasi tersebut sesuai dengan nilai pasar pada periode laporan keuangan konsolidasian (Catatan 16).

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya biaya - biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Semua pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode/ tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Apabila suatu aset tetap tidak dipergunakan lagi atau dilepas, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laba rugi tahun berjalan.

Pada akhir periode/ tahun buku pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan spesifikasi teknis.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, dan akan dipindahkan ke aset tetap pada saat sudah selesai pembangunannya dan siap digunakan.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan

the cost method, to revaluation model, which is then appraised by an independent appraiser (KJPP). The changes in the accounting policies was made for the purpose to represent the Group's investment on land and buildings in the consolidated financial statements in accordance with their market value at the consolidated financial reporting period (Note 16).

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred, while the significant expenditures for renewals and improvements are capitalized. All expenditures subsequent to the purchasing of fixed assets would be added (capitalized) on the carrying amount of the assets.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any profit or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss for the period/ year when the assets are derecognized.

When assets are not used or otherwise disposed of, the carrying costs and related accumulated depreciation are removed from the fixed assets account and any resulting gain or loss is recorded or charged to profit or loss for the year.

At the end of reporting period/ year end, the Group periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.

Construction in progress is stated at cost and will be reclassified to the respective fixed assets when completed and ready to use.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will

properti investasi dapat diukur dengan andal.

flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Group chooses to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent appraiser who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

The transfer to investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

The transfer from investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sell.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

p. Aset Lain-lain

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset tidak berwujud disajikan dalam aset lain-lain.

p. Other Assets

Accounts that cannot be classified into current assets, investment, or intangible assets are presented as other assets.

Beban tangguhan berupa hak atas tanah dicatat sebesar biaya perolehan hak atau biaya pembaharuan hak. Semua beban tangguhan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, yang mana yang lebih pendek.

Deferred expense such as land right is recorded at cost of acquisition or cost of renewal right. All deferred expense of right is amortized over useful life or economic life of land, whichever is shorter.

q. Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset tak berwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/ BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/ BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain

q. Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of rights and liabilities related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which will be amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) with no considerations.

Concession assets granted to the Group are transferrable with approval from the Government/ BPJT. These concession right assets will be transferred to the Government/ BPJT at the end of the concession period and, at that time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognized from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road

atau Pemerintah/ BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

is transferred to another party or the Government/BPJT changes the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from the discontinuance or disposal of concession assets is recognized in the statement of profit or loss and other consolidated comprehensive income.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenues in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Construction contract comprises all the amounts of toll road construction costs or toll road capacity improvement consisting of land acquisition cost, feasibility study cost and other costs that are directly attributable to the toll road construction, including construction costs for access roads, alternative roads and required public road facilities, interest and other borrowing costs, either directly or indirectly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction is completed and the concession assets are ready to be operated.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya. Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of the public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance to the contract. Construction cost is the value of acquisition of a construction contract.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Interests and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

Aset jalan tol terdiri dari jalan dan jembatan, gerbang dan bangunan pelengkap jalan tol dan sarana pelengkap jalan tol dicatat sebagai aset hak perusahaan jalan tol yang dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Amortisasi aset jalan dan jembatan dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi (jumlah lalu lintas kendaraan kendaraan) selama masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi). Sedangkan aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan diamortisasi selama periode yang lebih pendek antara masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi) dan umur manfaat aset.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian

Provision for Toll Road Overlay

In operating toll roads, the Group is obligated to maintain quality in accordance with the SPM (Minimum Service Standards) established by the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, i.e., by performing toll road overlay regularly. The cost of this overlay is periodically provided based on estimated utilization of toll road by customers. The estimated net provision for toll road overlay is discounted to its present value that reflects management estimates against cost incurred to settle current provision.

Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.

Toll road assets consisting of roads and bridges, gates and complementary building toll roads and toll supplementary facilities are recorded as toll road concession rights which are stated at fair value at the revaluation date less accumulated depreciation and accumulated impairment losses that occur after the date of revaluation.

Amortization of asset roads and bridges were calculated using the unit of production (the amount of vehicle traffic vehicles) during the period of the concession (concession period). While the toll road concession rights assets other than roads and bridges are amortized over the shorter period between the period of concession (concession period) and the useful life of the asset.

Intangible assets are derecognized when removed or when there are no further future economic benefits are expected from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset is

pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Pada tanggal 25 Januari 2010, 20 Juni 2016, 9 Desember 2017, 19 Desember 2018, dan 1 Pebruari 2019, Ruas Kanci - Pejagan, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Ruas Pejagan-Pemalang, Ruas Bekasi Cawang Kampung Melayu Seksi 1, Ruas Simpang Susun Pemalang Batang, dan Ruas Ciawi Cigombong Seksi 1, telah beroperasi secara komersial. Amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol dihitung sampai berakhirnya hak konsesi jalan tol hingga 28 Mei 2041.

r. Penurunan Aset Non-Keuangan Kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup akan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus ditentukan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pemulihan rugi penurunan nilai aset yang telah diakui periode sebelumnya dicatat jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tersebut sudah tidak ada lagi atau menurun. Pemulihan rugi penurunan nilai aset diakui dalam laba rugi. Namun demikian, kenaikan nilai tercatat aset karena pemulihan rugi penurunan nilai hanya diakui sepanjang tidak melebihi nilai tercatat yang ditentukan (setelah dikurangi penyusutan dan amortisasi) jika rugi penurunan nilai aset tidak diakui pada tahun sebelumnya.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 2g; penurunan nilai untuk *goodwill* dijelaskan dalam Catatan 2q.

s. Aset Keuangan dari Perjanjian Jasa Konsesi

WSE menerapkan ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" atas Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

determined as the difference between the net disposal proceeds (if any) and the carrying amount of assets. Gains or losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized. Gains are recognized as other income.

On January 25, 2010, June 20, 2016, December 9, 2017, December 19, 2018, and February 1, 2019, segment Kanci - Pejagan, West Java and Central Java, segment Pejagan-Pemalang, segment Bekasi Cawang Kampung Melayu Section 1, segment Simpang Susun Pemalang Batang, and segment Ciawi Cigombong Section 1, has been in commercial operation. Amortization of Toll Road Concession Rights are calculated until the end of the toll road concession rights up to May 28, 2041.

r. Impairment of Non-Financial Assets Except Goodwill

At the end of the reporting period, the Group will assess whether there is an indication of assets impairment. If such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the higher amount between the fair value less costs to sell and value in use. If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of an asset should be determined by the recoverable amount. Impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Recovery of impairment losses of assets which has been recognized in prior periods are recorded when there is indication of impairment of the asset no longer exists or decreases. Recovery of impairment losses of assets are recognized in the profit or loss. However, the increase in the carrying value of assets due to the recovery of an impairment loss is recognized only if it does not exceed the carrying amount that would have been determined (after deducting depreciation and amortization) if no impairment losses of assets recognized in prior years.

The accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 2g; while impairment for goodwill is discussed in Note 2q.

s. Financial Asset from Service Concession Arrangements

WSE applies ISAK 16 "Service Concession Arrangements" on its Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lainnya (pemberi konsesi) memberikan kontrak untuk penyediaan layanan publik ke entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut sebagai perjanjian 'publik-ke-swasta'.

Dalam perjanjian ini, operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan jasa publik dan mengoperasikan serta mengelola infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar untuk jasa yang dibayarkan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa kasus, operator dapat meningkatkan infrastruktur yang ada.

Beberapa ciri umum dari perjanjian konsesi jasa meliputi:

- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas layanan tersebut.
- Operator bertanggung jawab setidaknya atas sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas kepentingan pemberi konsesi.
- Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.
- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya mendanai infrastruktur.

Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) yang diungkapkan pada Catatan 57 antara PLN dan WSE memenuhi definisi sebagai perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi konsesi dan WSE bertindak sebagai operator. WSE setuju untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik tenaga mini hidro ("infrastruktur") dan menjual kepada PLN energi yang dihasilkan darinya dengan syarat dan kondisi sebagaimana disepakati dalam PPA. Infrastruktur digunakan untuk seluruh masa manfaatnya untuk tujuan pengaturan layanan konsesi.

Dalam ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan hak dan kewajiban terkait dengan konsesi jasa, WSE tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap namun mengakui sebagai aset

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or another body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services to a private sector entity (the "operator"). This is often referred to as a 'public-to-private' arrangement.

In this type of arrangement, an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Some common features of service concession arrangements include:

- *The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.*
- *The operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.*
- *The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.*
- *The operator is obligated to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.*

The Power Purchase Agreement (PPA) disclosed in Note 57 between PLN and WSE meets the definition of a service concession arrangement, where PLN acts as a grantor and WSE acts as the operator. WSE agrees to design, finance, construct, own and operate a mini hydro power generating facility (the "infrastructure") and sell to PLN the power generated therefrom on terms and conditions as agreed in the PPA. The infrastructure is used for its entire useful life for the purpose of the service concession arrangement.

Under ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession, WSE does not recognize

keuangan, karena WSE memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas dari PLN melalui pembayaran kapasitas berdasarkan PPA. Aset keuangan dicatat sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang" sesuai dengan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

the infrastructure as property and equipment but recognizes it as a financial asset, as WSE has an unconditional right to receive cash from PLN through the capacity payments under the PPA. The financial asset is accounted as a "loans and receivables" in accordance to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession agreement.

WSE tidak mengakui penjualan kapasitas listrik, namun mengakui pendapatan keuangan (melalui aset keuangan). WSE menghitung pendapatan yang terkait dengan jasa operasi sesuai dengan PSAK 23, "Pendapatan". WSE mencatat kewajiban kontraktual untuk memelihara atau mengembalikan infrastruktur di lokasi operasi sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi.

WSE does not recognize the sale of electrical capacity, but recognizes financial revenue (through the financial asset). WSE accounts for revenue relating to operation services in accordance with PSAK 23, "Revenue". WSE accounts for the contractual obligations to maintain or restore the infrastructure in the plant operations in accordance to PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

t. Utang Bruto kepada Subkontraktor

t. Gross Amount Due to Subcontractors

Utang bruto kepada subkontraktor diakui atas dasar akrual yang merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberitaacitakan, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada subkontraktor disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi kerugian yang diakui.

Gross amount due to subcontractors is recognised on accrual basis which represents the uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract. Gross amount due to subcontractor is presented as the differences between costs occurred added by income or deducted by realized loss.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

u. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian), yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan eksternal.

Contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognized as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method), which is measured based on the physical progress at the end of reporting period, which is stated on the minutes of external progress of completed works.

Jika kemungkinan besar terjadi total beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

If it is most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognized immediately as an expense.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprises of the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable to produce revenue and can be reliably measured.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Contract cost comprises costs that is related directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract and such other costs specifically can be billed to the customer under the terms of the contract.

Pendapatan dari usaha sarana papan (properti) diakui dengan metode presentase penyelesaian, yang dinyatakan dalam PSAK 44 (Revisi 2010) "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat", yang apabila syarat berikut terpenuhi:

Revenue from sales of housing is recognized by the percentage of completion, as stated in PSAK 44 (Revised 2010) "Accounting for Real Estate Development Activities", if the following criterias are met:

- I. proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu pondasi bangunan telah selesai terpenuhi;
- II. jumlah pembayaran oleh pelanggan telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pelanggan; dan
- III. jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

- I. the construction process has surpassed the initial phase, which is, the foundation of the building has been completed;*
- II. total payments of the buyer equal or exceed 20% of the agreed sales price and no refund could be made by the buyer; and*
- III. total revenues and costs can be reasonably estimated.*

Metode yang digunakan untuk menentukan persentase penyelesaian adalah berdasarkan biaya aktual yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan estimasi jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan proyek real estat tersebut.

The method used to determine the percentage of completion is the proportion of actual costs incurred to the estimated total development cost of the real estate project.

Apabila persyaratan tersebut diatas tidak dapat dipenuhi, maka semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan dipenuhi.

If any of the above conditions are not met, all payment received from buyers are recognized as unearned revenue using the deposit method, until all conditions are met.

Unsur-unsur biaya yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat antara lain meliputi biaya pra-perolehan tanah, biaya perolehan tanah dan biaya lain-lain yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat. Biaya yang tidak berhubungan dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum dan administrasi, diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

This element of costs, which are capitalized to real estate development projects, include the preacquisition cost of land, cost of land acquisition and other costs attributable to the development activity of real estate. Costs, which are not related to real estate project, such as general and administrative expenses, are recognized as profit or loss as incurred.

Pendapatan Tol

Toll Revenues

Pendapatan Grup dari hasil pengoperasian jalan tol diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa kuasa penyelenggaraan dicatat sebagai angsuran liabilitas kerjasama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran ini dengan angsuran liabilitas kerjasama operasi dicatat sebagai beban atau penghasilan kerjasama operasi.

The Group's revenues from toll road operations are recognized upon the sale of toll tickets. Revenue from profit sharing arrangement between the Group and investor with operating rights are recognized when toll tickets are sold, net of investor's share. Payments to investors without operating rights are recorded as a mandatory installment under joint operation. The differences of total payments over mandatory installment under joint operation are recorded as joint operation expense or revenue.

v. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek *pre-financing* yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

w. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar seluruh aset yang dialihkan oleh Grup pada tanggal akuisisi, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada

v. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing projects whose constructions time is required more than one year.

w. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is computed as the sum of the fair value of the assets transferred by the Group at acquisition date, liabilities recognized by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the period in which the costs are incurred and the services are rendered.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at the fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant SAK.

Components of non-controlling interests of the acquiree are measured either at fair value or according to proportional share of the equity instruments in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured at its fair

tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara tersebut, dan mengakui tambahan aset atau liabilitas, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi, yang jika diketahui, akan menyebabkan pengakuan aset dan liabilitas yang dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, Grup mengakui *goodwill* yang diukur sebagai selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali, dan jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki Grup atas pihak yang diakuisisi; dan (b) selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto pihak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan

value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if there is any, is recognized in profit or loss. If in prior periods, changes in fair value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized with the same basis as would be required had the Group disposed of the previously held equity interest directly.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the Group shall retrospectively adjust those provisional amounts and recognize additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, the Group recognizes goodwill which is measured as the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest, and in a business combination achieved in stages, the acquisition-date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree; and (b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the acquiree, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

Subsequent to initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of business combinations, regardless of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill was allocated to a Cash Generating Unit and certain operations on the Cash Generating Unit are disposed, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. The disposed goodwill is

tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan non-pengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

x. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

measured on the basis of relative values of the disposed operation and the portion of the Cash Generating Units retained.

Goodwill is initially measured at historical cost, the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interests, and any previous interest held, over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the fair value of net assets acquired is in excess of the aggregate consideration transferred, the Group reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed, and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognized at the acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the aggregate consideration transferred, then the gain is recognized in profit or loss.

When the determination of consideration from a business combination includes contingent consideration, it is measured at its fair value on acquisition date. Contingent consideration is classified either as equity or a financial liability. Amounts classified as a financial liability are subsequently remeasured to fair value with changes in fair value recognized in profit or loss when adjustments are recorded outside the measurement period. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement-period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments made against goodwill. Measurement-period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period, which cannot exceed one year from the acquisition date, about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

In a business combination that is achieved in stages, the acquirer remeasures its previously held equity interest in the acquiree at its acquisition-date fair value and recognizes gain or loss resulted, if there is any, in profit or loss.

x. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of the current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

The amount of unpaid current tax for current and prior periods is recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover the current tax of previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to all taxable temporary differences arises from:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

- a) *The initial recognition of goodwill; or*
- b) *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, does not affect neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction does not affect neither the accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax assets and liabilities shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting

tercatat aset dan liabilitasnya.

period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset if there is a high probability that sufficient taxable profit will no longer be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- a) *The Group has a legally enforceable right to offset deferred tax assets against deferred tax liabilities; and*

- b) *The deferred tax assets and liabilities are related to the income taxes levied by the same taxation authority on either:*

- i. *the same taxable entity; or*

- ii. *different taxable entities that are intended to recover current tax assets and liabilities with a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.*

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:

The Group offsets the current tax assets and current tax liabilities if, and only if:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

- a) *Has legally enforceable rights to offset the recognized amounts; and*

- b) *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

y. Liabilitas Imbalan Kerja

y. Employee Benefits Liabilities

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Short-Term Employee Benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU No. 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Grup mengikuti program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sesuai dengan UU No. 13/2003, Grup berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup menutupi kewajiban.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law No. 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value of the benefit obligation determined is by discounting the benefit.

The Group not only records for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier than the following dates:

- (a) When the Group no longer can withdraw the offer of those benefits; and
- (b) When the Group recognizes costs for a restructuring within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

The Group has a pension insurance program which is organized by PT Asuransi Jiwasraya (Persero). In accordance with the Law No. 13/2003, the Group is obligated to cover the shortage of pension payments when the pension plans is currently not sufficient to cover liabilities.

Other Long-Term Employee Benefits

Other long-term benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

z. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengaturan Bersama

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) Jika investasi menjadi entitas anak, dan
- (b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

z. Investment in Associates and Joint Arrangement

Associates

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) If the investment becomes a subsidiary, and*
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value.*

When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagian atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi proporsional tidak diizinkan.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain-lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi tidak diakui, kecuali bila Grup mempunyai

The Group classifies joint arrangement as:

1) *Joint Operation*

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- (a) Assets, including its share of any assets held jointly;*
- (b) Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- (c) Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- (d) Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- (e) Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

2) *Joint Venture*

The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method. Proportional consolidation of joint arrangements is no longer permitted.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognized in the profit or loss and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognized as a reduction in the carrying amount of the investment. When the Group's share of losses in an associate equal or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associates.

Loss exceeding the carrying value of the investment is not recognized, unless

komitmen untuk memberikan bantuan keuangan atau menjamin kewajiban entitas asosiasi.

the Group has committed to provide financial support or guarantee the associates' obligation.

Laba dan rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of the unrelated investor's interests in the associates.

Dalam akuntansi metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komperhensif lain pasca perolehan. Ketika bagian grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Under the equity method of accounting, interests in joint ventures are initially recognized at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of profits or losses and other comprehensive income post acquisition. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint ventures (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognize further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Unrealized gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated to the extent of the group's interest in the joint ventures. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

aa. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Merupakan investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% atau tidak memiliki pengaruh signifikan yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi dipasar aktif.

Selanjutnya investasi saham yang tidak memiliki kuotasi harga dipasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diukur dengan biaya perolehan.

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai, penurunan tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi komperhensif di tahun berjalan.

aa. Other Long-Term Investment

Represent a shares investment with an ownership less than 20% or does not have significant influence that are recognized initially at fair value plus transaction costs. The best evidence of fair value is the current market price quotations.

Furthermore, share investments that do not have an active market price quotations and their fair values can not be reliably measured, are measured at cost.

At each reporting date, the Company evaluates whether there is objective evidence that an investment is impaired.

If there is an objective evidence that an investment is impaired, the decline is charged to the statement of comprehensive income in the current year.

bb. Laba per Saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam satu periode.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, perhitungan laba per saham dasar dan dilusi untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara retrospektif.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebesar 13.573.902.600 lembar pada tahun 2019 dan 2018 (Catatan 47).

cc. Biaya Emisi Obligasi dan Saham

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

dd. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmen didasarkan pada aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara teratur oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

bb. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the common shareholders parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the period.

If the number of ordinary shares or potential financial instruments to be ordinary shares outstanding increases as a result of capitalisation, bonus issue or share split, or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively.

The number of weighted average shares outstanding for the calculation of basic earnings per share amounted to 13,573,902,600 for the year 2019 and 2018, respectively (Note 47).

cc. Bond and Shares Issuance Costs

Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are presented as an additional paid in capital and are not amortized. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital and not amortized.

dd. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and

- yang informasi keuangan yang terpisah miliknya tersedia.

ee. Program Opsi Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP)

Perusahaan menyediakan program opsi saham untuk karyawan yang berhak dan anggota manajemen (MESOP). Program ini terdiri dari program opsi saham bahwa setelah diselesaikan melalui penerbitan saham (pengaturan pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas) dicatat sebagai transaksi ekuitas. Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada anggota manajemen dan layanan sejenis lainnya diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian opsi.

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian opsi pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dicatat sebagai beban dengan metode garis lurus sepanjang periode *vesting*, berdasarkan estimasi instrumen ekuitas Perusahaan yang akhirnya akan diberikan, dengan peningkatan yang sesuai pada ekuitas.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengubah estimasi dari jumlah instrumen ekuitas yang diharapkan akan diberikan. Dampak dari perubahan atas estimasi awal, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai biaya kumulatif yang mencerminkan perubahan estimasi, dengan penyesuaian berdasarkan cadangan imbalan kerja yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.

ff. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup diatas, Direksi diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

- for which separate financial information is available.

ee. Management and Employee Stock Option Program (MESOP)

The Company provides stock option program to their eligible employees and members of management (MESOP). This program consists of stock option plan that upon exercise is settled through issuance of shares (equity – settled share based payment arrangement) which is accounted as equity transaction. Equity - settled share based payments to member of management and others providing similar services are measured at the fair value of the equity instruments at the grant date.

The fair value determined at the grant date of the equity - settled share based payments is expensed on a straight-line basis over the vesting period, based on the Company's estimate of equity instruments that will eventually vest, with a corresponding increase in equity.

At the end of each reporting period, the Company revises its estimate of the number of equity instruments expected to vest. The impact of the revision of the original estimates, if there is any, is recognised in statements of comprehensive income such that the cumulative expense reflects the revised estimate, with a corresponding adjustment to the equity-settled employee benefits reserve.

ff. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

In the application of the Group's accounting policies above, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan diatas, terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset tak berwujud. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol. Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol. Grup berpendapat bahwa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

WTR (entitas anak) yang memiliki hak pengusahaan jalan tol diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. WTR mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi sesuai dengan PSAK 34. Entitas anak, WTR mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi dengan menggunakan metode biaya dengan margin nol berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai wajar piutang ditentukan dengan

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies as described above, management has made any critical judgments that have significant impact on the amounts recognised in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Service Concession Arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as property and equipment, but should be recognized as a financial asset and/or an intangible asset. Indonesia Toll Road Authority (BPJT) granted the Group the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the toll roads. Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, works, toll road facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities. The Group has made judgment that the Toll Road Concession Agreement (PPJT) qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

WTR (subsidiary) who has the toll road concession is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. WTR recognizes construction revenues of concession asset and construction costs in accordance with PSAK 34. Subsidiary, WTR measures construction revenues at cost with zero margin based on management estimation calculated by a certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

Key Sources of Estimation Uncertainty

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. The fair value of accounts receivable is determined by

memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai piutang didasarkan penilaian secara individual atas piutang masing-masing debitur (pemberi kerja).

calculating the permanent impairment and the carrying value is reduced to recognize the decline. The assumptions used to determine the allowance for impairment of receivables based on an individual assessment of each receivable debtor (employer).

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Estimated Useful Lives of Property and Equipment

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang disebutkan di atas.

The useful life of each item of the Group's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of property and equipment.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Provision for Overlay

Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini pada tanggal pelaporan.

The provision for overlay is determined periodically based on the estimated utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of the management's estimate of the expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Post-Employment Benefits Obligation

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

The present value of post employment benefit liabilities depends on several factors which are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine pensions cost (benefits) covered discount rate. The changes of assumptions might affect carrying value of post-employment benefits.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir pelaporan, dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Group determines the appropriate discount rate at the final reporting, by considering the discount rate of government's bond which denominated in benefit's currency that will be paid and have a similar term with the terms of the related liabilities.

Pajak Penghasilan Final

Final Income Tax

Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation No. 40 year 2009 concerning amendments of

No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008, dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Government Regulation No. 51 year 2008 concerning income tax from the construction business that is effective starting August 1, 2008, where the final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Final income tax is presented outside of the income tax expenses in profit or loss.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

The difference between the final income tax carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Penurunan Nilai atas Goodwill

Impairment of Goodwill

Uji penurunan nilai *goodwill* wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset tak berwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Impairment testing of goodwill is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of impairment. Determining the value in use of intangible assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of Group's operations.

Penilaian Instrumen Keuangan

Valuation of Financial Instruments

Seperti dijelaskan dalam Catatan 56, Grup menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan.

As described in Note 56, the Group uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

The directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

Arus Kas Masa Depan dari Perjanjian Jasa Konsesi

Future Cash Flows from Service Concession Arrangement

WSE menilai aset keuangannya dari proyek konsesi pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen membuat penilaian mengenai metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan dari pembayaran kapasitas. Nilai tercatat aset keuangan dari proyek konsesi diungkapkan pada Catatan 20.

WSE assesses its financial asset from concession project at each reporting date. Management makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows of capacity payments. The carrying amount of financial asset from concession project is disclosed in Note 20.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

3. KAS DAN SETARA KAS

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2019 Rp	2018 Rp
Kas/ Cash on Hand	1.833.539.821	2.690.836.858
Bank/ Cash in Banks		
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.117.363.755.014	550.950.460.346
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.278.826.937.528	3.577.277.028.470
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.060.867.606.468	822.314.481.793
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.440.477.744	358.026.853.237
PT Bank BRIsyariah Tbk	6.075.498.471	13.935.029.576
Indonesia Eximbank	1.709.876.450	12.498.435.480
PT Bank Syariah Mandiri	1.541.193.831	20.121.642.345
PT Bank BNI Syariah	1.055.573.524	1.378.278.107
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.484.962.233	228.988.212.069
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.208.491.806	98.717.661.322
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	986.345.734	902.389.453
Yen Jepang/ Japanese Yen		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.555.980.848	7.741.972.406
Euro		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.956.200	9.235.372
Sub Jumlah/ Sub Total	6.574.172.655.851	5.692.861.679.976
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	107.319.559.716	3.114.737.194
PT Bank Permata Tbk	90.488.399.975	14.474.682.739
PT Bank BTPN Tbk (d/h/ formerly PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)	25.492.859.677	16.186.984.681
PT Bank DBS Indonesia	18.999.621.620	15.230.102.540
MUFG Bank, Ltd.	15.560.389.271	30.949.986.488
PT Bank Bukopin Tbk	14.729.457.627	98.604.496.404
PT Bank Central Asia Tbk	12.549.476.570	30.021.254.768
PT Bank UOB Indonesia	11.340.410.805	109.254.884.725
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah	6.558.471.259	19.455.917.821
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.585.431.564	3.276.431.256
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.830.785.707	462.452.546.281
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.843.867.068	5.149.528.068
PT Bank BNP Paribas Indonesia	3.189.160.537	125.552.896
Bank Mizuho	3.038.693.131	54.224.434
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.904.452.836	14.322.102.544
PT Bank DKI	1.826.487.519	63.566.300.741
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	1.623.747.921	1.730.054.037
PT Bank Danamon Tbk	1.528.195.957	5.000.905.945
PT Bank Mega Tbk	1.393.379.612	919.454.796
PT Bank of China	1.340.970.499	1.512.880.496
PT Bank HSBC Indonesia	825.164.067	15.163.714.399
PT Bank BCA Syariah	762.237.161	1.268.600.607
PT Bank ICBC Indonesia	669.983.466	7.112.265.845
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	516.734.049	514.002.758
PT Bank Mestika Dharma Tbk	378.848.804	3.404.351.826
PT Bank CTBC Indonesia	313.985.105	3.301.107.451
PT Bank QNB Indonesia Tbk	249.965.000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	10.709.668	5.131.241
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	--	3.632.774
Riyal Arab Saudi/ Saudi Arabian Riyal		
The National Commercial Bank - Jeddah	838.630.926	1.391.735.823
Ringgit Malaysia/ Malaysian Ringgit		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	12.328.016	232.173.987
Sub Jumlah/ Sub Total	337.722.405.133	927.799.745.565
Deposito Berjangka/ Time Deposit		
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.383.340.293.859	2.082.320.954.802
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	540.000.000.000	977.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	96.505.000.000	108.505.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.000.000.000	110.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	2.044.845.293.859	3.277.825.954.802

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	154.100.000.000	317.500.000.000
PT Bank BTPN Tbk (d/h/ formerly PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)	75.636.133.728	300.000.000.000
PT Bank DKI	35.000.000.000	--
PT Bank Mega Tbk	10.000.000.000	--
PT Bank BTPN Syariah	10.000.000.000	--
PT Bank Bukopin Tbk	10.000.000.000	70.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.000.000.000	--
PT Bank CTBC	--	57.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga	--	200.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	299.736.133.728	944.500.000.000
Jumlah/ Total	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun (%)/ Interest Rate of Time Deposits per Annum (%)	4,55% - 7,50%	3,30% - 9,50%
Jangka Waktu/ Time Period	1 - 3 Bulan/ Months	1 - 3 Bulan/ Months

4. INVESTASI JANGKA PENDEK

4. SHORT-TERM INVESTMENTS

	2019 Rp	2018 Rp	
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.448.200.000	8.448.200.000	Restricted of Time Deposits PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	8.448.200.000	8.448.200.000	Total

Deposito berjangka yang jatuh tempo tiga bulan sampai dengan setahun dan sertifikat deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas pinjaman bank yaitu sebagai deposito yang dibatasi penggunaannya (Catatan 22).

Time deposits due three months until one year and certificates of time deposits is used as collateral for bank loans deposits that is restricted in use (Note 22).

5. PIUTANG USAHA – BERSIH

5. ACCOUNTS RECEIVABLE – NET

Lancar

Current

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	870.358.621.995	1.853.135.078.019	Construction Service Receivables
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Jasa Konstruksi	(140.626.526.458)	(134.008.269.018)	Less: Allowance for Impairment Losses of Construction Service Receivables
Piutang Dagang	356.167.835.472	522.930.768.360	Trade Receivables
Sub Jumlah	1.085.899.931.009	2.242.057.577.361	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	867.117.374.075	826.854.126.965	Construction Service Receivables
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Jasa Konstruksi	(494.627.995.276)	(502.932.659.704)	Less: Allowance for Impairment Losses of Construction Service Receivables
Piutang Dagang	2.096.809.249.620	1.201.387.169.461	Trade Receivables
Piutang Sewa	695.923.299	822.475.571	Rent Receivables
Sub Jumlah	2.469.994.551.718	1.526.131.112.293	Sub Total
Jumlah	3.555.894.482.727	3.768.188.689.654	Total

Rincian saldo piutang usaha jasa konstruksi tanpa cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The details of construction service receivables without allowance for impairment losses are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Utama Karya (Persero)	260.208.871.090	--
PT Utama Marga Waskita	219.700.750.908	--
PT Kertas Leces (Persero)	86.707.725.121	86.707.725.121
PT Jasamarga Solo Ngawi	61.486.418.109	1.282.370.352.146
PT Angkasa Pura I (Persero)	47.076.836.802	78.318.343.800
PT Prima Multi Terminal	46.817.291.911	24.991.151.231
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	36.546.827.524	--
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	30.373.096.227	--
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	26.260.305.600	26.260.305.600
PT Istaka Karya (Persero)	22.527.353.440	22.527.353.440
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	16.499.794.207	27.307.686.385

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
PT Jasamarga Semarang Batang	--	108.375.622.730
PT Transjawa Paspro Jalan Tol	--	122.388.873.896
KSO/JO WKR - RNI	--	41.166.848.158
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	16.153.351.056	32.720.815.512
Sub Jumlah/ Sub Total	870.358.621.995	1.853.135.078.019
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Pemerintah Daerah/ District Governments	145.175.717.957	136.945.828.517
PT Broadbiz Asia	106.596.781.459	106.596.781.459
PT Trikarya Graha Utama	100.650.939.502	100.650.939.502
PT Bangun Investa Graha	93.137.768.963	93.137.768.963
PT Royal Abadi Dentalindo	88.020.000.434	84.106.000.434
PT Ade Pede Realty	53.953.367.794	53.953.367.794
Bin Ladin Contractor Group LLC	53.000.910.398	53.000.910.399
PT Kukuh Mandiri Lestari	45.722.206.412	--
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	22.446.113.833	31.871.330.197
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste Ministry of Public Works Democratic Republic of Timor-Leste	21.949.534.653	9.071.255.067
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	--	22.807.670.736
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	136.464.032.670	134.712.273.897
Sub Jumlah/ Sub Total	867.117.374.075	826.854.126.965
Jumlah/ Total	1.737.475.996.070	2.679.989.204.984

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of construction service receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(636.940.928.722)	(485.576.340.874)	Beginning Balance
Penambahan	(16.309.803.888)	(178.009.521.434)	Addition
Pemulihan	27.730.099.738	64.941.669.482	Recovery
Reklasifikasi	(9.733.888.862)	(38.296.735.896)	Reclassification
Saldo Akhir	(635.254.521.734)	(636.940.928.722)	Ending Balance

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 27.730.099.738, terdiri dari PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebesar Rp 9.743.644.262, Pemerintah Daerah sebesar Rp 6.777.686.896, Bin Ladin Contractor Group sebesar Rp 6.288.623.519, PT Harmas Jalesveva sebesar Rp 3.639.118.492, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 1.281.026.569.

The value of recovery on allowance for impairment of account receivables from construction services for the year 2019 amounted to Rp 27,730,099,738, consists of the PT Hotel Indonesia Natour (Persero) amounted to Rp 9,743,644,262, District Governments amounted to Rp 6,777,686,896, Bin Ladin Contractor Group amounted to Rp 6,288,623,519, PT Harmas Jalesveva amounted to Rp 3,639,118,492, and the Ministry of Public Works and Housing amounted to Rp 1,281,026,569.

Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 16.309.803.888 yang berasal dari PT Istaka Karya (Persero).

The additional value of allowance for impairment losses on construction services receivable for the year 2019 amounted to Rp 16,309,803,888 was came from PT Istaka Karya (Persero).

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 64.941.669.482, terdiri dari PT Jasa Marga Bali Tol sebesar Rp 34.369.107.612, PT Halla Mohana sebesar Rp 10.741.054.966, Hotel Indonesia Natour (Persero) sebesar Rp 9.922.318.637, Bin Ladin Contractor Group sebesar Rp 5.554.598.400, Kementerian PUPR sebesar Rp 1.457.214.382, PT Merdeka Sandi Surya sebesar Rp 1.000.000.000, Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp 831.402.185, PT Kertas Leces (Persero) sebesar Rp 508.261.538, PT Sijiro

The value of recovery on allowance for impairment of account receivables from construction services for the year 2018 amounted to Rp 64,941,669,482, consists of PT Jasa Marga Bali Tol amounted to Rp 34,369,107,612, PT Halla Mohana amounted to Rp 10,741,054,966, Hotel Indonesia Natour (Persero) amounted to Rp 9,922,318,637, Bin Ladin Contractor Group amounted to Rp 5,554,598,400, the Ministry of Public Works and Public Housing amounted to Rp 1,457,214,382, PT Merdeka Sandi Surya amounted to Rp 1,000,000,000, the State

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Internasional sebesar Rp 307.711.762, dan PT Pancamulti Niaga Pratama sebesar Rp 250.000.000.

Administration Agency amounted to Rp 831,402,185, PT Kertas Lecece (Persero) amounted to Rp 508,261,538, PT Sijiro Internasional amounted to Rp 307,711,762, and PT Pancamulti Niaga Pratama amounted to Rp 250,000,000.

Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 178.009.521.434 terdiri dari PT Bangun Investa Graha sebesar Rp 65.196.438.274, PT Ade Pede Realty sebesar Rp 53.953.367.794, Pemerintah Daerah sebesar Rp 33.879.581.094, Bin Ladin Contractor Group sebesar Rp 16.709.068.180, PT Pardika Wisthi Sarana sebesar Rp 3.601.769.500, PT Batam Island Marina sebesar Rp 1.840.547.431, PT Trikarya Graha Utama sebesar Rp 1.515.901.660, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sebesar Rp 977.545.114, dan PT Metro Wisata Raya sebesar Rp 335.302.387.

The additional value of allowance for impairment losses on construction services receivable for the year 2018 amounted to Rp 178,009,521,434 consists of PT Bangun Investa Graha amounted to Rp 65,196,438,274, PT Ade Pede Realty amounted to Rp 53,953,367,794, District Government amounted to Rp 33,879,581,094, Bin Ladin Contractor Group amounted to Rp 16,709,068,180, PT Pardika Wisthi Sarana amounted to Rp 3,601,769,500, PT Batam Island Marina amounted to Rp 1,840,547,431, PT Trikarya Graha Utama amounted to Rp 1,515,901,660, Public Works Office of Riau Province amounted to Rp 977,545,114, and PT Metro Wisata Raya amounted to Rp 335,302,387.

Manajemen telah membentuk cadangan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individual atas masing-masing pelanggan.

The management provided allowance for impairment losses on receivable, based on individual assessment of each customers.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

The management believes that allowance for impairment losses of trade accounts receivable to third parties are sufficient to cover the possible losses on uncollectible receivables. The management also believes that there is no significant risk concentrated in accounts receivable.

Rincian saldo piutang dagang sebagai berikut:

The details of trade receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	33.653.524.126	16.218.742.359
KSO/JO Waskita - Acset	23.547.705.806	18.911.177.500
KSO/JO Waskita - Gorip Nanda Guna	7.924.201.883	67.973.786.370
PT Pertamina (Persero)	4.825.685.885	49.588.241.256
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	300.463.878.011	380.529.443.185
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(14.247.160.239)	(10.290.622.310)
Sub Jumlah/ Sub Total	356.167.835.472	522.930.768.360
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Semutama Langgeng	401.818.200.000	--
PT Hakaaston	398.056.437.000	86.038.340.000
Pelanggan dari/ customer from Apartment The Reiz Condo	114.290.022.497	176.356.040.529
KSO/ JO RDMP Balikpapan	125.488.739.963	--
PT Mandiri Bangun Makmur	72.145.715.408	--
PT Kapuk Naga Indah	31.593.407.190	10.608.667.777
Pelanggan dari/ customer from Apartment Nines BSD	26.525.591.672	--
PT Hyundai Engineering & Construction CO LTD	26.388.253.077	11.118.136.001
PT Fin Centerindo Satu	24.187.415.867	--
KSO/ JO Shimizu Pembangunan Perumahan Bangun Cipta Kontraktor	23.669.386.995	--
KSO/ JO Pembangunan Perumahan	22.840.568.603	22.465.575.000
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	844.431.046.746	914.030.080.647
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(14.625.535.398)	(19.229.670.493)
Sub Jumlah/ Sub Total	2.096.809.249.620	1.201.387.169.461
Jumlah/ Total	2.452.977.085.092	1.724.317.937.821

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The amount of accounts receivable based on age are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Belum Jatuh Tempo	3.020.996.781.622	2.657.503.706.686	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo			Past Due
Sampai dengan 12 Bulan	338.887.921.315	1.078.184.737.177	Up to 12 Months
> 13 - 24 Bulan	210.146.385.550	222.375.747.281	>13 - 24 Months
> 25 - 36 Bulan	162.008.059.275	126.551.919.049	>25 - 36 Months
> 36 Bulan	487.982.552.336	350.033.800.986	>36 Months
Jumlah	4.220.021.700.098	4.434.649.911.179	Total

Piutang usaha dijamin pada bank-bank pemberi pinjaman (Catatan 22 dan 30), dengan rincian sebagai berikut:

Accounts receivables are guaranteed on bank lenders (Notes 22 and 30), with details as follows:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijamin terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu Seksi 2A sebesar Rp 891.548.691.000, Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket I sebesar Rp 2.058.463.205.040, Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 2B sebesar Rp 467.333.480.784, Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 2A sebesar Rp 957.997.883.690, Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 3 sebesar Rp 2.047.455.211.317, Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 1 sebesar Rp 622.703.919.382, dan Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 4A sebesar Rp 570.278.367.209 (Catatan 22.1).
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijamin terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi Seksi 6 sebesar Rp 159.367.339.965, Proyek Pembangunan Tol Solo – Ngawi Paket 2 sebesar Rp 399.753.317.390, Pembangunan Teraskita Hotel Makassar sebesar Rp 88.979.924.526, Perluasan Bandara Depati Amir Rp 284.614.861.818, Pembangunan Apartemen Solterra sebesar Rp 487.926.000.000, Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 2A Ujung sebesar Rp 772.934.636.364, Pekerjaan Renovasi Masjid Istiqlal sebesar Rp 423.000.907.273, dan Pembangunan Tol Ciawi Sukabumi Seksi 4 sebesar Rp 1.724.233.413.036 (Catatan 22.4).
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, piutang yang dijamin terhadap Proyek yaitu tagihan termin atas pembangunan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 2 sebesar Rp 1.866.223.553.000 dan Jalan Tol Semarang – Batang sebesar Rp 937.500.000.000 (Catatan 22.10).
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Section 2A Toll Road Project amounted to Rp 891,548,691,000, Kayu Agung – Palembang – Betung Toll Road Construction Package I project amounted to Rp 2,058,463,205,040, Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 2B project amounted to Rp 467,333,480,784, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 2A project amounted to Rp 957,997,883,690, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 3 project amounted to Rp 2,047,455,211,317, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 1 project amounted to Rp 622,703,919,382, and Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 4A project amounted to Rp 570,278,367,209 (Note 22.1).
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Medan Kualanamu Tebing Tinggi Section 6 Toll Road Project amounted to Rp 159,367,339,965, Solo – Ngawi Toll Road Project Package 2 project amounted to Rp 399,753,317,390, Teraskita Hotel Makassar Construction amounted to Rp 88,979,924,526, Depati Amir Airport Expansion amounted to Rp 284,614,861,818, Construction of Solterra Apartments amounted to Rp 487,926,000,000, Becakayu Toll Road Construction Section 2A Ujung project amounted to Rp 772,934,636,364, Istiqlal Mosque Renovation Project amounted to Rp 423,000,907,273, and Construction of Ciawi Sukabumi Section 4 Toll Road amounted to Rp 1,724,233,413,036 (Note 22.4).
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung section 2 Toll Road project amounted to Rp 1,866,223,553,000 and Semarang - Batang Toll Road Project amounted to Rp 937,500,000,000 (Note 22.10).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

- Indonesia Eximbank, piutang usaha yang dijaminakan yaitu tagihan termin atas proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 sebesar Rp 3.772.972.796.000 (Catatan 22.5).
- PT Bank Pan Indonesia Tbk, piutang usaha yang dijaminakan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket IV Seksi 3 sebesar Rp 1.153.324.437.038 dan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 3 sebesar Rp 1.818.281.700.000 (Catatan 22.8).
- PT Bank UOB Indonesia, piutang usaha yang dijaminakan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pengembangan Bandara Hasanuddin Makassar sebesar Rp 336.207.400.000, Pembangunan Rest Area Jalan Tol Ruas Bakauheni Terbanggi Besar Paket II sebesar Rp 309.238.381.001, Bandara Juanda Surabaya sebesar Rp 651.225.000.000 dan Revitalisasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan sebesar Rp 204.947.965.608 (Catatan 22.12).
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijaminakan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing sebesar Rp 2.431.622.463.327, Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris (Paket 2) sebesar Rp 291.578.218.364, Proyek Bendungan Jlantah sebesar Rp 599.773.156.627, Light Rail Transit di Sumatera Selatan sebesar Rp 4.129.318.842.470, dan Proyek Jalan Tol Japek Selatan : Ruas Taman Mekar – Sadang sebesar Rp 3.084.828.083.000 (Catatan 22.2 dan 30).
- PT Bank BTPN Tbk piutang usaha yang dijaminakan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Tol Ruas Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 4 sebesar Rp 1.508.871.128.489, dan Proyek Tol Ruas Serpong – Cinere sebesar Rp 700.000.000.000 (Catatan 22.9).
- PT Bank Syariah Mandiri, piutang usaha yang dijaminakan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Pembangunan Jalan Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong sebesar Rp 911.973.843.648 dan Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar sebesar Rp 1.200.330.248.820 (Catatan 22.3).
- PT Bank DKI, piutang usaha yang dijaminakan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Pembangunan (Design and Build) Akses Pelabuhan Kuala Tanjung Ruas Inderapura – Kuala Tanjung sebesar Rp 1.541.509.360.000 (Catatan 22.11).
- Indonesia Eximbank, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Cimanggis Cibitung Toll Road Project Section 2 amounted to Rp 3,772,972,796,000 (Note 22.5).
- PT Bank Pan Indonesia Tbk, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Kayu Agung – Palembang - Betung Toll Road Project Package IV Section 3 amounted to Rp 1,153,324,437,038 and The Development of Ciawi – Sukabumi Toll Road Section 3 amounted to Rp 1,818,281,700,000 (Note 22.8).
- PT Bank UOB Indonesia, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Makassar Hasanuddin Airport Development Project amounted to Rp 336,207,400,000, the Construction of Rest Area of Bakauheni Terbanggi Besar Toll Road Section II amounted to Rp 309,238,381,001, Juanda Airport in Surabaya at Rp 651,225,000,000 and Revitalization of the Ragunan Student Sports Training Center Area amounted to Rp 204,947,965,608 (Note 22.12).
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from the development of Cibitung - Cilincing Toll Road project amounted to Rp 2,431,622,463,327, Leuwikeris Dam Construction Project (Package 2) amounted to Rp 291,578,218,364, Jlantah Dam Project amounted to Rp 599,773,156,627, Light Rail Transit in South Sumatra amounted to Rp 4,129,318,842,470, and Japek Selatan Toll Road Project: section Taman Mekar - Sadang amounted to Rp 3,084,828,083,000 (Notes 22.2 and 30).
- PT Bank BTPN Tbk, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Pematang Panggang - Kayu Agung Toll Road Project Section 4 amounted to Rp 1,508,871,128,489, and Serpong – Cinere Toll Road Project amounted Rp 700,000,000,000 (Note 22.9).
- PT Bank Syariah Mandiri, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from the constructions of JORR II Toll Road Project section Kunciran - Serpong amounted to Rp 911,973,843,648 and the Constructions of Krian - Legundi Bunder-Manyar Toll Road project amounted to Rp 1,200,330,248,820 (Note 22.3).
- PT Bank DKI, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Development and Design Project Access Kuala Tanjung Port section Inderapura - Kuala Tanjung amounted to Rp 1,541,509,360,000 (Note 22.11).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

- PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Kapal Betung Paket IV seksi 3B sebesar Rp 558.653.008.937 (Catatan 22.17 dan 30).
- Bank of China Ltd, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Bendungan Multipurpose Karian sebesar Rp 124.258.805.332, proyek pembangunan Bendungan Tapin sebesar Rp 220.072.178.791, proyek Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung (MYC) sebesar Rp 207.828.197.304, dan proyek Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Phase II sebesar Rp 173.041.000.000 (Catatan 22.14).
- Sindikasi PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu nilai kontrak konstruksi proyek Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung II Seksi 1, proyek Bandara Achmad Yani Semarang, proyek Bendungan Temef NTT, Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas & Kawasan 3 Pilar Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Paket I, dan proyek Bendungan Marga Tiga sebesar total Rp 5.136.705.942.666 (Catatan 30.1 Pihak Ketiga).
- Sindikasi PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu nilai kontrak konstruksi pembangunan proyek Jalan Tol Tebing Tinggi– Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan termasuk Simpang Susun Serbelawan dan Pembangunan Proyek Nines Plaza dan Residence sebesar Rp 3.092.908.000.000 (Catatan 30.2 Pihak Ketiga).
- PT Bank BNI Syariah, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Bendungan Komerling II/Tiga Dihaji Paket II sebesar Rp 612.683.537.357 (Catatan 22.19).
- *PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Kayu Agung – Palembang – Kapal Betung Toll Road Construction Project Package IV Section 3B amounted to Rp 558,653,008,937 (Note 22.17 and 30).*
- *Bank of China Ltd, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Civil Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project amounted to Rp 124,258,805,332, Construction of Tapin Dam project amounted to Rp 220,072,178,791, TPA Sarbagita Suwung Regional Revitalization (MYC) project amounted to Rp 207,828,197,304, and Cisumdawu Phase II Toll Road Project amounted to Rp 173,041,000,000 (Note 22.14).*
- *Syndication of PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia the project's guaranteed receivables are the construction contract of Kayu Agung - Palembang - Betung II Toll Road project Section 1, Achmad Yani Semarang Airports project, Temef NTT Dam project, Construction of the Rectorate Building, Faculty & Area Building 3 Campus Pillars of the Islam Internasional Indonesia University (UIII) Package I, and Marga Tiga Dam project amounted to Rp 5,136,705,942,666 (Note 30.1 Third Parties).*
- *Syndication of PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Shinhan Indonesia, and PT Bank Resona Perdania which are guaranteed for the project, namely the construction contract value of the Tebing Tinggi – Parapat (Stage 1) Tebing Tinggi – Serbelawan include Simpang Susun Serbelawan, and Construction of Nines Plaza and Residence Project amounted to Rp 3,092,908,000,000 (Note 30.2 Third Parties).*
- *PT Bank BNI Syariah, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Komerling II/Tiga Dihaji Package II Dam Project was used as collateral bank loans of PT Bank BNI Syariah amounted to Rp 612,683,537,357 (Note 22.19).*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

6. PIUTANG VENTURA BERSAMA

6. JOINT VENTURES RECEIVABLES

Kemitraan/ Venturer	Nama Proyek/ Project Name	2019 Rp	2018 Rp
Waskita - Acset	Jalan Layang Cikampek	3.178.315.554.988	500.058.753.646
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	Bendungan Temef	35.719.725.812	--
Waskita - Utama - Wika	Runway BDR Samarinda Baru	33.550.685.744	33.876.180.051
Waskita - Wika	Jalan Tol Bocimi	21.216.047.822	--
Waskita - PAL	PLTU Malinau	2.575.136.082	34.436.228.607
Waskita - Acset Indonusa	Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (VGF JAPEK)	448.651.261	31.485.897.725
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)		30.806.503.645	59.805.366.086
Jumlah/Total		3.302.632.305.354	659.662.426.115

Piutang ventura bersama merupakan pinjaman dan biaya ventura bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup.

Joint venture receivables represent loan and advance payment of joint venture's expenses paid by the Group.

Piutang ventura bersama tidak dikenakan bunga. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan akan dilunasi pada saat diminta.

Joint venture receivables were not subjected to interest. These accounts have no collateral and are repayable on demand.

Manajemen berpendapat bahwa piutang ventura bersama dapat ditagihkan.

Management believes that balances of joint venture receivables are collectible.

7. PIUTANG RETENSI – BERSIH

7. RETENTION RECEIVABLES – NET

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi	1.478.346.703.038	976.780.232.806	<i>Related Parties</i>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(16.876.141.050)	(21.783.819.041)	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>
Sub Jumlah	1.461.470.561.988	954.996.413.765	Sub Total
Pihak Ketiga	471.624.710.031	564.717.590.481	<i>Third Parties</i>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(149.968.115.342)	(185.846.919.096)	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>
Sub Jumlah	321.656.594.689	378.870.671.385	Sub Total
Jumlah	1.783.127.156.677	1.333.867.085.150	Total

Rincian saldo piutang retensi adalah sebagai berikut:

The details of retention receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Utama Karya (Persero)	555.516.076.827	61.210.836.152
PT Jasamarga Solo Ngawi	226.094.178.092	296.040.870.372
PT Pejagan Pemasang Tol Road	185.886.927.457	167.017.230.721
PT Transjawa Paspro Jalan Tol	157.170.764.021	111.731.435.646
PT Cinere Serpong Jaya	59.776.886.871	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	55.234.369.025	271.609.200
PT Prima Multi Terminal	52.734.492.106	48.152.664.562
KSO/JV Waskita Karya - Trinita	37.792.904.224	26.189.516.546
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	34.197.889.050	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	25.955.245.552	29.466.418.607
PT PAL Indonesia (Persero)	23.835.098.479	23.835.098.479
PT Angkasa Pura II (Persero)	20.822.810.861	5.753.814.691
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	2.391.343.718	75.000.513.058
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1.730.115.440	33.208.263.892
PT Kereta Api Indonesia	--	37.558.238.570
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	39.207.601.315	61.343.722.310
Sub Jumlah/ Sub Total	1.478.346.703.038	976.780.232.806
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Marga Trans Nusantara	72.957.385.585	--
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste/ Ministry of Public Works of the Democratic Republic of Timor Leste	58.283.260.032	54.801.571.157

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
Kementerian Transportasi dan Komunikasi Republik Demokrasi Timor Leste/ Ministry of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor Leste	45.699.537.045	91.225.884.453
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Ministry of Public Works and Housing	36.468.617.691	48.062.779.052
Bin Ladin Contractor Group LLC	27.707.741.349	29.577.446.348
PT Pardika Wisthi Sarana	23.431.420.350	23.431.420.350
Pemerintah Daerah/ District Governments	21.803.836.668	63.024.829.636
PT Toba Pengembang Sejahtera	--	28.076.717.899
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	185.272.911.311	226.516.941.586
Sub Jumlah/ Sub Total	471.624.710.031	564.717.590.481
Jumlah/ Total	1.949.971.413.069	1.541.497.823.287

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of retention receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(207.630.738.137)	(130.013.128.440)	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan	(3.908.000.000)	(57.990.994.384)	<i>Addition</i>
Pemulihan	30.326.535.615	10.756.559.394	<i>Recovery</i>
Reklasifikasi	14.367.946.130	(30.383.174.707)	<i>Reclassification</i>
Saldo Akhir	(166.844.256.392)	(207.630.738.137)	<i>Ending Balance</i>

Manajemen telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang, berdasarkan penilaian secara individual atas masing-masing pemberi kerja.

The management has provided an allowance for impairment losses of receivables, based on individual assessment of each owner of the project.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang retensi.

The management believes that allowance for impairment losses of receivables is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible retention receivables in the future. The management also believes that there is no significant risk concentrated in retention receivables.

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 30.326.535.615 yang terdiri dari PT Trans Marga Jateng sebesar Rp 12.467.863.408, Pemerintah Daerah sebesar Rp 7.253.450.872, PT Harmas Jalesveva sebesar Rp 6.843.350.000, PT Merdeka Sandi Surya sebesar Rp 1.698.000.000, PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 709.863.817, PT Sentul City Tbk sebesar Rp 700.000.000, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 382.398.318 dan PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp 271.609.200. Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.908.000.000 berasal dari PT Mega Pasanggrahan Indah.

The value of recovery on allowance for impairment of retention receivables for the year 2019 amounted to Rp 30,326,535,615 consist of PT Trans Marga Jateng amounted to Rp 12,467,863,408, District Government amounted to Rp 7,253,450,872, PT Harmas Jalesveva amounted to Rp 6,843,350,000, PT Merdeka Sandi Surya amounted to Rp 1,698,000,000, PT Angkasa Pura II (Persero) amounted to Rp 709,863,817, PT Sentul City Tbk amounted to Rp 700,000,000, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) amounted to Rp 382,398,318 and PT Angkasa Pura I (Persero) amounted to Rp 271,609,200. The value of additional allowance for impairment of retention receivables for the year 2019 amounted to Rp 3,908,000,000 was came from PT Mega Pasanggrahan Indah.

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 10.756.559.394, terdiri dari PT Rekayasa Industri (Persero) sebesar Rp 6.598.822.510, Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.150.079.999, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp 1.839.320.018, dan Kementerian PUPR sebesar Rp 168.336.867.

The value of recovery on allowance for impairment of retention receivables for the year 2018 amounted to Rp 10,756,559,394 consists of PT Rekayasa Industri (Persero) amounted to Rp 6,598,822,510, District Governments amounted to Rp 2,150,079,999, the Minister of Law and Human Rights amounted to Rp 1,839,320,018 and the Ministry of Public Works and Public Housing amounted to Rp 168,336,867.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 57.990.994.384 terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 9.944.426.180, PT Graha Sarana Duta sebesar Rp 8.341.433.021, PT Mega Pasanggrahan Indah sebesar Rp 7.112.585.516, Bin Ladin Contractor Group sebesar Rp 6.336.292.257, PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar Rp 6.186.460.112, PT Sentul City Tbk sebesar Rp 5.000.000.000, PT Pardika Wisthi Sarana sebesar Rp 4.285.104.000, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3.617.875.301, PT Trikarya Graha Utama sebesar Rp 3.529.310.280, PT Gapura Kencana Abadi sebesar Rp 1.000.000.000, PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 709.863.819, PT Pandan Harum Medika sebesar Rp 681.818.182, Rumah Sakit Advent Bandung sebesar Rp 422.694.545, PT Pertamedika Sentul sebesar Rp 313.636.362, PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp 271.609.200, PT Menara Pelangi sebesar Rp 137.885.609 dan PT Jambi Permai Abadi sebesar Rp 100.000.000.

The additional value of allowance for impairment losses on retention receivable for the year 2018 amounted to Rp 57,990,994,384 consists of District Governments amounted to Rp 9,944,426,180, PT Graha Sarana Duta amounted to Rp 8,341,433,021, PT Mega Pasanggrahan Indah amounted to Rp 7,112,585,516, Bin Ladin Contractor Group amounted to Rp 6,336,292,257, PT Pembangunan Jaya Ancol amounted to Rp 6,186,460,112, PT Sentul City Tbk amounted to Rp 5,000,000,000, PT Pardika Wisthi Sarana amounted to Rp 4,285,104,000, PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 3,617,875,301, PT Trikarya Graha Utama amounted to Rp 3,529,310,280, PT Gapura Kencana Abadi amounted to Rp 1,000,000,000, PT Angkasa Pura II (Persero) amounted to Rp 709,863,819, PT Pandan Harum Medika amounted to Rp 681,818,182, Advent Bandung Hospital amounted to Rp 422,694,545, PT Pertamedika Sentul amounted to Rp 313,636,362, PT Angkasa Pura I (Persero) amounted to Rp 271,609,200, PT Menara Pelangi amounted to Rp 137,885,609 and PT Jambi Permai Abadi amounted to Rp 100,000,000.

8. PIUTANG LAIN-LAIN – BERSIH

8. OTHER RECEIVABLES – NET

a. Piutang Lain-lain Lancar – Bersih

a. Other Current Receivable – Net

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Waskita Transjawa Toll Road	2.446.151.682.531	2.390.959.282.226
PT Hutama Karya (Persero)	472.428.664.459	659.975.854.163
PT Jasamarga Semarang Batang	310.026.387.800	--
KSO/JO WKR - Asiana Senopati	261.083.807.289	--
KSO/JO WKR - Darmo Permai	201.998.014.250	136.766.227.637
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	184.168.799.025	45.755.415.603
PT Cinere Serpong Jaya	130.180.182	67.197.871.133
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	--	270.330.068.992
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	94.317.987.932	69.477.014.611
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(9.076.656.786)	(9.076.656.786)
Sub Jumlah/ Sub Total	3.961.228.866.682	3.631.385.077.579
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Lembaga Manajemen Aset Negara	4.214.783.076.596	5.136.839.607.632
PT Kings Key L	224.800.000.000	--
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	498.847.766	1.875.317.672
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(2.150.894.080)	(2.150.894.080)
Sub Jumlah/ Sub Total	4.437.931.030.282	5.136.564.031.224
Jumlah/ Total	8.399.159.896.964	8.767.949.108.803

Piutang lain-lain terutama merupakan biaya yang dibayar terlebih dahulu oleh Grup untuk keperluan penerbitan bank garansi atas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk subkontraktor. Piutang ini akan dilunasi pada saat diminta.

Other receivables mainly consist of bank guarantee fee which has been paid in advance by the Group for the Working Capital Loan (WCL) to the subcontractors. These receivables are repayable on demand.

Piutang kepada PT Waskita Transjawa Toll Road merupakan modal kerja pinjaman kepada entitas asosiasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. 05/FPPS/WTR/2018 tanggal 7 Nopember 2018, yang akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2019 dan telah diperpanjang sampai dengan 29 Oktober 2020 berdasarkan Amandemen I Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. ADD/10.1/WTR/2019. Pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan investasi dan operasional dan memiliki bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun.

Other receivables from PT Waskita Transjawa Toll Road is working capital loans to associates, as set forth in the Loan Facility Agreement No. 05/FPPS/WTR/2018 dated November 7, 2018, which will mature on October 30, 2019 and has been extended until October 29, 2020 based on Amendment I of the Shareholders Loan Facility Agreement No. ADD/10.1/WTR/2019. The loans were used for the purpose of investment and operation and had an interest rate of 13.5% per annum.

Piutang kepada PT Waskita Transjawa Toll Road digunakan untuk dana talangan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. ADD/15.7/WTR/1219 tanggal 18 Desember 2019, yang akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 10% per tahun.

Other receivables from PT Waskita Transjawa Toll Road were used for land bailout fund, as set forth in the Loan Facility Agreement No. ADD/15.7/WTR/1219 dated December 18, 2019, which has matured on December 31, 2020. The loan had an interest at a rate of 10% per annum.

Piutang kepada PT Waskita Transjawa Toll Road digunakan untuk kebutuhan investasi dan operasional sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. 26/ADD/FPPS/WTR/2019 tanggal 18 Desember 2019 antara Grup dan PT Waskita Transjawa Toll Road, yang akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun.

Other receivables from PT Waskita Transjawa Toll Road were used for the purpose of investment and operation, as set forth in the Loan Facility Agreement No. 26/ADD/FPPS/WTR/2019 dated December 18, 2019, which has matured on December 31, 2020. The loan had an interest at a rate of 13.5% per annum.

Piutang kepada PT Hutama Karya (Persero) digunakan untuk memberikan dana talangan tanah ruas Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. DU/TAW.1614/S.Perj.29/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Other receivables from PT Hutama Karya (Persero) were used to provide land bailouts for the Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Toll Road section in accordance with the Loan Facility Agreement No. DU/TAW.1614/S.Perj.29/2017 dated June 19, 2017.

Piutang kepada PT Jasamarga Semarang Batang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi perusahaan Jalan Tol Batang Semarang, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian *Mandatory Convertible Loan (MCL)* tanggal 19 Desember 2019 antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR dan PT Jasamarga Semarang Batang, yang akan jatuh tempo dua tahun setelah kredit investasi dilunasi oleh PT Jasamarga Semarang Batang. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 10,75% per tahun.

Other receivables from PT Jasamarga Semarang Batang are used to finance investment needs in the Batang Semarang toll road, as stated in the Mandatory Convertible Loan (MCL) Agreement dated December 19, 2019 between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR and PT Jasamarga Semarang Batang, which will mature two years after the investment credit is repaid by PT Jasamarga Semarang Batang. The loan has a loan interest of 10.75% per annum.

Piutang kepada KSO WKR – Asiana Senopati merupakan piutang atas pengakhiran kerja sama operasi antara WKR dengan PT Asiana Senopati pada tanggal 11 April 2019 sesuai dengan Akta No. 002 tanggal 12 Desember 2019. Kedua belah pihak menyetujui hak dan kewajibannya untuk mengembalikan investasinya masing-masing dan PT Asiana Senopati mengakui utang atas pengembalian investasi WKR dengan pokok nominal Rp 400.000.000.000 yang disesuaikan dengan nilai bunga menjadi Rp 413.586.657.534. Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo piutang lain-lain WKR ke KSO WKR – Asiana Senopati adalah sebesar

Other receivables from KSO WKR - Asiana Senopati represent receivables for the termination of the joint operation between WKR and PT Asiana Senopati on April 11, 2019 in accordance with the Deed No. 002 dated December 12 2019. Both parties agree to their rights and obligations to return their respective investments and PT Asiana Senopati recognized the debt for returning WKR investment with a nominal principal of Rp 400,000,000,000 adjusted to the interest rate to Rp 413,586,657,534. As of December 31, 2019, the balance of other receivables from KSO

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Rp 245.586.657.534.

Piutang KSO WKR - Darmo Permai ini merupakan piutang terhadap KSO WKR - Darmo Permai sebesar Rp 172.750.000.000 dengan perjanjian No. 003/P.WKR/2017, WKR juga mempunyai hak pengembalian uang atas penyeteroran PPN Masukan pada saat akuisisi tanah perusahaan ke KSO sebesar Rp 21.736.737.500 dan penggantian biaya operasional KSO WKR - Darmo permai sebesar Rp 7.511.276.750.

Piutang kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan piutang atas bunga ekuitas yang dibebankan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akibat penggunaan dana ekuitas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penggunaan dan Pengembalian Dana Ekuitas untuk Pekerjaan Paket 1: Pengadaan Transmisi 500 Kv Sumatera, New Aur Duri - Peranap No. 19.3/P/WK/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Perjanjian Penggunaan dan Pengembalian Dana Ekuitas untuk Pekerjaan Paket 2: Pengadaan Transmisi 500 Kv Sumatera, Peranap - Perawang No. L.19.4/P/WK/2016 tanggal 23 Mei 2016.

Piutang kepada PT Cinere Serpong Jaya digunakan untuk keperluan dana talangan tanah, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. 08/PKS/WTR/2016 tanggal 28 November 2016 antara Grup dan PT Cinere Serpong Jaya, yang akan jatuh tempo pada 28 November 2017. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun. Pada tanggal 21 Juni 2017, dibuatkan Amandemen I atas perjanjian tersebut dengan mengubah bunga pinjaman menjadi 13,5% dan jangka waktu menjadi 31 Desember 2017. Pada tanggal 30 Nopember 2017 dibuatkan Amandemen II atas perjanjian tersebut dengan merubah jangka waktu peminjaman menjadi 29 Juni 2018. Sampai dengan tanggal pelaporan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian sesuai Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. 106/BA/WTR/DIR/2018 tanggal 14 Desember 2018. Saldo tersebut di atas merupakan bunga pinjaman atas dana Talangan Tanah yang harus dibayarkan oleh PT Cinere Serpong Jaya maksimal tanggal 30 Juni 2019. Pinjaman sudah dilunasi sesuai dengan Addendum Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. ADD/04.1/WTR/0819 tanggal 23 Agustus 2019.

Piutang kepada PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri digunakan untuk keperluan operasional, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham Amandemen II No. 26/ADD/FPPS/WTR/2018 tanggal 10 Desember 2018 antara WTR dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, yang akan jatuh tempo pada 10 Desember 2019. Pinjaman tersebut memiliki

WKR - Asiana Senopati amounted to Rp 245,586,657,534.

Other Receivables from KSO WKR - Darmo Permai is receivable from KSO WKR - Darmo Permai amounted to Rp 172,750,000,000 with the agreement No. 003/P.WKR/2017, the Company have right to get reimbursement from VAT in when acquisition land the company to joint venture amount Rp 21,736,737,500, and reimbursement of operational expense in KSO WKR - Darmo Permai amount Rp 7,511,276,750.

Other Receivables from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) represent receivables on equity interest charged to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) due to the use of equity funds as stated in the Agreement on Use and Refund of Equity Funds for Work Package 1: 500 Kv Sumatera Transmission Procurement, New Aur Duri - Peranap No. 19.3/P/WK/2016 dated May 23, 2016 and Agreement on the Use and Refund of Equity Funds for Work Package 2: 500 Kv Sumatera Transmission Procurement, Peranap - Perawang No. L.19.4/P/WK/2016 dated May 23, 2016.

Other receivables from PT Cinere Serpong Jaya were used for the purpose of the land bailout funds, as set forth in the Loan Facility Agreement No. 08/PKS/WTR/2016 dated November 28, 2016 between the Group and PT Cinere Serpong Jaya, which will mature on November 28, 2017. The loan had an interest rate of 9.5% per annum. On June 21, 2017, Amendment I was made on the agreement by changing the loan interest rate to 13.5% and the maturity date to December 31, 2017. On November 30, 2017, Amendment II was made by changing the maturity date to June 29, 2018. As of the date of reporting, there is no extension of the agreement in accordance with the Minutes of Termination of the Loan Facility Shareholders Agreement No. 106/BA/WTR/DIR/ 2018 dated December 14, 2018. The balance above is the interest of the loan from the land bailout fund that must be paid by PT Cinere Serpong Jaya up to June 30, 2019. The loan has been paid in accordance with Addendum Minutes of Termination of the Shareholders Loan Facility Agreement No. ADD/04.1/WTR/0819 dated August 23, 2019.

Other receivables from PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri were used for operational purpose, as set forth in the Amendment II of Loan Facility Agreement No. 26/ADD/FPPS/WTR/2018 dated December 10, 2018 between WTR and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, which will mature on December 10, 2019. The loan had an interest

bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Piutang ini sudah dibayar pada tanggal 18 Desember 2019.

rate of 12% per annum. These receivables were paid on December 18, 2019

Piutang lain-lain kepada Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan:

Other receivables to Lembaga Manajemen Aset Negara represent:

1. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Cimanggis – Cibitung sesuai akta notaris No. 11 tanggal 21 Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 5.281.759.035.495.
2. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen VI Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Cibitung – Cilincing sesuai akta notaris No. 17 tanggal 31 Mei 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 4.028.212.083.253.
3. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Krian-Legundi-Bunder-Manyar sesuai akta notaris No. 03 tanggal 15 Desember 2017 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 1.700.000.000.000.
4. Piutang atas dana dukungan Pemerintah berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Bekasi -Cawang – Kampung Melayu sesuai akta notaris No. 09 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.
5. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Pemalang – Batang sesuai akta notaris No. 6 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 1.400.000.000.000.
6. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Ciawi – Sukabumi sesuai akta notaris No. 18 tanggal 31 Mei 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.

1. *Receivables for Government Support Fund based on Amendment V Concession Agreement Cimanggis Cibitung Toll Road according to notarial deed No. 11 dated December 21, 2018 by Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 5,281,759,035,495.*
2. *Receivables of Government Support Fund based on Amendment VI Concession Agreement Cibitung-Cilincing Toll Road according to the notarial deed No. 17 dated May 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 4,028,212,083,253.*
3. *Receivables of Government Support Fund based on Amendment I Concession Agreement Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road according to the notarial deed No. 3 dated December 15, 2017 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 1,700,000,000,000.*
4. *Receivables of Government support fund based on Concession Agreement Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Toll Road according to the notarial deed No. 09 dated December 16, 2011 of notary Rina Utami Djauhari, S.H.*
5. *Receivables of Government Support Fund based on Concession Agreement Pemalang - Batang Toll Road according to the notarial deed No. 6 dated August 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 1,400,000,000,000.*
6. *Receivables of Government Support Fund based on Amendment V Concession Agreement Ciawi - Sukabumi Toll Road according to the notarial deed No. 18 dated May 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H.*

Piutang lain-lain PT Kings Key Limited merupakan piutang atas pelepasan kepemilikan WTR di PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 91 dan 92 tanggal 18 Desember 2019 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. (Catatan 13).

Other receivables from PT Kings Key Limited represent receivables from the transfer of ownership of WTR in PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri in accordance with the Share Sale and Purchase Deed No. 91 and 92 dated December 18, 2019 from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. (Note 13).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

b. Piutang Lain-lain Tidak Lancar

Pihak Berelasi/ Related Parties	
PT Istaka Karya (Persero)	
PT Pejagan Pemalang Toll Road	
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	
Sub Jumlah/ Sub Total	
Pihak Ketiga/ Third Parties	
PT Bakrie Toll Indonesia	
PT Bakrie Toll Road	
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	
Sub Jumlah/ Sub Total	
Jumlah/ Total	

Piutang lain-lain PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914 merupakan piutang Perusahaan yang diberikan berdasarkan keputusan para Pemegang Saham Perusahaan di luar RUPS No. KEP-83/MBU/2011 dan No. KEP-PS04/PPA/0411 tanggal 1 April 2011. Pada tanggal 21 Mei 2011, Perusahaan menerima Surat Pengakuan Utang No. L.05B/P/WK/2011 dan No. DU-SP/2011.01B dari PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914.

Pada tanggal 12 April 2011, PT Istaka Karya (Persero) memohon kepada Perusahaan sesuai surat No. DK/2011-323 untuk menerbitkan garansi bank proyek Bandar Lampung by Pass sebesar Rp 10.661.885.000 dan biaya provisi untuk penerbitan garansi bank sebesar Rp 312.445.834. Pada tanggal 30 Maret 2012, bank garansi No. 2011/JPU/GB/068/6148/Monday telah dicairkan oleh pemilik proyek, sehingga piutang Perusahaan kepada PT Istaka Karya (Persero) menjadi sebesar Rp 75.144.307.748. Ketidakmampuan PT Istaka Karya (Persero) dalam memenuhi pembayaran utangnya menyebabkan penyelesaian utang dilakukan dengan cara *Debt to Equity Swap*, yaitu para kreditur mendapatkan posisi sebagai pemegang ekuitas PT Istaka Karya (Persero) sebagai pengganti pembayaran atas utang PT Istaka Karya (Persero) kepada para kreditur.

Pembayaran piutang akan dilakukan secara bertahap ditahun ke 9 sampai maksimal 5 tahun.

Berdasarkan surat dari Perusahaan No. 483/WK/Dir/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST. Perusahaan meminta PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelesaikan utangnya dengan skema penyelesaian sebagai berikut:

1. Pembayaran awal senilai 3% atau sebesar Rp 2.549.586.465.

b. Other Non-Current Receivable

2019	2018
Rp	Rp
74.914.307.748	74.914.307.748
39.456.718.793	36.492.465.249
(74.914.307.748)	(74.914.307.748)
39.456.718.793	36.492.465.249
69.697.329.695	69.697.329.695
1.050.000.000	1.050.000.000
(1.050.000.000)	(30.383.893.165)
69.697.329.695	40.363.436.530
109.154.048.488	76.855.901.779

Other receivables from PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 64,169,976,914 were receivables given in accordance with the Shareholders of the Company decision outside of the Annual General Meeting of shareholders No. KEP-83/MBU/2011 and No. KEP-PS04/PPA/0411 dated April 1, 2011. On May 21, 2011, the Company received a Letter of Debt Acknowledgement No. L.05B/P/WK/2011 and No. DU-SP/2011.01B from PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 64,169,976,914.

On April 12, 2011, PT Istaka Karya (Persero) requested to the Company through letter No. DK/2011-323 to issue a bank guarantee for Bandar Lampung By Pass project amounted to Rp 10,661,885,000 and the cost of provision for bank guarantee issuance amounted to Rp 312,445,834. On March 30, 2012 the bank guarantee No. 2011/JPU/GB/068/6148/Monday has been executed by the owner of the project, so that the receivables of the Company to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 75,144,307,748. Inability of PT Istaka Karya (Persero) in fulfilling its debt payments, caused the settlement of debt using Debt to Equity Swap to solve its debt, means the creditors get a position as an equity holder of PT Istaka Karya (Persero) in line of payment for a debt PT Istaka Karya (Persero) to the creditors.

The payment of receivables will be settled partially at the 9th year for a maximum of 5 years.

According to the Company's letters No. 483/WK/Dir/2013 dated May 7, 2013 that concerns The Execution of Decision to Ratification of Peace (Homologation) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST. The Company asked PT Istaka Karya (Persero) to resolve the debt with this settlement scheme:

1. The initial payment valued at 3% or in amounted to Rp 2,549,586,465.

2. Pemenuhan sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sebesar Rp 82.436.629.045.

Berdasarkan surat di atas, Perusahaan menerima jawaban PT Istaka Karya (Persero) dengan surat No. DU/2013-131 tanggal 15 Mei 2013 yang berisi:

1. Pembayaran awal 3% bersumber dari pencairan piutang atas eskalasi proyek SKSD.
2. Sisa pembayaran sebesar 97% dalam bentuk penyertaan saham, sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait.

Pada tahun 2017, terdapat pemulihan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 230.000.000 sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT Istaka Karya (Persero). Sampai dengan tanggal pelaporan, PT Istaka Karya (Persero) belum memenuhi sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sehingga Perusahaan membukukan cadangan kerugian penurunan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 74.914.307.748 atau sebesar 100% dari nilai piutang. Tidak ada perubahan piutang pada 31 Desember 2019.

Piutang lain-lain PT Pejagan Pemalang Toll Road digunakan untuk operasional sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. 05/FPPS/WTR/2018 tanggal 7 Nopember 2018, antara WTR dan PT Pejagan Pemalang Toll Road yang akan jatuh tempo pada 29 Oktober 2019. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun. Sampai dengan tanggal pelaporan, addendum perjanjian masih dalam proses.

Piutang lain-lain kepada PT Bakrie Toll Indonesia dan PT Bakrie Toll Road diberikan sebagai pinjaman kepada pemegang saham PT Cimanggis Cibitung Toll Road terdahulu (Sebelum WTR mengakuisisi PT Cimanggis Cibitung Toll Road).

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(116.525.751.779)	(107.449.094.993)	Beginning Balance
Penambahan	--	(9.076.656.786)	Addition
Pemulihan	29.816.404.375	--	Recovery
Reklasifikasi	(482.511.210)	--	Reclassification
Saldo Akhir	(87.191.858.614)	(116.525.751.779)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

2. The fulfillment of the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stocks (*Debt to Equity Swap*) for Rp 82,436,629,045.

Based on the letters above, the Company has received the answer from PT Istaka Karya (Persero) with the letters No. DU/2013-131 dated May 15, 2013 that contains:

1. The initial payment of 3% from the disbursement of receivables of the escalation SKSD project.
2. The remaining payment of 97% in the form of investments in share of stocks, is being reviewed by the Ministry of Finance and related institutions.

For the year 2017, there is recovery of the allowance for impairment losses of receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 230,000,000. Until reporting date, PT Istaka Karya (Persero) has not fulfilled the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stock (*Debt to Equity Swap*) thus the Company provided allowance for impairment loss on receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 74,914,307,748 or 100% from receivable. There is no change in receivable as of December 31, 2019.

Other receivables of PT Pejagan Pemalang Toll Road were used for the purpose of operation, as set forth in the Loan Facility Agreement of Shareholders No. 05/FPPS/ WTR/2018 dated November 7, 2018 with due date October 29, 2019. The loan had an interest rate of 13.5% per annum. Up to the reporting date, the addendum to the agreement is still in process.

Other accounts receivable from PT Bakrie Toll Indonesia and PT Bakrie Toll Road represent loan to the to the former shareholders of PT Cimanggis Cibitung Toll Road (before WTR acquired PT Cimanggis Cibitung Toll Road).

The movements of allowance for impairment losses of other receivables are as follows:

The management believes that allowance for impairment losses on accounts receivable is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible other receivables in the future.

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 29.816.404.375 yang terdiri dari PT Bakrie Toll Indonesia sebesar Rp 29.333.893.165 dan PT Prolindo Cipta Nusantara sebesar Rp 482.511.210. Tidak ada penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tahun 2019.

The value of recovery on allowance for impairment of other receivables for the year 2019 amounted to Rp 29,816,404,375 consist of PT Bakrie Toll Indonesia amounted to Rp 29,333,893,165 and PT Prolindo Cipta Nusantara amounted to Rp 482,511,210. There is no additional on allowance for impairment of other receivables for the year 2019.

Tidak ada penambahan atas pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tahun 2018. Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain sebesar Rp 9.076.656.786 disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain atas PT Kertas Leces (Persero).

There is no additional of recovery on allowance for impairment of other receivables for the year 2018. The additional value of allowance for impairment losses on other receivables amounted to Rp 9,076,656,786 was due to the decrease in other receivables from PT Kertas Leces (Persero).

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	2019 Rp	2018 Rp	
Bahan Baku			Raw Material
Konstruksi	485.366.618.276	820.899.169.547	Construction
Beton Precast	729.625.054.391	1.228.429.929.512	Precast Concrete
Sub Jumlah	1.214.991.672.667	2.049.329.099.059	Sub Total
Persediaan dalam Pengembangan			Work in Progress
Aset Real Estat	2.447.579.643.106	2.038.845.632.511	Real Estate Assets
Tanah yang Belum Dikembangkan	795.739.844	795.739.844	Undeveloped Land
Sub Jumlah	2.448.375.382.950	2.039.641.372.355	Sub Total
Persediaan untuk Dijual			Inventory Available for Sale
Beton Precast	806.880.148.578	999.662.254.602	Precast Concrete
Tanah Kavling Siap Dijual	598.345.228	598.345.228	Lots of Land Ready for Sale
Sub Jumlah	807.478.493.806	1.000.260.599.830	Sub Total
Jumlah	4.470.845.549.423	5.089.231.071.244	Total

Bahan baku konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Grup. Persediaan material terdiri dari persediaan besi, semen, solar, tiang pancang, keramik/ marmar, *traveler form*, *geotextile*, aspal, dan batu.

Raw construction material represents construction materials and equipment supply projects that are still available at the warehouse of existing project owned by the Group. The raw material consists of iron, cement, diesel, pile, ceramic/ marble, traveler form, geotextile, asphalt, and stone.

Beton precast merupakan persediaan produk beton unit usaha *precast* yang terdiri dari persediaan barang jadi produk beton, persediaan bahan baku, dan bahan penolong serta persediaan bahan dalam proses.

The precast concrete represents the inventory of concrete products of precast business units consisting of concrete finished good, raw materials and supporting materials, including materials in the process.

Persediaan aset real estat merupakan bangunan apartemen yang siap dijual, tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan yang sedang dikonstruksi.

The inventory of real estate assets represents apartment units ready for sale, land under development and buildings under constructions.

Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai persediaan, sebab Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan dapat digunakan dan dijual.

The management did not provide allowance for impairment losses of inventory for the management believes that all inventories are fully usable and are able to sell.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

10. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA

10. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa – Lancar

Gross Amount Due From Customers - Current

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Rp	Rp
Pihak Berelasi	11.557.452.399.567	25.029.465.405.951
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(81.767.789.694)	(92.180.175.725)
Sub Jumlah	<u>11.475.684.609.873</u>	<u>24.937.285.230.226</u>
Pihak Ketiga	2.994.610.914.423	7.694.745.218.248
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(299.119.965.280)	(281.297.285.372)
Sub Jumlah	<u>2.695.490.949.143</u>	<u>7.413.447.932.876</u>
Jumlah	<u>14.171.175.559.016</u>	<u>32.350.733.163.102</u>

*Related Parties
Less: Allowance for Impairment
Losses of Receivables*

Sub Total

*Third Parties
Less: Allowance for Impairment
Losses of Receivables*

Sub Total

Total

Rincian saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa – bagian lancar adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customers – current portion are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Rp	Rp
Pihak Berelasi - Lancar/		
<i>Related Parties - Current Portion</i>		
PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek	3.919.391.926.704	2.908.863.506.310
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.517.337.389.316	4.335.022.338.588
PT Hutama Karya (Persero)	2.207.276.450.367	13.307.336.684.806
PT Hutama Marga Waskita	935.324.590.771	--
PT Cinere Serpong Jaya	794.993.020.913	--
PT Jasamarga Japek Selatan	406.050.425.374	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	286.004.050.824	132.807.897.720
PT Angkasa Pura II (Persero)	214.197.806.402	245.834.186.585
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	107.237.903.443	817.399.354.874
PT Jasamarga Semarang Batang	103.739.802.908	1.917.028.248.076
PT Jasamarga Solo Ngawi	5.565.310.116	516.335.351.659
PT Prima Multi Terminal	--	46.271.433.648
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	--	75.291.840.944
KSO/JO RNI Waskita	--	51.745.450.620
PT Pejagan Pemalang Toll Road	--	353.629.304.351
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	127.298.348.995
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	--	71.144.732.296
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	60.333.722.429	123.456.726.479
Sub Jumlah/ Sub Total	<u>11.557.452.399.567</u>	<u>25.029.465.405.951</u>
Pihak Ketiga - Lancar/		
<i>Third Parties - Current Portion</i>		
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	2.263.571.913.959	4.417.482.026.289
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	285.255.191.246	119.503.966.879
Pemerintah Daerah/ District Governments	70.944.853.158	84.972.965.233
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste/ The Ministry of Public Work of the Republic Democratic of Timor Leste	24.350.570.577	64.936.235.997
PT Marga Trans Nusantara	--	1.281.554.253.626
PT Cinere Serpong Jaya	--	1.425.042.674.256
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	350.488.385.483	301.253.095.968
Sub Jumlah/ Sub Total	<u>2.994.610.914.423</u>	<u>7.694.745.218.248</u>
Jumlah/ Total	<u>14.552.063.313.990</u>	<u>32.724.210.624.199</u>

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tagihan bruto kepada pengguna jasa sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Other important informations regarding to gross amount due from customers as of December 31, 2019 are as follows:

1. PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek – Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated

1. PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek – Jakarta Cikampek II Elevated Toll Road Project

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated dengan nomor kontrak 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 dengan nilai

The Company entered into a construction contract on Jakarta – Cikampek II Elevated Toll Road Project with contract number 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 with a

kontrak sebesar Rp 12.300.715.272.727.	contract value amounted to Rp 12,300,715,272,727.
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) – Proyek Transmisi Sumatera 500 KVA	2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) - Sumatera Transmission 500 KVA Project
Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Transmisi Sumatera 500 kVA Paket 1 No. 0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, Paket 2 No. 0533.PJ/ DAN.02.02/DIR/2015, dan Paket 3 No. 0372-I.PJ/DAN.02.02/DIR/2017 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp 4.026.285.529.669, Rp 2.678.957.208.310 dan Rp 2.609.973.000.000.	The Company entered into a construction contract on Sumatera Transmission 500 kVA Package 1 No. 0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, Package 2 No. 0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, and Package 3 No. 0372-I.PJ/DAN.02.02/DIR/2017 with a contract amounted to Rp 4,026,285,529,669, Rp 2,678,957,208,310 and Rp 2,609,973,000,000, respectively.
3. PT Hutama Karya (Persero) – Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang	3. PT Hutama Karya (Persero) – The Development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Toll Road Project
Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 442.499.784.161 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang Zona HK-1, Rp 1.778.742.359.383 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang Zona HK-2, Rp 856.654.890.679 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang Zona HK-3, dan Rp 185.741.098.521 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang Zona HK-4 Jembatan Sodong.	The Company entered into a construction contract No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 amounted to Rp 442,499,784,161 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-1 Toll Road Project, amounted to Rp 1,778,742,359,383 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-2 Toll Road Project, Rp 856,654,890,679 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-3 Toll Road Project, Rp 185,741,098,521 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-4 Sodong Bridge Toll Road Project.
4. PT Hutama Karya (Persero) – Proyek Pematang Panggang – Kayu Agung	4. PT Hutama Karya (Persero) – Pematang Panggang – Kayu Agung Project
Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 untuk pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp 622.703.919.383 untuk Seksi 1, sebesar Rp 434.890.726.064 untuk Seksi 1a, sebesar Rp 1.827.814.190.904 untuk Seksi 2, sebesar Rp 1.020.944.279.465 untuk Seksi 2a, sebesar Rp 506.693.608.324 untuk Seksi 2b, sebesar Rp 2.105.066.823.305 untuk Seksi 3, Rp 1.388.581.735.869 untuk Seksi 4, dan Rp 517.365.548.368 untuk Seksi 4a.	The Company entered into a construction contract No. DU/TAW.1576/S.Perj.28/2017 for the development of Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road with a contract amounted to Rp 622,703,919,383 for Section 1, amounted to Rp 434,890,726,064 for Section 1a, amounted to Rp 1,827,814,190,904 for Section 2, amounted to Rp 1,020,944,279,465 for Section 2a, amounted to Rp 506,693,608,324 for Section 2b, amounted to Rp 2,105,066,823,305 for Section 3, amounted to Rp 1,388,581,735,869 for Section 4, and amounted to Rp 517,365,548,368 for Section 4a.
5. PT Hutama Marga Waskita – Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat	5. PT Hutama Marga Waskita – Tebing Tinggi - Parapat Toll Road Project
Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat No. 002/KONTRAK-HMW/VI/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.197.007.509.090.	The Company entered into a construction contract on Tebing Tinggi – Parapat Toll Road Project No. 002/KONTRAK-HMWVI/2018 with a contract amounted to Rp 2,197,007,509,090.

6. PT Cinere Serpong Jaya – Proyek Jalan Tol Serpong – Cinere

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan tol Serpong - Cinere No. 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017 pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.454.401.060.881 (tanpa PPN).

7. PT Jasamarga Japek Selatan – Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket III dengan nomor kontrak 11/BA.JJS/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.634.858.146.150.

8. PT Angkasa Pura I (Persero) – Proyek Perluasan Terminal T1 Bandara Juanda

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk Proyek Perluasan Terminal T1 Bandara Juanda pada tanggal 4 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 623.181.818.182.

9. Kementerian Perhubungan – Proyek LRT Sumatera Selatan

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan proyek LRT Sumatera Selatan No. 01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 pada tanggal 30 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 10.560.500.212.691.

10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Proyek Pembangunan Bendungan Bener Paket II

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Bendungan Bener Paket II No. HK.02.03/PKK.BEND.II/2018/01 pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 557.877.638.182.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto – bagian tidak lancar adalah sebagai berikut:

Saldo Awal/ *Beginning Balance*
Penambahan/ *Addition*
Pemulihan/ *Recovery*
Reklasifikasi/ *Reclassification*
Saldo Akhir/ *Ending Balance*

6. PT Cinere Serpong Jaya – Serpong – Cinere Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Serpong - Cinere Toll Road Project No. 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017 dated August 1, 2017 with contract value of Rp 2,454,401,060,881 (Exclude VAT).

7. PT Jasamarga Japek Selatan – Jakarta Cikampek II Selatan Package III Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Jakarta – Cikampek II Selatan Package III Toll Road Project with contract number 11/BA.JJS/2019 with a contract value amounted to Rp 2,634,858,146,150.

8. PT Angkasa Pura I (Persero) – The Expansion of Terminal 1 Juanda Airport Project

The Company entered into a construction for the expansion of Terminal 1 Juanda Airport Project dated July 4, 2019 amounted to Rp 623,181,818,182.

9. Ministry of Transportation – The Development of South Sumatera LRT Project

The Company entered into a construction contract on the development of South Sumatera LRT No. 01/KNT/LRTSS/VI/2016 and 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 dated June 30, 2016 with contract amounted to Rp 10,560,500,212,691.

10. Ministry of Public Works and Housing – The Development of Bener Dam Package II

The Company entered into a construction contract for the development of Bener Dam Package II No. HK.02.03/PKK.BEND.II/2018/01 dated October 16, 2018 with a contract amounted to Rp 557,877,638,182.

The movements of allowance for impairment losses of gross amount due from customers – non-current position are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
	(373.477.461.097)	(416.506.863.382)
	(23.463.718.514)	(75.839.925.990)
	20.204.970.695	50.189.417.672
	(4.151.546.058)	68.679.910.603
	(380.887.754.974)	(373.477.461.097)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Manajemen berpendapat bahwa tagihan bruto dapat ditagihkan. Manajemen juga berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto di kemudian hari.

The management believes all gross amounts due from customers are collectible. The management also believes that allowance for impairment losses of gross amount due from customers is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible gross amount due from customers in the future.

Pada tahun 2019, nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 23.463.718.514 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Tarakan. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 20.204.970.695 yang terdiri dari PT Trans Marga Jateng sebesar Rp 12.114.737.689, Pemerintah Daerah sebesar Rp 5.692.110.835, PT Harmas Jalesveva sebesar Rp 1.497.099.369, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 667.036.362, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebesar Rp 181.818.182, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 52.168.258.

For the year 2019, the additional value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers amounted to Rp 23,463,718,514 was came from Tarakan Public Works Service. The recovery value on allowance for impairment of gross amount due from customers amounted to Rp 20,204,970,695 consists of PT Trans Marga Jateng amounted to Rp 12,114,737,689, District Government amounted to Rp 5,692,110,835, PT Harmas jalesveva amounted to Rp 1,497,099,369, the Ministry of Public Works and Housing amounted to Rp 667,036,362, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) amounted to Rp 181,818,182, and PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 52,168,258.

Pada tahun 2018, nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 75.839.925.990 yang terdiri dari PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 37.796.106.830, Perpustakaan Nasional sebesar Rp 10.000.000.000, Dinas Pekerjaan Umum Karimun sebesar Rp 9.458.903.025, PT Broadbiz Asia sebesar Rp 6.437.849.729, Dinas Pekerjaan Umum Tarakan sebesar Rp 5.000.000.000, Pemerintah Daerah sebesar Rp 4.958.812.019, PT Graha Sarana Duta sebesar Rp 1.024.283.558, PT Mega Pasanggrahan Indah sebesar Rp 1.002.983.752, dan Waskita – Darmo Permai sebesar Rp 160.987.077. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 50.189.417.672 yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 26.460.495.973, PT Rekayasa Industri (Persero) sebesar Rp 12.290.040.836, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 6.914.654.188, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp 4.087.377.818, dan PT Bali Seminyak Resort sebesar Rp 436.848.857.

For the year 2018, the additional value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers amounted to Rp 75,839,925,990 consists of PT PAL Indonesia (Persero) amounted to Rp 37,796,106,830, National Library amounted to Rp 10,000,000,000, Karimun Public Works Service amounted to Rp 9,458,903,025, PT Broadbiz Asia amounted to Rp 6,437,849,729, Tarakan Public Works Service amounted to Rp 5,000,000,000, Government District amounted to Rp 4,958,812,019, PT Graha Sarana Duta amounted to Rp 1,024,283,558, PT Mega Pasanggrahan Indah amounted to Rp 1,002,983,752, and Waskita – Darmo Permai amounted to Rp 160,987,077. The recovery value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers amounted to Rp 50,189,417,672 consists of the Ministry of Public Works and Housing amounted to Rp 26,460,495,973, PT Rekayasa Industri (Persero) amounted to Rp 12,290,040,836, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk amounted to Rp 6,914,654,188, the Ministry of Law and Human Rights amounted to Rp 4,087,377,818 and PT Bali Seminyak Resort amounted to Rp 436,848,857.

Jumlah tagihan bruto berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The amount of gross amount due from customers based on age are as follows:

	<u>2019</u> Rp	<u>2018</u> Rp	
Belum Jatuh Tempo	12.704.045.645.039	29.942.190.288.155	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo			Past Due
Sampai dengan 180 Hari	972.159.628.512	1.309.139.722.099	Up to 180 Days
> 181 - 360 Hari	176.370.453.608	696.788.580.344	> 181 - 360 Days
> 360 Hari	699.487.586.831	776.092.033.601	> 360 Days
Jumlah	14.552.063.313.990	32.724.210.624.199	Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

11. PERPAJAKAN

11. TAXES

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pasal 4 (2)	982.965.192	1.433.803.534	Article 4(2)
Pasal 22			Article 22
2019	1.131.663.642	--	2019
2018	--	13.311.506.242	2018
2017	--	40.284.349.330	2017
2016	--	16.150.829	2016
Pasal 23			Article 23
2019	826.739.911	--	2019
2018	--	1.634.905.464	2018
2017	--	2.491.228.447	2017
2016	--	2.829.513.314	2016
Pasal 25			Article 25
2017	--	384.000.000	2017
Pasal 28A			Article 28A
2018	387.546.777.287	228.543.955.814	2018
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
2019	274.349.963.722	--	2019
2018	325.180.121.107	325.180.121.107	2018
2017	1.649.143.045.450	1.649.143.045.450	2017
2016	--	478.969.781.661	2016
Jumlah	2.639.161.276.311	2.744.222.361.192	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Utang Pajak Jangka Pendek			Short-Term Taxes Payable
Pasal 21	33.731.102.123	27.391.834.451	Article 21
Pasal 22	8.079.374.844	16.979.053.083	Article 22
Pasal 23	5.693.014.634	118.900.801.498	Article 23
Pajak Final Konstruksi	1.057.110.107.853	906.459.557.704	Construction Final Tax
Pajak Pertambahan Nilai	123.910.113.737	386.202.197.626	Value Added Tax
Pasal 4 (2) - Final	67.239.573.242	303.420.999.417	Article 4 (2) - Final
Pasal 29	86.081.321.095	269.254.188.862	Article 29
Total Utang Pajak Jangka Pendek	1.381.844.607.528	2.028.608.632.641	Total Short-Term Taxes Payable
Utang Pajak Jangka Panjang			Long-Term Taxes Payable
Pajak Final Konstruksi	193.161.337.709	805.408.693.733	Construction Final Tax
Total Utang Pajak Jangka Panjang	193.161.337.709	805.408.693.733	Total Long-Term Taxes Payable
Jumlah	1.575.005.945.237	2.834.017.326.374	Total

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expenses

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Beban Pajak Kini			Current Tax Expense
Perusahaan	19.580.438.038	114.572.353.500	The Company
Entitas Anak	308.288.480.732	710.795.245.078	Subsidiaries
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(28.117.324.822)	91.507.199.877	Deferred Tax Expenses (Benefit)
Jumlah	299.751.593.948	916.874.798.455	Total

d. Beban Pajak Final

d. Final Tax Expenses

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pendapatan Perusahaan			The Company's Revenues
Pendapatan Jasa Konstruksi	23.278.812.183.433	41.736.556.172.428	Construction Revenues
Dikurangi			Deduction
Pendapatan Usaha yang			Revenues that Funded by
Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri	(58.882.823.148)	(787.894.721.295)	Foreign Loan
Pendapatan Usaha Luar Negeri			Non Taxable Foreign
Tidak Kena Pajak dan KSO	(2.582.399.415.192)	(2.168.633.767.430)	Revenues and JV
Pendapatan Beda Waktu			Time Differences
Penaan Pajak - Bersih	(1.564.854.260.222)	(9.980.392.070.606)	Taxable Revenue - Net
Pendapatan Jasa Konstruksi			Taxable Income from
Kena Pajak			Construction Revenues
Telah Terealisasi	19.072.675.684.871	28.799.635.613.097	Realized
Belum Terealisasi	4.470.089.611.916	20.843.936.361.731	Unrealized
Pendapatan Gedung yang Disewakan	1.344.224.095	2.082.107.965	Building Rental Revenues
Jumlah Pendapatan Kena Pajak	23.544.109.520.882	49.645.654.082.793	Total Taxable Income
Beban Pajak Final			Final Tax Expenses
3% atas Pendapatan Jasa Konstruksi	706.282.958.904	1.489.307.159.245	3% of Construction Revenues
10% atas Pendapatan Gedung yang Disewakan	134.422.410	208.210.797	10% of Building Rental Revenues
Jumlah Beban Pajak Final	706.417.381.314	1.489.515.370.042	Total Final Tax Expenses

e. Beban Pajak Non Final

e. Non Final Tax Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan Non Final	432.155.308.183	666.507.418.277	Non Final Income
Perbedaan Tetap Beban Non Final	353.833.554.228	208.218.004.281	Permanent Difference Non Final Expenses
Jumlah Laba kena Pajak	78.321.753.955	458.289.413.996	Total Taxable Income
Lab Kena Pajak	78.321.753.955	458.289.413.996	Total Taxable Income
Beban Pajak Non Final 2019: 25% x Rp 78.321.753.955 2018: 25% x Rp 458.289.413.996	19.580.438.038 --	-- 114.572.353.500	Non Final Taxes Expenses 2019: 25% x Rp 78,321,753,955 2018: 25% x Rp 458,289,413,996
Jumlah Beban Pajak Non Final	19.580.438.038	114.572.353.500	Total Non Final Taxes Expenses
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka:			Deducting Prepaid Taxes
PPH 22	806.108.120	1.816.706.013	Article 22
PPH 23	7.382.406.374	216.763.463.439	Article 23
PPH 25	--	15.129.381.865	Article 25
Jumlah	8.188.514.494	233.709.551.317	Total
Pajak Non Final Terutang	11.391.923.544	(119.137.197.817)	Non Final Tax Payable

f. Pajak Tangguhan

f. Deferred Tax

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp	Penyesuaian/ Adjustment Rp	(Dibebankan) Dikreditkan ke Lab Rugi/(Charged) Credited to Profit or Loss Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
TJT	581.979.033	--	(4.439.237)	(31.545.686)	545.994.110
CCT	143.819.850	--	(2.598.651)	(54.028.615)	87.192.584
CTP	133.048.726	--	33.025.529	14.441.304	180.515.559
WTR	66.990.246	--	192.864.287	13.261.594	273.116.127
KKDM	--	455.606.192	--	--	455.606.192
WBP	631.410.216	(631.410.216)	--	--	--
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	1.557.248.071	(175.804.024)	218.851.928	(57.871.403)	1.542.424.572
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
WBP	--	1.012.901.895	(23.237.392.154)	768.045.006	25.018.339.055
KKDM	50.323.695.776	455.606.192	50.713.694.999	(65.606.969)	--
PBTR	1.315.064.304	--	1.315.064.304	--	--
WKR	2.723.876.393	--	(892.894.255)	--	3.616.770.648
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	54.362.636.473	1.468.508.087	27.898.472.894	702.438.037	28.635.109.703
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
TJT	1.834.047.166	--	(1.155.344.657)	(96.723.476)	581.979.033
CCT	126.112.719	--	44.996.593	(27.289.462)	143.819.850
CTP	--	--	145.605.691	(12.556.965)	133.048.726
WTR	--	--	82.504.735	(15.514.489)	66.990.246
WBP	41.963.875.696	--	(41.533.040.343)	200.574.863	631.410.216
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	43.924.035.581	--	(42.415.277.981)	48.490.471	1.557.248.071
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
PPTR	37.831.852.057	(37.831.852.057)	--	--	--
KKDM	3.495.794.867	--	(46.778.916.954)	48.983.955	50.323.695.776
PBTR	--	--	(1.315.064.304)	--	1.315.064.304
WKR	1.725.928.190	7.565	(997.940.638)	--	2.723.876.393
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	43.053.575.114	(37.831.844.492)	(49.091.921.896)	48.983.955	54.362.636.473

g. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 2 April 2019, Perusahaan menerima SKPLB dari KPP atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran Rp 320.441.716.778 dan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 6.006.320.784 terkait denda pajak, sehingga perusahaan menerima Rp 314.435.395.994, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKP dan STP/ SKP and STP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Des-16	00011/407/16/093/19	05-Mar-19	320.441.716.778	Terimal/ Receipt
2	PPN	Des-16	00003/107/16/093/19	05-Mar-19	(26.905.531)	Bayar/ Paid
3	PPN	Des-16	00013/287/16/093/19	05-Mar-19	(5.871.490.796)	Bayar/ Paid
4	PPN	Des-16	00009/187/16/093/19	05-Mar-19	(21.337.306)	Bayar/ Paid
5	PPH Pasal 21	Des-13	00330/101/13/701/18	04-Apr-18	(720.317)	Bayar/ Paid
6	PPH Pasal 21	Feb-16	00285/101/16/831/18	22-Mei-18	(100.000)	Bayar/ Paid
7	PPH Pasal 21	Jun-16	00286/101/16/831/18	22-Mei-18	(100.000)	Bayar/ Paid
8	PPH Pasal 21	Mei-17	00128/101/17/114/18	02-Jul-18	(100.000)	Bayar/ Paid
9	PPH Pasal 23	Des-14	00008/103/14/805/18	14-Sep-18	(21.368.112)	Bayar/ Paid
10	PPH Pasal 21	Apr-17	00298/101/17/942/18	23-Okt-18	(101.668)	Bayar/ Paid
11	PPH Pasal 21	Mar-17	00295/101/17/942/18	23-Okt-18	(101.668)	Bayar/ Paid
12	PPH Pasal 21	Jan-17	00288/101/17/942/18	23-Okt-18	(100.000)	Bayar/ Paid
13	PPH Pasal 21	Feb-17	00270/101/17/942/18	23-Okt-18	(100.000)	Bayar/ Paid
14	PPH Pasal 21	Mei-17	00277/101/17/942/18	23-Okt-18	(100.000)	Bayar/ Paid
15	PPH Pasal 21	Jun-17	00274/101/17/942/18	23-Okt-18	(14.076)	Bayar/ Paid
16	PPH Pasal 21	Des-16	00008/101/16/904/19	28-Jan-19	(21.377)	Bayar/ Paid
17	PPH Pasal 23	Nov-16	00007/103/16/646/19	21-Feb-19	(1.151.886)	Bayar/ Paid
18	PPH Pasal 23	Jan-17	00001/103/17/646/19	21-Feb-19	(1.055.385)	Bayar/ Paid
19	PPH Pasal 23	Jun-16	00002/103/16/646/19	21-Feb-19	(1.035.559)	Bayar/ Paid
20	PPH Pasal 23	Sep-16	00005/103/16/646/19	21-Feb-19	(929.708)	Bayar/ Paid
21	PPH Pasal 23	Agu-16	00004/103/16/646/19	21-Feb-19	(896.476)	Bayar/ Paid
22	PPH Pasal 21	Jun-16	00010/101/16/646/19	21-Feb-19	(816.883)	Bayar/ Paid
23	PPH Pasal 23	Okt-16	00006/103/16/646/19	21-Feb-19	(770.384)	Bayar/ Paid
24	PPH Pasal 21	Sep-16	00013/101/16/646/19	21-Feb-19	(500.317)	Bayar/ Paid
25	PPH Pasal 23	Mei-16	00001/103/16/646/19	21-Feb-19	(405.614)	Bayar/ Paid
26	PPH Final Pasal 4(2)	Jun-16	00006/140/16/646/19	21-Feb-19	(301.422)	Bayar/ Paid
27	PPH Final Pasal 4(2)	Nov-16	00010/140/16/646/19	21-Feb-19	(291.766)	Bayar/ Paid
28	PPH Pasal 21	Mei-16	00009/101/16/646/19	21-Feb-19	(263.428)	Bayar/ Paid
29	PPH Pasal 23	Jul-16	00003/103/16/646/19	21-Feb-19	(230.884)	Bayar/ Paid
30	PPH Final Pasal 4(2)	Mei-16	00005/140/16/646/19	21-Feb-19	(170.000)	Bayar/ Paid
31	PPH Pasal 21	Jan-17	00012/101/17/646/19	21-Feb-19	(147.108)	Bayar/ Paid
32	PPH Pasal 21	Agu-16	00012/101/16/646/19	21-Feb-19	(102.135)	Bayar/ Paid
33	PPH Final Pasal 4(2)	Jan-17	00038/140/17/646/19	21-Feb-19	(95.188)	Bayar/ Paid
34	PPH Pasal 21	Jul-16	00011/101/16/646/19	21-Feb-19	(40.662)	Bayar/ Paid
35	PPH Final Pasal 4(2)	Sep-16	00009/140/16/646/19	21-Feb-19	(39.860)	Bayar/ Paid
36	PPH Final Pasal 4(2)	Jul-16	00007/140/16/646/19	21-Feb-19	(38.888)	Bayar/ Paid
37	PPH Final Pasal 4(2)	Agu-16	00008/140/16/646/19	21-Feb-19	(38.800)	Bayar/ Paid
38	PPH Pasal 22	Des-17	00001/102/17/513/19	11-Mar-19	(21.644.685)	Bayar/ Paid
39	PPH Pasal 22	Jan-18	00001/102/18/513/19	11-Mar-19	(31.761.481)	Bayar/ Paid
40	PPH Pasal 21	Des-15	00116/101/15/805/19	14-Mar-19	(931.414)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					314.435.395.994	

Pada tanggal 5 April 2019, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 1.138.408.486 terkait denda pajak, sebagai berikut:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor STP/ STP Number	Tanggal/ Date	STP/ Tax Collection Letter	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-17	00003/187/17/093/19	19-Mar-19	(527.579.325)	Bayar/ Paid
2	PPN	Feb-17	00004/187/17/093/19	19-Mar-19	(195.664.995)	Bayar/ Paid
3	PPN	Mar-17	00005/187/17/093/19	19-Mar-19	(80.871.771)	Bayar/ Paid
4	PPN	Apr-17	00006/187/17/093/19	19-Mar-19	(60.619.428)	Bayar/ Paid
5	PPN	Mei-17	00007/187/17/093/19	19-Mar-19	(24.316.480)	Bayar/ Paid
6	PPN	Jun-17	00008/187/17/093/19	19-Mar-19	(24.055.858)	Bayar/ Paid
7	PPN	Jul-17	00009/187/17/093/19	19-Mar-19	(4.855.558)	Bayar/ Paid
8	PPN	Agu-17	00010/187/17/093/19	19-Mar-19	(14.217.504)	Bayar/ Paid
9	PPN	Sep-17	00011/187/17/093/19	19-Mar-19	(20.763.868)	Bayar/ Paid
10	PPN	Okt-17	00012/187/17/093/19	19-Mar-19	(23.216.403)	Bayar/ Paid
11	PPN	Nov-17	00013/187/17/093/19	19-Mar-19	(26.143.846)	Bayar/ Paid
12	PPN	Des-17	00014/187/17/093/19	19-Mar-19	(4.721.037)	Bayar/ Paid
13	PPN	Jan-18	00024/187/18/093/19	27-Mar-19	(131.382.413)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					(1.138.408.486)	

g. Tax Assessment Letters

On April 2, 2019, the Company has received SKPLB from KPP of VAT to confirm overpayment of total Rp 320,441,716,778 and has received Tax Collection Letter amounted to Rp 6,006,320,784 related to administrative sanction of tax, so the Company has received amounted to Rp 314,435,395,994, as follows:

On April 5, 2019, the Company has received Tax Collection Letter amounted to Rp 1,138,408,486 related to administrative sanction of tax, as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 9 Desember 2019, Perusahaan menerima SKPKB dari KPP atas PPN yang mengkonfirmasi kekurangan pembayaran Rp 10.048.516.490, sebagai berikut:

On December 9, 2019, the Company has received SKPKB from KPP of VAT to confirm underpayment of total Rp 10,048,416,490, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKP/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-16	00037/287/16/093/19	12-Nov-19	(965.762.008)	Bayar/ Paid
2	PPN	Feb-16	00038/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.660.250.093)	Bayar/ Paid
3	PPN	Mar-16	00039/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.065.116.683)	Bayar/ Paid
4	PPN	Apr-16	00040/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.189.098.666)	Bayar/ Paid
5	PPN	Mei-16	00041/287/16/093/19	12-Nov-19	(449.177.022)	Bayar/ Paid
6	PPN	Jun-16	00042/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.155.132.234)	Bayar/ Paid
7	PPN	Jul-16	00043/287/16/093/19	12-Nov-19	(158.991.001)	Bayar/ Paid
8	PPN	Agu-16	00044/287/16/093/19	12-Nov-19	(923.833.813)	Bayar/ Paid
9	PPN	Sep-16	00045/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.014.008.861)	Bayar/ Paid
10	PPN	Okt-16	00046/287/16/093/19	12-Nov-19	(697.632.814)	Bayar/ Paid
11	PPN	Nov-16	00047/287/16/093/19	12-Nov-19	(769.513.295)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					(10.048.516.490)	

Pada tanggal 9 Desember 2019, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 1.377.832.345 terkait denda pajak, sebagai berikut:

On December 9, 2019, the Company has received Tax Collection Letter amounted to Rp 1,377,832,345 related to administrative sanction of tax, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor STP/ STP Number	Tanggal/ Date	STP/ Tax Collection Letter	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-16	00032/187/16/093/19	12-Nov-19	(212.631.567)	Bayar/ Paid
2	PPN	Feb-16	00033/187/16/093/19	12-Nov-19	(119.759.970)	Bayar/ Paid
3	PPN	Mar-16	00034/187/16/093/19	12-Nov-19	(256.097.050)	Bayar/ Paid
4	PPN	Apr-16	00035/187/16/093/19	12-Nov-19	(260.896.485)	Bayar/ Paid
5	PPN	Mei-16	00036/187/16/093/19	12-Nov-19	(80.060.566)	Bayar/ Paid
6	PPN	Jun-16	00037/187/16/093/19	12-Nov-19	(173.924.663)	Bayar/ Paid
7	PPN	Jul-16	00038/187/16/093/19	12-Nov-19	(52.291.122)	Bayar/ Paid
8	PPN	Agu-16	00039/187/16/093/19	12-Nov-19	(109.298.549)	Bayar/ Paid
9	PPN	Sep-16	00040/187/16/093/19	12-Nov-19	(14.843.156)	Bayar/ Paid
10	PPN	Okt-16	00041/187/16/093/19	12-Nov-19	(9.116.678)	Bayar/ Paid
11	PPN	Nov-16	00042/187/16/093/19	12-Nov-19	(88.912.539)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					(1.377.832.345)	

Pada tanggal 15 Nopember 2019, Perusahaan menerima SKPLB dari KPP atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran Rp 1.042.632.602.938 dan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 10.625.835.929 terkait denda pajak, sehingga perusahaan menerima Rp 1.032.006.767.009, dengan rincian sebagai berikut:

On November 15, 2019, the Company has received SKPLB from KPP of VAT to confirm overpayment of total Rp 1,042,632,602,938 and has received Tax Collection Letter amounted to Rp 10,625,835,929 related to administrative sanction of tax, so the Company has received amounted to Rp 1,032,006,767,009, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKP/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-17	00114/407/17/093/19	15-Nov-19	59.428.627.760	Terima/ Receipt
2	PPN	Feb-17	00115/407/17/093/19	15-Nov-19	89.473.535.275	Terima/ Receipt
3	PPN	Mar-17	00116/407/17/093/19	15-Nov-19	41.073.130.627	Terima/ Receipt
4	PPN	Apr-17	00117/407/17/093/19	15-Nov-19	83.959.607.577	Terima/ Receipt
5	PPN	Mei-17	00118/407/17/093/19	15-Nov-19	35.521.925.144	Terima/ Receipt
6	PPN	Jun-17	00119/407/17/093/19	15-Nov-19	34.426.368.380	Terima/ Receipt
7	PPN	Jul-17	00120/407/17/093/19	15-Nov-19	15.497.855.419	Terima/ Receipt
8	PPN	Agu-17	00121/407/17/093/19	15-Nov-19	68.976.281.221	Terima/ Receipt
9	PPN	Sep-17	00122/407/17/093/19	15-Nov-19	93.851.157.934	Terima/ Receipt
10	PPN	Okt-17	00123/407/17/093/19	15-Nov-19	207.479.372.372	Terima/ Receipt
11	PPN	Nov-17	00124/407/17/093/19	15-Nov-19	115.330.527.814	Terima/ Receipt
12	PPN	Des-17	00125/407/17/093/19	15-Nov-19	197.614.213.415	Terima/ Receipt
13	PPN	Jan-17	00068/287/17/093/19	15-Nov-19	(1.566.214.665)	Bayar/ Paid
14	PPN	Feb-17	00069/287/17/093/19	15-Nov-19	(3.376.662.357)	Bayar/ Paid
15	PPN	Mar-17	00070/287/17/093/19	15-Nov-19	(1.536.595.721)	Bayar/ Paid
16	PPN	Apr-17	00071/287/17/093/19	15-Nov-19	(967.340.283)	Bayar/ Paid
17	PPN	Mei-17	00072/287/17/093/19	15-Nov-19	(292.473.329)	Bayar/ Paid
18	PPN	Jun-17	00073/287/17/093/19	15-Nov-19	(182.791.411)	Bayar/ Paid
19	PPN	Jul-17	00074/287/17/093/19	15-Nov-19	(449.989.035)	Bayar/ Paid
20	PPN	Agu-17	00075/287/17/093/19	15-Nov-19	(202.189.522)	Bayar/ Paid
21	PPN	Sep-17	00076/287/17/093/19	15-Nov-19	(622.516.085)	Bayar/ Paid
22	PPN	Okt-17	00077/287/17/093/19	15-Nov-19	(341.436.866)	Bayar/ Paid
23	PPN	Nov-17	00078/287/17/093/19	15-Nov-19	(486.432.888)	Bayar/ Paid
24	PPN	Des-17	00079/287/17/093/19	15-Nov-19	(601.193.767)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					1.032.006.767.009	

12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

12. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	Rp	Rp	
PPN Keluaran Yang Belum Diterima	510.586.800.266	570.369.470.561	VAT Out Not Yet Received
Uang Muka Kontrak	465.154.794.272	772.783.381.095	Advanced Contracts
Uang Muka Investasi	280.000.000.000	-	Advanced Investment
Biaya Dibayar dimuka	170.075.172.952	52.127.276.897	Prepaid Expenses
Uang Muka Beban Umum dan Administrasi	2.524.386.521	1.453.262.340	Advances for General and Administration
Sewa Dibayar dimuka	7.442.433.132	5.417.418.363	Prepaid Rent
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	-	387.779.111	Accrued Revenue
Lain-lain	175.505.002	5.481.572.252	Others
Jumlah	<u>1.435.959.092.145</u>	<u>1.408.020.160.619</u>	Total

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang belum diterima merupakan pengakuan PPN keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namun belum dibayar oleh pemberi kerja.

Value Added Tax (VAT) Out not yet received represents of VAT output on receivable, nevertheless the owner has not paid yet.

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proyek-proyek belum berjalan, biaya provisi *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Penyelesaian biaya dibayar dimuka diperhitungkan pada saat proyek sudah berjalan, untuk biaya provisi diakui setiap bulan.

Prepayments represent the cost incurred for projects not yet started, the provision cost of Letter of Credit (L/C) and Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). The Completion prepayments is calculated when the projects start, for a fee provision is recognized each month.

Uang muka kontrak diberikan kepada subkontraktor, pemasok dan mandor borong yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan oleh Grup. Penyelesaian uang muka akan diperhitungkan dengan termin yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

Advances contracts are presented to subcontractors, suppliers and the entire stock who worked on the Group's projects. The settlement of advance will be calculated by the invoice that will be paid related to third parties concerned.

Uang muka investasi merupakan pembayaran kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas surat penawaran kerjasama aset properti investasi melalui konsorsium Perusahaan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero). Perjanjian konsorsium tersebut terbentuk untuk melakukan optimalisasi properti (tanah dan bangunan) milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sesuai dengan Perjanjian No. 161.SJ.U.1018 dan No. TP.01.03/A.DIR. 16877/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018

Advances in investment represent payments to PT Asuransi Jiwasraya (Persero) for the offering letter of joint investment property assets through a consortium of the Company, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and PT Hutama Karya (Persero). The Consortium agreement was formed to optimize the property (land and building) owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in accordance with agreement No. 161.SJ.U.1018 and No. TP.01.03/A.DIR. 16877/2018 dated October 11, 2018,.

Sesuai dengan perjanjian pendahuluan antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan konsorsium BUMN Karya bahwa tanda minat atas rencana pengembangan atau pengalihan hak atas obyek optimalisasi adalah sebesar Rp 1.400.000.000.000. Jumlah pembagian porsi untuk masing-masing BUMN Karya adalah 20%, sehingga jumlah penyertaan Perusahaan dalam konsorsium tersebut adalah Rp 280.000.000.000.

In accordance with the preliminary agreements between PT Asuransi Jiwasraya (Persero) with a consortium of BUMN Karya that the sign of interest in the development plan or transfer of rights to the optimization object is Rp 1,400,000,000,000. The number of servings for each BUMN Karya is 20%, so the amount of company's inclusion in the consortium is Rp 280,000,000,000.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Rp	Rp
Investasi pada Entitas Asosiasi/ <i>Investments in Associates</i>	3.376.912.660.824	4.190.650.156.054
Investasi pada Ventura Bersama/ <i>Investments in Joint Ventures</i>	2.007.581.530.917	2.460.822.014.487
Jumlah/ Total	<u>5.384.494.191.741</u>	<u>6.651.472.170.541</u>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Investasi pada Entitas Asosiasi

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	2019	2018	Aktivitas utama/ Principal activity	Kedudukan/ Domicile
	Rp	Rp		
PT Jasamarga Semarang Batang	1.181.915.838.627	1.338.240.345.233	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Waskita Transjawa Toll Road	1.129.460.227.941	820.612.697.793	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Jasamarga Kualanam Tol	392.431.280.812	383.883.884.651	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Cinere Serpong Jaya	299.491.092.451	107.750.508.796	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Citra Waspphotowa	295.756.008.051	279.845.099.634	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Hutama Marga Waskita	58.389.310.511	26.545.070.423	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Hotel Karya Indonesia	15.718.902.431	--	Hotel/ Hotel	Indonesia
PT Waskita Bali Mandara	3.750.000.000	3.750.000.000	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Jasamarga Solo Ngawi	--	829.436.785.542	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	--	400.585.763.982	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
Jumlah/ Total	3.376.912.660.824	4.190.650.156.054		

Investment in Associates Entities

Details of investments in associate entities are as follows:

Rincian dan mutasi investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The details of ownership interest and movements of investment in associate entities for the year 2019 and 2018 are as follows:

2019						
%	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Jasamarga Semarang Batang	40,00	1.338.240.345.233	--	(156.324.506.606)	--	1.181.915.838.627
PT Waskita Transjawa Toll Road	34,75	820.612.697.793	420.070.567.530	(111.223.037.382)	--	1.129.460.227.941
PT Jasamarga Kualanam Tol	30,00	383.883.884.651	18.000.000.000	(9.452.603.839)	--	392.431.280.812
PT Cinere Serpong Jaya	35,00	107.750.508.796	191.533.669.600	206.914.055	--	299.491.092.451
PT Citra Waspphotowa	25,00	279.845.099.634	61.000.000.000	(45.089.091.583)	--	295.756.008.051
PT Hutama Marga Waskita	30,00	26.545.070.423	25.710.000.000	6.134.240.088	--	58.389.310.511
PT Hotel Karya Indonesia	25,00	--	15.525.000.000	193.902.431	--	15.718.902.431
PT Jasamarga Solo Ngawi	40,00	829.436.785.542	454.520.000.000	(90.927.657.088)	(1.193.029.128.454)	--
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	40,00	400.585.763.982	29.109.344.000	(27.152.955.738)	(402.542.152.244)	--
PT Waskita Bali Mandara	60,00	3.750.000.000	--	--	--	3.750.000.000
Jumlah/ Total		4.190.650.156.054	1.215.468.581.130	(433.634.795.662)	(1.595.571.280.698)	3.376.912.660.824

2018						
%	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Jasamarga Semarang Batang	40,00	61.553.113.737	1.272.007.560.000	4.679.671.496	--	1.338.240.345.233
PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) (d/h/ formerly PT Solo Ngawi Jaya)	40,00	549.938.491.414	303.112.084.000	(23.613.789.872)	--	829.436.785.542
PT Waskita Transjawa Toll Road	30,00	--	904.536.000.000	(83.923.302.207)	--	820.612.697.793
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK) (d/h/ formerly PT Ngawi Kertosono Jaya)	40,00	380.675.125.233	79.200.000.000	(59.289.361.251)	--	400.585.763.982
PT Jasamarga Kualanam Tol	30,00	296.426.884.210	115.710.000.000	(28.252.999.559)	--	383.883.884.651
PT Citra Waspphotowa	25,00	256.178.814.687	25.000.000.000	(1.333.715.053)	--	279.845.099.634
PT Cinere Serpong Jaya	35,00	88.573.776.863	18.536.700.000	640.031.933	--	107.750.508.796
PT Hutama Marga Waskita	30,00	4.048.372.535	22.800.000.000	(303.302.112)	--	26.545.070.423
PT Waskita Bali Mandara	60,00	3.750.000.000	--	--	--	3.750.000.000
PT Jasamarga Transjawa Tol	35,00	437.500.000	--	--	(437.500.000)	--
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	40,00	--	200.000.000	--	(200.000.000)	--
Jumlah/ Total		1.641.582.078.679	2.741.102.344.000	(191.396.766.625)	(637.500.000)	4.190.650.156.054

PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)

Pendirian PT Waskita MNC Transjawa Toll Road (entitas anak WTR) adalah sesuai dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 25 tanggal 28 September 2015. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-2458481. AH.01.01.TH.2015 tanggal 29 September 2015.

PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)

The establishment of PT Waskita MNC Transjawa Toll Road (subsidiary of WTR) was based on notarial deed No. 25 dated September 28, 2015 of notary Fathiah Helmi, S.H. This notarial deed has been approved by The Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-2458481.AH.01.01.TH.2015 dated September 29, 2015.

Berdasarkan akta notaris Catur Virgo, S.H., M.H., No. 32 tanggal 27 Mei 2016 telah disetujui perubahan nama dari "PT Waskita MNC Transjawa Toll Road" menjadi "PT Waskita Transjawa Toll Road". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-005.3.001 tanggal 31 Mei 2016.

Based on notarial deed Catur Virgo, S.H., M.H., No. 32 dated May 27, 2016 which approved to changing the name of "PT Waskita MNC Transjawa Toll Road" into "PT Waskita Transjawa Toll Road". The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-AH.01.03-005.3.001 dated May 31, 2016.

Berdasarkan akta notaris No. 23 tanggal 10 April 2018 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR menjual 57.14% kepemilikan saham di WTR dengan harga sebesar Rp 2.857.143.347.539. Kepemilikan saham WTR di WTR menjadi sebesar 42.85% setelah penjualan tersebut. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0050658.AH.01.11 tanggal 11 April 2018.

Based on notarial deed No. 23 dated April 10, 2018 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR sold its shares of WTR with 57,14% ownership at a price of Rp 2,857,143,347,539. WTR's share ownership in WTR became 42,85% after the sales of share transaction. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-0050658.AH.01.11 dated April 11, 2018.

Berdasarkan akta notaris No. 26 tanggal 11 April 2018 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., kepemilikan saham WTR di WTR menjadi sebesar 29,99%. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0144385 tanggal 12 April 2018.

Based on notarial deed No. 26 dated April 11, 2018 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR's share ownership in WTR became 29.99%. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-AH.01.03-0144385 dated April 12, 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 62 tanggal 23 Mei 2018 dari notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0215105 tanggal 12 Juni 2018.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the Notarial deed No. 62 dated May 23, 2018 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0215105 dated June 12, 2018.

WTR melakukan *Put Option* atas Kepemilikan saham di WTR sebesar 4,75%, sesuai dengan Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 25 tanggal 10 April 2018 Pasal 6.3 perihal Pengalihan Saham – *Put Option* dan *Call Option* sebesar Rp 420.070.567.530, kepemilikan saham WTR di WTR menjadi sebesar 34,75%.

WTR performed a Put Option on Ownership Shares in WTR of 4.75%, based on shareholders agreement No. 25 dated April 10, 2018 article 6.3 regarding the transfer of shares – Put Option and Call Option amounted to Rp 420,070,567,530, WTR's share ownership in WTR became 34.75%.

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JSN atau setara Rp 166.820.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 34, Notaris Fathiah Helmi, S.H, pada tanggal 10 Juni 2015.

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

WTR, a subsidiary, has an investment of 40% in JSN or equivalent to Rp 166,820,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 34 of Notary Fathiah Helmi, S.H., dated June 10, 2015.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 96.404.000.000, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 9 Juli 2015.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 96,404,000,000, based on the decree of the Circular of General Meeting of Shareholders (GMS) dated July 9, 2015.

WTR menambah penyertaan melalui konversi utang pada JSN sebesar Rp 1.075.839.217, berdasarkan Berita Acara Utang-Piutang antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR dan JSN tanggal 30 Juni 2016.

WTR increased its investment through conversion of debt in JSN amounted to Rp 1,075,839,217, based on The Minutes of Debt between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR and JSN dated June 30, 2016.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 48.717.196.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 11 Februari 2016.

WTR increased more investment in JSN amounted to Rp 48,717,196,000, based on the decree of the Circular of GMS dated February 11, 2016.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 47.293.496.800, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 18 Agustus 2016.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 47,293,496,800, based on Shareholders' General Meeting Circular (GMS) decision dated August 18, 2016.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 74.448.000.000, berdasarkan Akta No. 4 dari Notaris Ati Mulyati, S.H., M.Kn., tanggal 19 Juli 2017.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 74,448,000,000, based on the notarial deed No. 4 by notary Ati Mulyati, S.H., M.Kn., dated July 19, 2017.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 101.332.792.000, berdasarkan Akta No. 5 dari Notaris Ati Mulyati, S.H., M.Kn., tanggal 18 Oktober 2017.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 101,332,792,000, based on the notarial deed No. 5 by notary Ati Mulyati, S.H., M.Kn., dated October 18, 2017.

Berdasarkan akta notaris Windalina, S.H., No. 3 tanggal 27 Februari 2018 telah disetujui perubahan nama dari "PT Solo Ngawi Jaya" menjadi "PT Jasamarga Solo Ngawi". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0087454 tanggal 28 Februari 2018.

Based on notarial deed Windalina, S.H., No. 3 dated February 27, 2018 which approved to changing the name of "PT Solo Ngawi Jaya" into "PT Jasamarga Solo Ngawi". The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-AH.01.03-0087454 dated February 28, 2018.

WTR menambah penyertaan pada JSN sehingga kepemilikan menjadi Rp 534.911.388.000, berdasarkan Akta No. 5 dari Notaris Lintar Trie Utami, S.H. tanggal 18 Mei 2018, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0208162 tanggal 22 Mei 2018.

WTR increased its investment in JSN increasing their ownership to Rp 534,911,388,000, based on the notarial deed No. 5 by notary Lintar Trie Utami, S.H., dated May 18, 2018 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-AH.01.03-0208162 dated May 22, 2018.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 303.112.040.000, berdasarkan Akta No. 3 dari Notaris Windalina, S.H., tanggal 13 Desember 2018.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 303,112,040,000, based on the notarial deed No. 3 by Windalina, S.H., dated December 13, 2018.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 454.520.000.000 berdasarkan Akta No. 6 dari Notaris Windalina, S.H., tanggal 11 April 2019.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 454,520,000,000, based on the notarial deed No. 6 by Windalina, S.H., dated April 11, 2019.

WTR melepaskan 40% kepemilikan pada JSN dengan harga jual Rp 1.320.000.000.000 kepada PT Kings Key Limited, berdasarkan Akta No. 94 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 18 Desember 2019, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0375861. Atas transaksi ini WTR memperoleh laba sebesar Rp 126.970.871.546 (Catatan 42).

WTR relinquished 40% ownership in JSN with sale price amounted to Rp 1,320,000,000,000 to PT Kings Key Limited, based on Deed No. 94 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., December 18, 2019, which was approved by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-AH.01.03-0375861. On this transaction WTR gained a profit of Rp 126,970,871,546 (note 42).

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK)

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JNKK atau setara Rp 8.780.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 35, Notaris Fathiah Helmi, S.H.

WTR, a subsidiary, has an investment of 40% in JNKK or equal to Rp 8,780,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 35 of Notary Fathiah Helmi, S.H.

WTR menambah penyertaan melalui utang pada JNKK sebesar Rp 2.898.818.457, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 17 Juni 2015.

WTR increased its investment through a debt in JNKK amounted to Rp 2,898,818,457, based on the decree of the Circular of GMS of Shareholders dated June 17, 2015.

WTR menambah penyertaan pada JNKK sebesar Rp 55.435.600.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 7 Juli 2015.

WTR increased its investment in JNKK amounted to Rp 55,435,600,000, based on the decree of the Circular of GMS dated July 7, 2015.